ISSN: 1411-0229

KULTURA

VOLUME : 20 No. 1 Maret 2019

Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

Daftar Isi

Junaidi	Kualitas Terjemahan Teks Abstrak *The Stress Moderating Role Of Benefit Finding On Psychological Distress And Well-Being Among Women Living With HIV/AIDS*
Diko Ammar, SH. M. Kn	Penetapan Harga Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pemerintahan Binjai)
Muhammad Rizaldy Wibowo	Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Karya Berseri Desa Pematang Setrak Serdang Bedagai
Muslim Harahap, SH. MH	Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Yelisman Zebua, S.Pd., M.Pd.T	Hubungan Struktur Bangunan Dengan Kekuatan Bangunan Untuk Menahan Gempa Bumi
Yaaroziduhu Sarumaha, S.Pd	Pelaksanaan Supervisi Pengawas Dalam Peningkatan Strategi Pembelajaran Pada SD Negeri 071116 Siwalawa Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan
Tandrasokhi Halawa, S.Pd., M.Pd	Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dan Penguasaan Materi Operasi Aljabar Melalui Latihan Mandiri Bagi Siswa SMPN 3 Lolowau Kabupaten Nias Selatan
Peringatan Harefa, S.E, M.M	Pengaruh Pemberian Insentif Dan Tunjangan Terhadap Produktivitas Kerja
Aluizaro Zega, S.Pd.SD	Peran Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Di SD Negeri 076682 Hilimbowo
Shita Tiara, SE, Ak, M,Si dan Reza Hanafi Lubis,SE, M.Si	Perencanaan Pajak dan Laba Bersih Pada Perusahaan *Finance* Di Indonesia
Hj. Adawiyah Nasution, SH. M. Kn	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Praktik Hukum Di Indonesia
Diana Sopha, SS, M.Hum	Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris Dengan Media Lagu Islami Pada Guru Tk Zikrul Falah
Rukmini	Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa
Sri Murniyanti	Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Nusantara Card Semesta Medan
Dalifati Ziliwu, S.Pd., M.Pd	Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Dengan *Flip Chart* Di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara
Sonitehe Gea, S.H, M.M	Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Aferiaman Telaumbanua, S.E, M.M	Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Nov Elhan Gea, S.E, M.M	Peranan Sumberdaya Manusia Di Lembaga Industri Dan Pemerintahan
Eliagus Telaumbanua, S.E, M.M	Peranan Strategis Manajeman Sumberdaya Manusia Dalam Perusahaan
Giovani Tania Zebua, S.Pd., M.Si.M	Peranan Ilmu Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di Indonesia
Nelson Pinem	Analisis Investasi Asing Dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ISSN: 1411 – 0229

JURNAL ILMIAH KULTURA

VOL. 20 NO. 1 MARET 2019

1.	**Pelindung**	: H. Hardi Mulyono, SE., MAP
2.	**Pembina**	: 1. Dr. H. Firmansyah, M.Si
		: 2. Dr. Ridwanto, M.Si
		: 3. Drs. Milhan, MA
		: 4. Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D
3.	**Ketua Pengarah**	: Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd
4.	**Penyunting**	
	Ketua	: Dr. Anggi Tias Pratama
	Sekretaris	: Mhd. Zulkifli Hasibuan, M.Si
	Anggota	: 1. Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd
		: 2. Prof. Dr. Saryono, M.S
		: 3. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum
		: 4. Dr. Madyunus Salayan, M.Si
		: 5. Nelvitia Purba, SH, M.Hum., Ph.D
		: 6. Dr. Bambang Hermanto, M.Si
5.	**Editor Internasional**	: 1. Prof. Dr. Ku Ruhana Ku Mahamud (Universiti Utara Malaysia)
		: 2. Senior Asst. Prof. Dr. Hjh. Dayang Fatimah Binti Haji Awang Chuchu (Universiti Brunei Darussalam)
		: 3. Asst. Prof. Dr. Worapat Paireekreng (Dhurakij Pundit University Thailand)
6.	**Disainer / Ilustrator**	: 1. Agus Al Rozy, SP
		: 2. Daim Azhari Parinduri, S.Kom
7.	**Bendahara/Sirkulasi**	: Nasruddin Nasrun, Amd

Pengantar Penyunting

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah SWT atas berkat-Nya penyunting dapat menghadirkan kembali Volume 20.

Volume 20 No. 1 Maret 2019 Jurnal Ilmiah Kultura memuat tulisan yang berkenaan dengan Kualitas Terjemahan Teks Abstrak, Penetapan Harga Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi, Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman, Sistem Diversi dan Restorative Justice, Hubungan Struktur Bangunan Dengan Kekuatan bangunan, Pelaksanaan Supervisi Pengawas, Peningkatan Hasil Belajar Siswa, Pengaruh Pemberian Insentif, Peran Pengawas Sekolah, Perencanaan Pajak dan Laba Bersih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat, Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris, Pengaruh Kegiatan dan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Pengembangan Media Pembelajaran Biologi, Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-undang, Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja, Peranan Sumberdaya Manusia Dilembaga Industri dan Pemerintahan, Peranan Strategis Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Perusahaan, Peranan Ilmu Manajemen dalam Peningkatan Mutu, Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang yang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pada terbitan kali ini, tulisan berasal dari beberapa orang dosen dan Guru antara lain dari : Univ. Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, STIE Pembangunan Nasional Nias, Pengawas Sekolah, STMIK Tri Guna Darma, IKIP Gunung Sitoli, UISU.

Medan, Maret 2019
Penyunting,

Penerbit:

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Jl. Sisingamangaraja/Garu II No. 93 Medan 20147
Telp. (061) 7867044 – 7868487 Fax. 7862747
Home Page: http://www.umnaw.ac.id/?page_id-2567
E-mail: info@umnaw.ac.id
Terbit Pertama Kali : Juni 1999
JURNAL TRIWULAN

ISSN: 1411 – 0229

Vol. 20 No. 1 Maret 2019

DAFTAR ISI

Kualitas Terjemahan Teks Abstrak *The Stress Moderating Role Of Benefit Finding On Psychological Distress And Well-Being Among Women Living With HIV/AIDS*
(***Junaidi***)..... 1

Penetapan Harga Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pemerintahan Binjai)
(***Diko Ammar, SH. M. Kn***)..... 11

Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Pada Koperasi Karya Berseri Desa Pematang Setrak Serdang Bedagai
(***Muhammad Rizaldy Wibowo***) 22

Sistem Diversi Dan Restorative Justice Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
(***Muslim Harahap, SH. MH***) 27

Hubungan Struktur Bangunan Dengan Kekuatan Bangunan Untuk Menahan Gempa Bumi
(***Yelisman Zebua, S.Pd., M.Pd.T***) 38

Pelaksanaan Supervisi Pengawas Dalam Peningkatan Strategi Pembelajaran Pada SD Negeri 071116 Siwalawa Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan
(***Yaaroziduhu Sarumaha, S.Pd***) 50

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dan Penguasaan Materi Operasi Aljabar Melalui Latihan Mandiri Bagi Siswa SMPN 3 Lolowau Kabupaten Nias Selatan
(***Tandrasokhi Halawa, S.Pd., M.Pd***) 60

Pengaruh Pemberian Insentif Dan Tunjangan Terhadap Produktivitas Kerja
(***Peringatan Harefa, S.E, M.M***) 66

Peran Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Di SD Negeri 076682 Hilimbowo
(***Aluizaro Zega, S.Pd.SD***) 75

Perencanaan Pajak dan Laba Bersih Pada Perusahaan *Finance* Di Indonesia
(***Shita Tiara, SE, Ak, M,Si dan Reza Hanafi Lubis,SE, M.Si***) 86

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Praktik Hukum Di Indonesia
(***Hj. Adawiyah Nasution, SH. M. Kn***) 93

Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris Dengan Media Lagu Islami Pada Guru Tk Zikrul Falah
(***Diana Sopha, SS, M.Hum***) 101

Pengaruh Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa
(***Rukmini***) 105

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Nusantara Card Semesta Medan
(***Sri Murniyanti***) 111

Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Dengan *Flip Chart* Di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara
(***Dalifati Ziliwu, S.Pd., M.Pd***) 116

Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(***Sonitehe Gea, S.H, M.M***) 124

Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
(***Aferiaman Telaumbanua, S.E, M.M***) 133

Peranan Sumberdaya Manusia Di Lembaga Industri Dan Pemerintahan
(***Nov Elhan Gea, S.E, M.M***) 142

Peranan Strategis Manajeman Sumberdaya Manusia Dalam Perusahaan
(***Eliagus Telaumbanua, S.E, M.M***) 152

Peranan Ilmu Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di Indonesia
(***Giovani Tania Zebua, S.Pd., M.Si.M***) 161

Analisis Investasi Asing Dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara
(***Nelson Pinem***) 170

KUALITAS TERJEMAHAN TEKS ABSTRAK *THE STRESS MODERATING ROLE OF BENEFIT FINDING ON PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND WELL-BEING AMONG WOMEN LIVING WITH HIV/AIDS*

Junaidi[1]

Abstract

This study deals with a descriptive-qualitative study with an embedded-case study research design. The objective of the study is to describe the quality of the translation on the accuracy in content, acceptability, and readability of translated text of The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS. The data of the research were obtained from an abstract entitled The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDSand its translation in Bahasa Indonesia. Two methods of data collection were employed: content analysis was used to obtain data from both source and target texts, and questionnaire was used to gather data about the accuracy in content, acceptability, and readability. The accuracy in content, acceptability and readability of the translated text were rated by three raters. The results of data analysis show that: (1) The average score for accuracy in content is 2.33. (2) The average score for acceptability is 2.75. (3) The average score for readability is 2.71. As the average score for those three aspects is 2.53, it can be concluded that the translation of the abstractThe Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS by Google Translate was rated close to good quality.

***Keywords**: quality, abstract, accuracy, acceptability, and readability*

A. Pendahuluan

Penerjemahan dapat diartikan sebagai pengalih bahasaan keseluruhan teks, kalimat demi kalimat dengan mempertimbangkan aspek emosi, gaya dan nuansa budaya dari penulis aslinya. Tujuan pokok menerjemahkan adalah untuk mengalihkan pesan yang tertulis dalam BSu kedalam BSa dengan mengutamakan kesepadanan makna (Newmark, 1991:7) Tercapainya kesepadanan makna sangatlah ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan penerjemah dalam memahami Tsu dan menuangkan pesan makna ke dalam TSa.

Penerjemahan dapat dipandang sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai proses, kita memusatkan perhatian kepada 'perjalanan' penerjemah dari teks asli sampai ke hasil akhir terjemahan. Dalam hal ini kita lebih berkepentingan dengan masalah kualitas, tanpa perlu lagi menelusuri benar-tidaknya atau sesuai-tidaknya proses yang dilewati oleh penerjemah. Berdasarkan pemilahan proses-produk ini, penelitian penerjemahan cenderung berorientasi pada keduanya, yaitu penelitian penerjemahan yang berorientasi pada proses dan penelitian penerjemahan yang berorientasi pada produk. Penelitian penerjemahan yang berorientasi pada produk bertujuan untuk membuktikan apakah suatu terjemahan berkualitas ataukah tidak (Nababan, 2003: 121). Penelitian ini mengkaji tingkat keakuratan pengalihan pesan maupun tingkat keterbacaan dalam suatu terjemahan. Peneliti mengkaji 'hasil' atau 'produk' yang dihasilkan seorang penerjemah. Hal tersebut sangat penting mengingat abstrak salah satunya berguna untuk menarik minat pembaca seluruh isi tulisan ilmiah tersebut. Jadi dengan kata lain dibaca atau tidaknya sebuah tulisan ilmiah sedikit banyaknya tergantung pada abstraknya. Abstrak dalam bahasa Inggris bisa dikatakan adalah suatu hal yang terdapat pada berbagai tulisan ilmiah maupun hasil penelitian karena hal itu sebagai suatu persyaratan. Baik itu untuk skripsi, tesis, disertasi

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

maupun jurnal ilmiah. Banyak dari peneliti-peneliti di Indonesia memilih menggunakan jasa penerjemah atau jasa *translate* untuk membantu mereka baik dari segi keakuratan hasil terjemahan maupun dari segi efisiensi waktu termasuk juga memilih menggunakan mesin penerjemahan seperti *google translate* yang notabene memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah kualitas terjemahan terhadap tingkat keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS*oleh *Google Translate* ?

B. Kajian Teori

Penerjemahan adalah suatu upaya untuk mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa kedalam bahasa yang lain. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat penerjemahan sebagai sekedar upaya untuk menggantikan teks dalam satu bahasa ke dalam teks bahasa lain. "Seorang penerjemah tidak mungkin dapat menggantikan teks bahasa sumber (BSu) dengan teks bahasa sasaran (BSa) karena struktur kedua bahasa itu pada umumnya berbeda satu sama lainnya. Materi teks BSu juga tidak pernah digantikan dengan materi teks BSa "(Nababan, 2003).

Nida dan Taber (1974:12) mengemukakan bahwa penerjemahan adalah "*Consistsin reproducing in the receptor language the natural equivalentofthesourcelanguagemessagefirstintermsofmeaning and secondly in terms of style*". Dalam hal ini penerjemah adalah sebagai reseptor pesan dalam bahasa sumber (BSu) dan kemudian pada saat menerjemahkan maka ia sebagai pengirim pesan atau penulis dalam bahasa sasaran (BSa).

Dalam kegiatan penerjemahan sesungguhnya yang terjadi adalah komunikasi antara penulis dan pembaca dengan perantara seorang penerjemah. Penulis bertindak sebagai pengirim pesan, pesan itu ditangkap lebih dulu oleh penerjemah untuk kemudian dialihkan dari Bsu ke BSa, selanjutnya dikirimkan kembali kepada pembaca. Oleh karena itu penerjemah harus memiliki pengetahuan BSu yang baik sebaik pemahamannya terhadap BSa. Bsu dalam penelitian ini adalah bahasa Inggris sedangkan BSa adalah bahasa Indonesia. Penerjemahan bukan hanya sekedar aktivitas pengalihan pesan, melainkan juga merupakan kegiatan menjadikan pesan BSu dapat dipahami secara wajar oleh pembaca Bsa.

Nababan, dkk (2012:44-45) menentukan bahwa parameter terjemahan yang berkualitas itu adalah keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.

Keakuratan terjemahan berkaitan dengan seberapa jauh isi teks bahasa sumber bisa tersampaikan dengan benar ke dalam bahasa sasaran. Newmark (1988 :188) berpendapat bahwa dalam menilai hasil terjemahan, aspek yang harus diukur keakuratannya adalah keakuratan pragmatis dan referensialnya. Keakuratan pragmatis adalah hasil terjemahan mampu mengkomunikasikan dengan baik isi teks Bahasa Sumber ke dalam Bahasa Sasaran. Sedangkan keakuratan referensial adalah bahwa teks Bahasa Sumber yang diterjemahkan memang akurat dan tidak mengandung kesalahan.

Menurut Nababan, dkk (2012:45) Istilah keberterimaan merujuk pada apakah suatu terjemahan sudah diungkapkan sesuai dengan kaidah-kaidah, norma dan budaya yang berlaku dalam bahasa sasaran ataukah

belum, baik pada tataran mikro maupun pada tataran makro. Konsep keberterimaan ini menjadi sangat penting karena meskipun suatu terjemahan sudah akurat dari segi isi atau pesannya, terjemahan tersebut akan ditolak oleh pembaca sasaran jika cara pengungkapannya bertentangan dengan kaidah-kaidah norma dan budaya bahasa sasaran.

Tercapainya derajat keterbacaan teks yang memadai seharusnya menjadi tujuan dari penerjemahan. Keterbacaan (readability) teks menurut Richard et al (1990:238) adalah how easily written materials can be read and understood.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan suatu teks, Richard et al (1990:238) menyebutkan antara lain panjang rata-rata kalimat, jumlah kata-kata baru, dan kompleksitas gramatikal dari bahasa yang digunakan. Di samping beberapa faktor di atas, Nababan sendiri (1999:62-78) menambahkan faktor penggunaan kata-kata baru, penggunaan kata asing dan daerah, penggunaan kata taksa, penggunaan kalimat bahasa asing, penggunaan kalimat taksa, penggunaan kalimat tidak lengkap, panjang rata-rata kalimat, alur pikiran yang tidak runtut dan tidak logis, dan penggunaan kalimat kompleks juga akan menentukan tinggi rendahnya tingkat keterbacaan suatu teks.

Penelitian ini menggunakan teori Nababan dkk (2012) untuk menentukan kualitas keakuratan terjemahan abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS*oleh *Google Translate*. Mereka menyatakan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menilai kualitas terjemahan, yaitu keakuratan, keberterimaan,dan keterbacaan. Keakuratan berhubungan dengan pengalihan makna atau pesan yang tepat atau sesuai dari bahasa sumber kebahasa sasaran. Disisi lain, keberterimaan membahas tentang kesesuaian terjemahan dengan kaidah atau tata bahasa yang berlaku dibahasa sasaran, sedangkan keterbacaan menunjukkan apakah terjemahan tersebut mudah dipahami atau tidak. Penelitian ini akan membahas tentang keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan terjemahan untuk melihat apakah abstrak tersebut dari bahasa sumber sudah dialihkan dengan tepat kedalam bahasa sasaran.

Untuk menilai keakuratan terjemahan, Nababan dkk (2012) telah memberikan instrumen penilaian. Instrumen penilaian tersebut berisi parameter kualitatif dan nilai yang berkisar dari 1 (satu) hingga 3 (tiga).1 (Satu) berarti terjemahan tidak akurat, 2 (dua) berarti terjemahan kurang akurat, dan 3 (tiga) berarti terjemahan tersebut akurat. Sedangkan untuk menilai keberterimaan, paramater kualitatifnya adalah 1 (satu) berarti terjemahan tidak berterima, 2 (dua) kurang berterima dan 3 (tiga) berarti berterima, dan untuk menilai keterbacaan paramater kualitatifnya adalah 1 (satu) berarti keterbacaan rendah, 2 (dua) keterbacaan sedang dan 3 (tiga) berarti keterbacaan tinggi.

C. Metode Penelitian

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas terjemahan terhadap tingkat keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS* oleh Google Translate.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengumpulkan data kualitatif berupa teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS*oleh Google Translatedan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Data yang berasal dua sumber tersebut kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kualitatif (Miles dan Huberman, 1994)

Sumber Data

Data penelitian ini bersumber pada dokumen dan informan. Data yang bersumber pada dokumen terdiri atas teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS* dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji data yang diperoleh dari para informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah analisis dokumen dan*Focus Group Discussion(FGD)*. Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data berupa *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS*. Teknik penerjemahan dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Disisi lain, FGD digunakan peneliti untuk memperoleh nilai keakuratan terjemahan abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDSt*ersebut. FGD merupakan diskusi dengan para *raters* (penilai) yang dilampiri dengan kuesioner sehingga nilai keakuratan terjemahan dapat diperoleh. Ada 3 (tiga) orang rater yang terlibat dalam penelitian ini, Para*rater* tersebut memiliki kriteria antara lain, menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan baik, memiliki keahlian dalam bidang penerjemahan secara teori maupun praktik

Kuisioner

Kuisioner yang digunakan untuk menggali data tentang tingkat keakuratan pesan, tingkat keberterimaan, dan tingkat keterbacaan teks terjemahan berisi dua tipe pertanyaan. Pertanyaan tiper pertama berbentuk pertanyaan tertutup berupa skoring atau penilaian oleh*raters*. Informan memilih satu jawaban dari 3 alternatif yang disediakan. Ketiga alternatif itu menunjukkan skala atau skor penilaian. Skala penilaian tersebut diadaptasi dari skala penilaian tingkat keakuratan pesan yang diusulkan oleh Nababan (2012) sebagai berikut ini:

A. Intrumen Penilai Tingkat Keakuratan Terjemahan

Kategori Terjemahan	Skor	Parameter Kualitatif
Akurat	3	Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dilakukan secara akurat ke dalam bahasa sasaran, sama sekali tidak terjadi distorsi makna.
Kurang Akurat	2	Sebagian besar makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber sudah dialihkan secara akurat ke dalam bahasa sasaran. Namun masih terdapat distorsi makna atau terjemahan makna ganda (taksa) atau ada yang dihilangkan yang mengganggu keutuhan pesan.
Tidak Akurat	1	Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran atau dihilangkan (deleted).

B. Intrumen Penilai Tingkat Keberterimaan Terjemahan

Kategori Terjemahan	Skor	Parameter Kualitatif
Berterima	3	Terjemahan terasa alamiah, istilah teknis yang digunakan lazim digunakan, dan akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
Kurang Berterima	2	Pada umumnya terjemahan sudah terasa alamiah; namun ada sedikit masalah pada penggunaan istilah teknis atau terjadi sedikit kesalahan gramatikal.
Tidak Berterima	1	Terjemahan tidak alamiah atau terasa seperti karya terjemahan; istilah teknis yang digunakan tidak lazim digunakan dan tidak akrab bagi pembaca; frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

C. Intrumen Penilai Tingkat Keterbacaan Terjemahan

Kategori Terjemahan	Skor	Parameter Kualitatif
Tingkat Keterbacaan Tinggi	3	Kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat atau teks terjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.
Tingkat Keterbacaan Sedang	2	Pada umumnya terjemahan dapat dipahami oleh pembaca; namun ada bagian tertentu yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami terjemahan.
Tingkat Keterbacaan Rendah	1	Terjemahan sulit dipahami oleh pembaca.

Pertanyaan tipe kedua berbentuk pertanyaan terbuka. Informan diberikan kesempatan untuk memberikan alasan-alasan yang mendasari pilihan mereka pada pertanyaan tipe pertama. Alasan-alasan yang dimaksudkan menyangkut tingkat keakuratan pesan, tingkat keberterimaan dan tingkat keterbacaan teks terjemahan.

Pembobotan

Terjemahan yang berkualitas harus akurat, berterima dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Masing-masing dari ketiga aspek tersebut mempunyai bobot nilai yang berbed (Nababan, 2012:51)

Adapun ukuran pembobotan Nababan (2012) untuk kualitas terjemahan adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot
1	Keakuratan	3
2	Keberterimaan	2
3	Keterbacaan	1

D. Hasil Penelitian

Tingkat Keakuratan Pesan, Keberterimaan Terjemahan Teks Abstrak
Tabel 1. Skor Rata-rata Tingkat Keakuratan

KEAKURATAN

Data No:	Skor		
	PA	PB	PC
1	2	3	2
2	2	2	3
3	3	2	2

4	2	3	2
5	2	3	2
6	2	3	2
7	2	3	2
8	2	3	2
Total	**17**	**22**	**17**
Rata-rata	**2,125**	**2,75**	**2,125**
Rata-rata (PA+PB+PC)/3 =			**2,33**

Tabel 2. Skor Rata-rata Tingkat Keberterimaan

KEBERTERIMAAN

Data No:	Skor		
	PA	PB	PC
1	3	3	3
2	3	2	3
3	3	3	3
4	2	3	2
5	3	3	3
6	3	2	2
7	3	3	3
8	2	3	3
Total	**22**	**22**	**22**
Rata-rata	**2,75**	**2,75**	**2,75**
Rata-rata (PA+PB+PC)/3 =			**2,75**

Kalimat terjemahan yang mendapat skor 2 untuk tingkat keakuratan pesan dan keberterimaan terjemahan sangat dominan kemunculannya dalam setiap terjemahan teks abstrak, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut ini.

Contoh 1

BSu

The Stress Moderating Role of Benefit finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living with HIV/AIDS

BSa

Peran Moderator Stress dalam mencari Manfaat pada kesulitas Psikologis dan kesejahteraan di antara Perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS.

Kalimay bahasa sumber (contoh 1) diatas, diterhemahkan secara kurang akurat ke dalam bahasa Indonesia, Terdapat distorsi makna pada peran moderator stress

Contoh 2

BSu

Hierarchical regression analysis demonstrated that physical symptoms, social conflict, and benefit finding were associated with psychological distress and positive affect, even after controlling for social support, locus of control, and demographic confounds.

BSa

Analisis regresi hierarkis menunjukkan bahwa gejala fisik, konflik sosial, dan manfaat dikaitkan dengan tekanan psikologis dan pengaruh positif, bahkan setelah mengendalikan dukungan sosial, locus of control, dan demografi mengacaukan..

Kalimat bahasa sumber (contoh 2) diatas, diterjemahkan secara kurang akuray ke dalam bahasa Indonesia, Terdapat masalah pada penggunaan istilah 'demografi mengacaukan' yang seharusnya 'kesulitan demografis' serta kata 'finding' yang tidak diterjemahkan.

Contoh 3

BSu

Significant interactions revealed that among women with a high number of HIV-related physical symptoms, benefit finding moderated the negative effects of physical symptoms on both depressive and anxious symptoms.

BSa

Interaksi yang signifikan mengungkapkan bahwa di antara perempuan dengan sejumlah besar gejala fisik terkait HIV, mendapatkan manfaat memoderasi efek negatif dari gejala fisik pada gejala depresi dan cemas.

Kalimat bahasa sumber (**contoh 3**) di atas, diterjemahkan secara kurang akurat ke dalam bahasa Indonesia. Kata 'finding' diterjemahkan 'mendapatkan' dalam bahasa sasaran seharusnya diterjemahkan menjadi 'temuan'.

Tabel 3. Skor Rata-rata Tingkat Keterbacaan Terjemahan Teks Abstrak

KETERBACAAN

Data No:	Skor		
	PA	PB	PC
1	3	3	3
2	3	3	3
3	2	3	3
4	2	2	2
5	3	3	3
6	3	2	3
7	2	3	3
8	3	2	3

Total	**21**	**21**	**23**
Rata-rata	**2,625**	**2,625**	**2,875**
Rata-rata (PA+PB+PC)/3 =			**2,71**

Seperti yang dirangkum dalam Tabel 3, secara keseluruhan terjemahan teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS* oleh Google Translate memperoleh skor rata-rata 2,71. Skor ini menunjukkan bahwa pada umumnya kalimat-kalimat terjemahan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Namun dapat dipastikan pula bahwa ada beberapa keterbacaan kalimat terjemahan yang tinggi (skor 3) dan keterbacaan yang sedang (skor 2).

Dibawah ini dicuplik kalimat-kalimat terjemahan dari teks abstrak yang dipandang agak sulit dan/atau sulit untuk dipahami oleh masing-masing pembaca.

Teks Abstrak

Rater 1:

1. Untuk penelitian ***cross-sectional ini***, sampel yang beragam secara etnis (N = 138) dari wanita yang hidup dengan HIV / AIDS menyelesaikan serangkaian langkah-langkah laporan diri. (Teks Abstrak/P1/No 3)
2. Analisis regresi hierarkis menunjukkan bahwa gejala fisik, konflik sosial, dan manfaat dikaitkan dengan tekanan psikologis dan pengaruh positif, bahkan setelah mengendalikan dukungan sosial, ***locus of control***, dan demografi mengacaukan. (Teks Abstrak/P1/No 4)
3. Temuan-temuan ini menunjukkan mekanisme potensial (mis., ***Buffering*** stres) dimana manfaat dapat mempromosikan penyesuaian psikologis. (Teks Abstrak/P1/No 7)

Rater 2:

1. Analisis regresi hierarkis menunjukkan bahwa gejala fisik, konflik sosial, dan manfaat dikaitkan dengan tekanan psikologis dan pengaruh positif, bahkan setelah mengendalikan dukungan sosial, ***locus of control***, dan demografi mengacaukan. (Teks Abstrak/P2/No 4)
2. Lebih lanjut, temuan bahwa manfaat hanya memoderasi ***stresor pemicu*** pertumbuhan (mis., Penyakit), tetapi bukan efek dari pemicu stres lainnya (mis., Konflik sosial), menyarankan kemungkinan batasan untuk peran ***penyangga stres dari mendapatkan manfaat***.(Teks Abstrak/P2/No 8)

Rater 3:

1. Analisis regresi hierarkis menunjukkan bahwa gejala fisik, konflik sosial, dan manfaat dikaitkan dengan tekanan psikologis dan pengaruh positif, bahkan setelah mengendalikan dukungan sosial, ***locus of control***, dan demografi mengacaukan. (Teks Abstrak/P3/No 4)

Tabel 4. Kualitas Terjemahan Teks Abstrak

TEKS ABSTRAK	SKOR RATA-RATA		
	Keakuratan	keberterimaan	Keterbacaan
The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS	**2,33**	**2.75**	**2.71**

SKOR RATA-RATA			JLH	RATA-RATA
Keakuratan	Keberterimaan	Keterbacaan		
2,33x3 = 6,99	2,75x2 = 5,5	2,71x1 = 2,71	15,2	15,2 : 6 = 2,53

5. Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat bahwa tingkat keakuratan pesan, keberterimaan dan keterbacaan terjemahan teks abstrak *The Stress Moderating Role of Benefit Finding on Psychological Distress and Well-Being among Women Living With HIV/AIDS* oleh *Google Translate* memperoleh skor rata-rata 2,53 atau lebih dekat ke skor 3, yang diartikan bahwa kualitas terjemahan ini sudah mendekati baik. *Google translate* sebagai salah satu mesin penerjemahan tentu masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun google translate dianggap dapat membantu tugas terjemahan para pengguna, namun tetap harus diperbaiki untuk memperbaiki kualitas terjemahan berdasarkan keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan pada bahasa target. Adanya perbaikan dan pembaruan program yang sudah ada dalam mesin penterjemahan akan lebih meningkatkan lagi keakuratan, dan keberterimaan hasil terjemahan serta dapat menghasilkan keterbacaan yang tinggi. Dengan adanya hal ini akan memberikan peluang bagi para penerjemah untuk ikut serta dalam membuat inovasi di bidang penerjemahan untuk menjawab tuntutan revolusi industri 4.0.

Daftar Pustaka

Baker, M. 1992. *In Other Words: A Coursebook on Translation.* London: Sage Publication.

Bell, RogerT . 1991. *Translation and Translating"*London:Longman

Catford, J.C. 1965. *A Linguistic Theory of Translation.* London: Longman.

……1974.*ALinguistic TheoryofTranslation*.NewYork: Oxford University Press.

Machali, Rochayah.2000. *Pedoman Bagi Penerjemah.* Jakarta: Grasindo.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru.* (Terjemahan oleh Tjetjep Rohandi Rohidi). Jakarta: UI-Press.

Nababan, M. 2003. "*Arah Penelitian Penerjemahan*", Makalah disajikan dalam kongres Nasional Penerjemahan, di Tawangmangu, 15-16 September 2003

Nababan, M.r., Nuraeni, A & Sumardiono. 2012, *Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Newmark,P.1979.*ALayman'sviewofMedicalTranslation.*BritishMedical Journal

_____. 1988. *A Textbook of Translation.* New York: Prentice-Hall International.

_____1991. *About Translation*.Clevedon. Mltilingual Matters,Ltd.

Nida, E. 1964. *Towards a Science of Translating.* Leiden: Brill

_____. 1975. *Language Structure and Translation.* Standford, California: Standford University Press.

Nida, E. & Taber, C. 1969. *The Theory and Practice of Translating.* Leiden: E.J.Brill.

_____.1974.*TheTheoryandPracticeofTranslation*Den Haag.Brill.

Richard,Jack,JohnPlattandHeidiWeber.1990.*LongmanDictioneryofAppliedLinguistics.* Essex. Longman GroupLtd

Sutopo, H.B. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret

PENETAPAN HARGA DALAM PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pemerintahan Binjai)

Diko Ammar, SH. M. Kn[1]

Abstrak

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya manusia, di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan berternak, membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran, apartemen, gedung pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada penetapan harga tanah dalam pelaksanaan ganti rugi terkait dengan kepentingan umum.

Pada proses penetapan lokasi, diawali dengan permohonan yang telah diterima oleh walikota, dengan mempertimbangkan lokasi yang dimohonkan oleh instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah, walikota mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang telah ditetapkan, Lokasi pembangunan kantor Unit Pelayanan Tekhnis Daerah Balai Benih Ikan sudah ditetapkan pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 1 Tahun sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, pelaksanaan ganti rugi, tanah, kepentingan umum*

A. Latar Belakang

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya, di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan beternak, diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan tanah, dalam usaha untuk melaksanakan pembangunan, Pemerintah mengadakan atau menyediakan tanah berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan kebijakan melalui pencabutan, pengadaan tanah dan pelepasan hak atas tanah yang dikehendaki oleh rakyat secara pribadi maupun golongan.

Kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian ditunaskan secara kokoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang selanjutnya merambat keberbagai Peraturan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan Peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa :

"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".

Pada Pasal tersebut diatas mengandung pengertian bahwa bumi, air dan kekayaan alam Indonesia setiap perolehan dan penguasaannya tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain. Karena bumi atau tanah,

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

air dan kekayaan alam adalah milik bersama seluruh bangsa Indonesia dan bersifat abadi yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat.

Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Ini berarti Negara mempunyai hubungan hukum dengan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga atas dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara mempunyai wewenang untuk mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan dan penggunaan tanah, serta pemeliharaan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Binjai pada Tahun 2005, maka upaya Penetapan harga dalam pelaksanaan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik Lahan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dengan ganti rugi terhadap tanah yang di ambil oleh Pemerintah Kota Binjai dari masyarakat untuk kepentingan umum, apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk mengkaji mengenai ganti rugi terhadap tanah yang di ambil oleh Pemerintah Kota Binjai dari masyarakat untuk kepentingan umum, apakah sudah sesuai dengan prosedur.

D. Pembahasan

Proses Penetapan harga dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah

Dalam hal penetapan harga tidak terlepas dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan prosedur pengadaan tanah sebagaimana yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Binjai pada tahun 2005 yang mengacu pada peraturan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994 yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan/Penetapan Lokasi Pembangunan.
2. Tata Kerja Panitia Pengadaan Tanah.
3. Pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
4. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah.
5. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi.
6. Pelepasan, Penyerahan dan Permohonan hak atas tanah.
7. Pengurusan hak atas tanah
8. Pelaksanaan pembangunan fisik.

Pembebasan hak atas tanah wajib disertai dengan pemberian ganti kerugian dan harus berpedoman pada Peraturan yang berlaku serta dalam penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian harus diusahakan dengan asas musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan mempertimbangkan/memperhatikan harga dasar setempat yang ditetapkan secara berkala oleh Panitia.

1. Perencanaan/Penetapan Lokasi Pembangunan.

Pada tahapan perencanaan pada pengadaan tanah dimulai dari penyusunan proposal yang disiapkan oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. dalam hal ini ialah dinas peternakan dan perikanan kota Binjai pada Tahun 2005 yang sekarang sudah digabungkan menjadi satu dibawah dinas Pertanian. Tahapan perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 1994 sebagai berikut :

> " Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikotamadya melalui kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat."

Menurut Iswan, " Permohonan yang dibuat oleh dinas peternakan dan perikanan pada pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Binjai pada Tahun 2005 dibuat dengan mengajukan proposal yang langsung ditujukan kepada walikota Binjai melalui kepala Kantor pertanahan Kota Binjai. Diterima atau tidaknya permohonan dari instansi yang memerlukan tanah merupakan hak dari pada walikota selaku kepala daerah."

Proposal tersebut berisikan tentang lokasi tanah yang diperlukan, Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan, penggunaan tanah, dan uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1994.

Didalam pasal 4 dari Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 1993 disebutkan bahwa :

> " Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan dan berdasarkan pada rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu."

Pada proses penetapan lokasi, diawali dengan permohonan yang telah diterima oleh walikota, dengan mempertimbangkan lokasi yang dimohonkan oleh instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah, walikota mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang telah ditetapkan, Lokasi pembangunan kantor Unit Pelayanan Tekhnis Daerah Balai Benih Ikan sudah ditetapkan pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 1 Tahun sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.

Lokasi pembangunan Balai Benih Ikan ialah kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Alasan Pemerintah kota Binjai menetapkan lokasi tersebut masuk pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) khusus pembuatan Balai Benih ikan ialah karena daerah tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dan juga mempertimbangkan letak lokasi masih dekat dengan aliran sungai, sehingga tidak menyulitkan dinas Peternakan dan Pertanian untuk membudi dayakan ikan, terlebih lokasi tersebut jarang dilalui oleh masyarakat, sehingga dengan adanya Kantor Unit Pelayanan Tekhnis Daerah Balai Benih Ikan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Binjai, daerah tersebut menjadi ramai. Buktinya sekarang daerah tersebut sudah banyak dibangun pemukiman warga, sehingga menjadi ramai.

Menurut Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat Keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/walikota atau Gubernur, maka bagi siapa saja yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Pada pasal 7 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1994, menyebutkan :

1. Setelah menerima permohonan Bupati/Walikota Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengadakan koordinasi dengan ketua Bappeda Tingkat II, Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Ketataprajaan dan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah dan dimohon dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada".
2. Apabila rencana penggunaan tanahnya sudah sesuai dengan dan berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah, Bupati/Walikota atau Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, uang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahn Propinsi ataupun daerah.

Sedangkan menurut pasal (8) dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007, berdasarkan rekomendasi walikota menerbitkan Keputusan penetapan lokasi. Selanjutnya setelah diterimanya Keputusan penetapan lokasi, instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

2. Tata Kerja Panitia Pengadaan tanah.

Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada pembangunan Unit Pelayanan Teknis daerah balai benih ikan dinas Peternakan dan Pertanian dibentuk oleh oleh Walikota Binjai, sebagaimana disebutkan dalam surat Keputusan Walikota Binjai, nomor : 593-2037/K/2005 tertanggal 08 September 2005.

Tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan kepentingan umum pada Tahun 2005 tersebut terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota : Walikota Binjai
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai.
3. Anggota : Kepala Kantor Pelayanan PBB Binjai.
4. Anggota : Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai
5. Anggota : Kepala Kantor Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kota Binjai.
6. Anggota : Camat Binjai Utara.
7. Anggota : Lurah Kebun Lada.
8. Sekretaris I Bukan Anggota : Asisten I Tata Praja Setda Kota Binjai.
9. Sekretaris II Bukan Anggota : Kepala Seksi HHT pada kantor Pertanahan Kota Binjai.

Tugas dari pada Panitia Pengadaan tanah tersebut mengacu kepada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Walikota Binjai tersebut diatas antara lain bertugas :

a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
b. Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanh yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media eloktronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatasnya.\;
g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Salah satu tugas dari panita pengadaan tanah adalah melakukan suatu penelitian dan menginventarisasi atas tanah beserta apa saja yang terdapat didalam diatas tanah tersebut. Penelitian yang dilakukan panitia pengadaan tanah terhadap obyek tanah antara lain dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilik lahan yang telah ditetapkan lokasinya untuk pembangunan, penelitian dilakukan guna mendapatkan informasi tentang status hukum atas tanah, serta mendapatkan data tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah dengan meninjau langsung ke lokasi tanah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah selesai dilakukan inventarisasi, Panitia menaksir harga tanah dan mengusulkan kepada Pemerintah daerah, dan melakukan penjelasan serta penyuluhan dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat pemilik lahan tentang rencana dan tujuan Pemerintah daerah melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Selanjutnya diadakan musyawarah antara pemerintah kota Binjai, masyarakat pemilik lahan dan panitia pengadaan tanah. Musyawarah dilakukan panitia pengadaan tanah untuk mendapatkan bentuk dan besarnya ganti kerugian antara masyarakat pemilik lahan dengan Pemerintah Kota Binjai. Penyerahan ganti kerugian yang telah disepakati berupa uang sejumlah Rp. 22.480.- (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) untuk setiap meter perseginya yang disaksikan oleh Panitia pengadaan tanah. Berita acara penyerahan di ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Panitia pengadaan tanah tanpa terkecuali. Selanjutnya berkas tentang pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Binjai disimpan oleh panitia pengadaan tanah di bagian Tata Pemerintahan, hal tersebut dikarenakan bagian asset daerah belum terbentuk

dan dinas yang terkait seperti dinas peternakan dan perikanan sudah digabungkan ke dinas pertanian, sehingga berkas pengadaan tanah disimpan pada bagian Tata Pemerintahan.

Dalam pasal 10 dari Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, disebutkan :

> " Panitia bersama-sama instansi Pemerintah yang memerlukan tanah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan mengenai maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan."

Pengadaan tanah yang terjadi pada Tahun 2005 untuk pembangunan Balai Benih Ikan dinas peternakan dan perikanan kota Binjai. Menurut Mulyono pada waktu itu, Penyuluhan dilakukan langsung oleh panitia kepada pemilik lahan, lokasi penyuluhan langsung ditujukan pada rumah pemilik lahan, hal tersebut dikarenakan pemilik lahan hanya 1 orang.

Dalam hal penyuluhan diterima oleh masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah, jika tidak diterima, panitia melakukan penyuluhan kembali dengan acuan :

1. Tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedang lokasinya dapat dipindahkan, diajukan alternatif lokasi lain.
2. Tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedang lokasinya tidak dapat dipindahkan kelokasi lain, maka Panitia Pengadaan tanah mengusulkan pada walikota untuk melakukan pencabutan hak atas tanah sesuai ketentuan Undang-undang nomor 20 Tahun 1961.

Setelah dilakukan penetapan lokasi, dilakukan pemasangan tanda batas lokasi oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dibantu oleh Badan Pertanahan daerah Kota Binjai dan bersama-sama dengan panitia tanah yang lainnya, selanjutnya dilakukan kegiatan identifikasi dan Inventarisasi tanah yang meliputi :

a. Pengukuran rincikan bidang tanah.

Sebidang tanah yang akan diukur ditetapkan lebih dahulu letak, batas-batas dan penempatan tanda batas. Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, dengan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan ketentuan persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh yang memberikan persetujuan.

Pada tahapan ini dilakukan oleh Petugas dari Badan Pertanahan daerah kota Binjai dengan menetapkan secara tegas batas-batas dan ukuran-ukuran dari tanah. selanjutnya ditetapkan tanda-tanda dari setiap sisi tanah yang akan menentukan tanda-tanda dari batas. dikarenakan tanah yang dipergunakan untuk balai benih ikan dinas peternakan dan perikanan berada di pinggiran sungai, batas tanah ditarik 20 meter dari pinggiran sungai, sehingga tidak terkena dari daerah aliran sungai (DAS).

b. Inventasrisasi dan Identifikasi data.

Inventasrisasi dan Identifikasi data yang dilakukan pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kejelasan dari data fisik dan data yuridis pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah. Apakah terdapat silang sengketa atau tidak.

Untuk mendapatkan informasi yang berhak diketahui oleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terbuka bagi instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

c. Inventarisasi tanaman

Inventarisasi tanaman dilakukan oleh Dinas Pertanian bentukan dari Panitia pengadaan tanah, yang bertugas menginventarisasi tanaman-tanaman apa saja yang ada di atas tanah tersebut. Sehingga membantu panitia untuk menetapkan harga dari tanah yang dibebaskan.

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga penilai harga tanah. Apabila saat dilakukan pengadaan tanah di kabupaten/Kota atau disekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah yang sudah mendapat Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional, maka penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.

Pasal 1 huruf 12 Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 ditentukan bahwa lembaga/tim penilai harga tanah adalah lembaga/tim yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi, kemudian pasal 15 ayat (2) diatur bahwa lembaga/tim penilai tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur bagi provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dan pasal 25 ayat 2 Peratruan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ditentukan lembaga/tim penilai harga tanah harus mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 diatur bahwa Panitia Pengadaan tanah menunjuk lembaga penilai harga untuk menginventarisasi dan menilai harga tanah. Penunjukan peniai harga tanah oleh panitia pengadaan tanah yang anggotanya terdiri dari :

a. Unsur Instansi pemerintah yang membidangi bangunan yang meliputi Penginfentarisasian, pemilik, jenis, luas konstruksi dan kondisi bangunan yang melakukan pengukuran dan pendataan.
b. Unsur Instansi pemerintah yang membidangi pertanian dan perkebunan yang meliputi penginfentarisasian pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman yang melakukan pendataan.
c. Unsur Instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap benda-benda yang akan didata temasuk untuk mengetahui pemilik, jenis, ukuran dan kondisi benda-benda yang akan didata, yang terdapat diatas tanah tersebut.

Pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk pembangunan Unit Pelayanan Tekhnis Daerah Balai Benih Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Binjai Pada Tahun 2005 melalui Walikota Binjai, mengangkat dan memutuskan Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 593-2037/K/2005, tertanggal 08 September 2005.

Pada Surat Keputusan tersebut, disebutkan pada kata-kata memutuskan/ menetapkan bagian kedua huruf c, tugas dari Panitia pengadaan tanah ialah untuk menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 dari Peraturan Presiden

Nomor 36 Tahun 2005, artinya pada pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai sudah mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005.

Setelah dikeluarkannya pengumuman hasil inventarisasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 dari Peraturan menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 1994, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap obyek tanah yakni berupa tanah seluas 4.474,75 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi) yang dipergunakan Pemerintah kota Binjai untuk pembangunan unit pelayanan tekhnis daerah (UPTD) balai benih ikan yang dilakukan oleh tim penilai harga tanah yang telah dibentuk oleh walikota Binjai.

Dalam pasal 16 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 penilaian harga tanah dilakukan dengan memperhatikan :

b. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek bumi dan bangunan (NJOP) Tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :
    1. Lokasi tanah.
    2. jenis hak atas tanah.
    3. status penguasaan tanah.
    4. peruntukan tanah.
    5. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah.
    6. Prasarana yang tersedia.
    7. fasilitas dan untulitas.
    8. Lingkungan.
    9. lain-lain yang mempengaruhi harga tanah.

Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah dijelaskan pada pasal 17 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 pada angka 1 adalah sebagai berikut :

Hak milik ;

a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 %.
b. Yang belum bersertifikat dinilai 95 %.

Berkaitan dengan obyek pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah kota Binjai pada Tahun 2005 ialah tanah yang belum bersertifikat, sehingga penilaian terhadap tanah tersebut dihitung sebesar 95 % untuk tanah seluas 4.475,75 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima meter persegi) kepunyaan pemilik tanah langsung yakni tuan Mulyono dinilai dengan harga Rp. 22.480,- (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) permeter perseginya atau sebesar Rp. 100.592.380,- (seratus juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk total keseluruhan luas tanah, yang sebelumnya diadakan musyawarah untuk mufakat antara pemerintah Kota Binjai dengan pemilik lahan beserta Panitia Pengadaan Tanah.

Penetapan harga ganti rugi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Binjai, Nomor : 593-2129/K/2005, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Gedung Balai Benih Ikan dan Kolam Pembibitan Ikan Pemerintah Kota Binjai di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, tertanggal 16 September 2005.

Nilai taksiran taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan yang dibentuk oleh walikota Binjai pada Tahun 2005 juga mempunyai tugas sebagai penilai dengan melakukan penaksiran dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, sebagaimana jelas tertera pada bagian kedua huruf c dari Keputusan walikota Binjai Nomor 593-2037/K/2005 tertanggal 08 September 2005.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, ganti Rugi adalah penggantian kerugian baik besifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Untuk melaksanakan ganti rugi maka diadakan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Sebelum melakukan ganti rugi kepada pemegang hak ada hal yang harus diperhatikan yaitu nilai tanah.

Wawancara peneliti dengan Martal, mantan anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan pada Tahun 2005 yang sekarang menjabat sekretaris pada Dinas Koperasi, beliau mengatakan " Penilaian yang dilakukan panitia pengadaan tanah terhadap obyek tanah didasarkan pada nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang mempengaruhi harga tanah pada saat itu, sehingga ganti rugi diupayakan dalam bentuk yang tidak menyebabkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat pemilik lahan dengan mempertimbangkan kemungkinan dilaksanakannya alih pemukiman ke lokasi yang sesuai, dalam hal ini kebetulan masyarakat pemilik lahan memiliki aset tanah yang lain, sehingga Pemerintah tidak bersusah payah untuk mencarikan lokasi pemukiman yang baru, uang ganti kerugian digunakan pemilik lahan untuk membenahi pemukimannya yang sudah ada yang sekarang ditempati sebagai rumah tempat tinggal.

Ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya, menjadi miskin daripada keadaan semula.

Penilaian obyek tanah tidak terlepas dari perhitungan ganti kerugian, menurut pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan bahwa perhitungan ganti kerugian didasari oleh :

a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak Tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang bangunan.
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian

Merupakan suatu langkah maju dan dapat diterima sebagai sesuatu yang adil, apabila untuk pengenaan pajak dan langkah awal penentuan besarnya ganti kerugian digunakan standar yang sama, yakni NJOP Bumi dan bangunan Tahun berjalan yang akurasi penetapannya merupakan faktor yang sangat menentukan,

disamping untuk tanah, bangunan dan tanaman, dasar perhitungan ganti kerugiannya adalah nilai jual bangunan dan tanaman yang ditaksir oleh instansi yang berwenang dibidang tersebut.

Wawancara peneliti dengan Ibu Elvi Kristina, mantan anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan pada Tahun 2005 yang sekarang menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Binjai, menurut beliau " pengadaan tanah pada Tahun 2005 bila dibandingkan antara perhitungan ganti kerugian antara tanah, bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah, maka perhitungan tanah yang lebih merumitkan, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi harga tanah, disamping Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan bangunan Tahun berjalan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 sebagai Peraturan pelaksana dari Kepres Nomor 55 Tahun 1993 adalah seperti :

1. Lokasi tanah (strategis/kurang strategis)
2. Jenis hak atas tanah
3. Status penguasaan tanah (pemegang hak yang sah atau penggarap)
4. Status hak atas tanah (hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lain).
5. Kelengkapan sarana, prasarana
6. Keadaan penggunaan tanah (terpelihara atau tidak)
7. Kerugian sebagai akibatnya dipecahnya hak atas tanah seseorang
8. Biaya pindah tempat pekerjaan
9. Kerugian terhadap turunnya penghasilan si pemegang hak

Sehingga Panitia pengadaan tanah menetapkan secara obyektif dengan standar yang telah ditentukan dan dengan dicapainya musyawarah antara pemegang hak dengan panitia pengadaan tanah, untuk harga ganti rugi sebesar Rp 22.480 .- (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk setiap meter bujur sangkar

Dalam ganti rugi bangunan dibedakan antara bangunan permanen, yang masih baik, sedang dan kurang, bangunan semi permanent, yang baik, sedang dan kurang dan bangunan darurat, kemudian juga menjadi perhitungan, legalitas bangunan, kelengkapan bangunan, penyusutan dan izin usaha. Atas tanaman diperhitungkan tanaman lunak dan keras.

E. Kesimpulan

Ganti rugi yang dilaksanakan Pemerintah kota Binjai pada pembangunan balai benih ikan untuk kepentingan umum ialah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 yakni berdasarkan pada pasal 12 dari Peraturan Presiden nomo 36 Tahun 2005 yakni bentuk dari ganti kerugian berupa uang atau tanah pengganti dan pemukiman kembali, sedangkan ganti rugi yang dilakukan Pemerintah kota Binjai ialah dalam bentuk uang, sebagaimana yang telah di putuskan oleh Walikota Binjai dengan surat Keputusan Walikota Binjai nomor 593-2129/K/2005 tertanggal 16 September 2005 tentang Penetapan harga ganti rugi tanah untuk keperluan pembangunan gedung balai benih ikan dan kolam pembibitan Ikan Pemerintah Kota Binjai di Kelurahan Kebun lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan dilaksanakan dengan ganti rugi antara Pemerintah Kota Binjai dengan masyarakat pemilik lahan yang dituangkan dalam

Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan menerima ganti rugi yang di tanda tangani oleh pemilik lahan dengan Pemerintah kota Binjai serta Ketua dan wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan disaksikan oleh para anggota panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Tahun 2005.

Referensi:

Daftar Pustaka

Wawancara langsung dengan Edy Gunawan, Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai, pada tanggal 02 November 2011, pukul 11.00 WIB.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis*, Pencabutan hak, pembebasan dan pengadaan tanah*, opcit, hal. 68.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan hak, pembebasan dan pengadaan tanah*, opcit, hal. 70.

MHD. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran tanah,* Opcit, hal 142.

MHD. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran tanah,* ibid, hal 140.

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PADA KOPERASI KARYA BERSERI DESA PEMATANG SETRAK SERDANG BEDAGAI

Muhammad Rizaldy Wibowo[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pinjaman pada Koperasi Karya Berseri di Pematang Setrak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan, untuk mengambil suatu kesimpulan sehingga diharapkan segala aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri sudah mengikuti standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri. Namun prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri masih sangat sederhana sehingga masih terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit. Kedepan diharapkan pembagian fungsi dan tugas yang lebih jelas dan tidak ada tugas merangkap sehingga prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri menjadi lebih baik dan mudah dilaksanakan, sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut.

Kata kunci : *Prosedur, Pinjaman.*

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dibentuk untuk mengelola dana yang dihimpun oleh anggota guna membiayai kebutuhan koperasi dan keanggotaanya. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga yang relatif ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam hutang rentenir, dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Namun pada umumnya masyarakat masih kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit.

Koperasi Simpan Pinjam Karya Berseri merupakan salah satu koperasi di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai yang bergerak dalam pemberian pinjaman. Sama halnya dengan koperasi simpan pinjam lain, Koperasi Simpan Pinjam Karya Berseri memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan berkerja sama dengan pihak lain.

Dalam kegiatan pemberian pinjaman, kendala yang biasanya dihadapi adalah belum sesuainya kebijakan koperasi dalam pemberian pinjaman kepada anggota dengan undang-undang yang berlaku dan adanya kekeliruan koperasi dalam memproses pemberian pinjaman kepada anggota koperasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Belum sesuainya kebijakan koperasi simpan pinjam dalam pemberian kredit kepada anggota koperasi.

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan bowoar922@gmail.com*

2. Adanya kekeliruan koperasi simpan pinjam dalam memproses pemberian kredit kepada anggota koperasi.

1.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah "Pemberian pinjaman pada Koperasi Karya Berseri di Desa Pematang Setrak Kec . Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai belum sesuai dengan Prosedur Peminjaman yang telah ditetapkan Koperasi Karya Berseri di Desa Pematang Setrak kec . Teluk Mengkudu kab. Serdang Bedagai".

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut Rudi (2013:84) prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan faslitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

2.1.2 Kredit

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.Menurut Rivai (2013:197) bahwa istilah kredit berasal dari bahas latin, *credo,* yang berarti *I believe, I trust,* saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.

2.1.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:136) sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian tersebut menggunakan beberapa prinsip, yaituprinsip 5C, prinsip 7P, dan prinsip 3R.

2.1.3.1 Prinsip 3R

Prinsip pemberian kredit dengan konsep **3 R** ini meliputi :

1. ***Return*** **(**Hasil yang dicapai)
2. ***Repayment*** (Pembayaran kembali)
3. ***Risk bearing ability*** (Kemampuan untuk menanggung risiko)

2.1.3.2 Prinsip 7P

1. ***Personality***
2. ***Party***
3. ***Purpose***
4. ***Prospect***
5. ***Payment***
6. ***Profitability***
7. ***Protection***

2.2 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:145) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum

antar bank yang satu yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi pembeda mungkin terletak hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Kerangka Berpikir

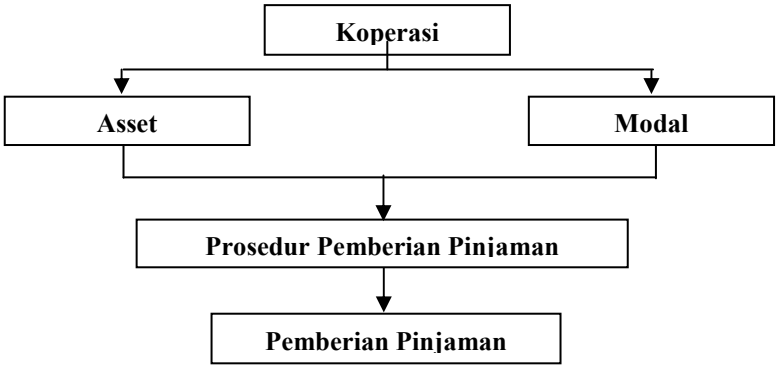

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Prosedur pemberian pinjaman merupakan titik penting dalam mencapai kegiatan perusahaan untuk proses simpan pinjam. Kesalahan dalam melakukan prosedur pemberian pinjman akan mengakibatkan proses simpan pinjam yang lain juga menjadi salah.

3. Metode Penelitian

3.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Karya Berseri Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian yang dipergunakan penulis adalah :

1. Informan kunci, yaitu pemilik koperasi.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, contohnya ketua koperasi, sekretaris dan bendahara.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial, contohmya anggota koperasi.

3.3. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. yaitu suatu metode analisis dimana data yang diperoleh dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

4. Pembahasan

4.1. Prosedur Pemberian Kredit Sistem Umum di Koperasi Karya Berseri

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya Berseri dalam bentuk Kredit Sistem Umum dijabarkan menurut urutan aktifitas. Prosedur pemberian kredit anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan

permohonan pinjaman, dengan memberikan persyaratan kepada bagian administrasi dan jika persyaratan disetujui, menerima formulir permohonan kredit dari bagian administrasi. Prosedur Kredit Sistem Umum digambarkan dalam bentuk Tabel :

Tabel 4.1 Prosedur Pemberian Kredit Sistem Umum Koperasi Karya Berseri

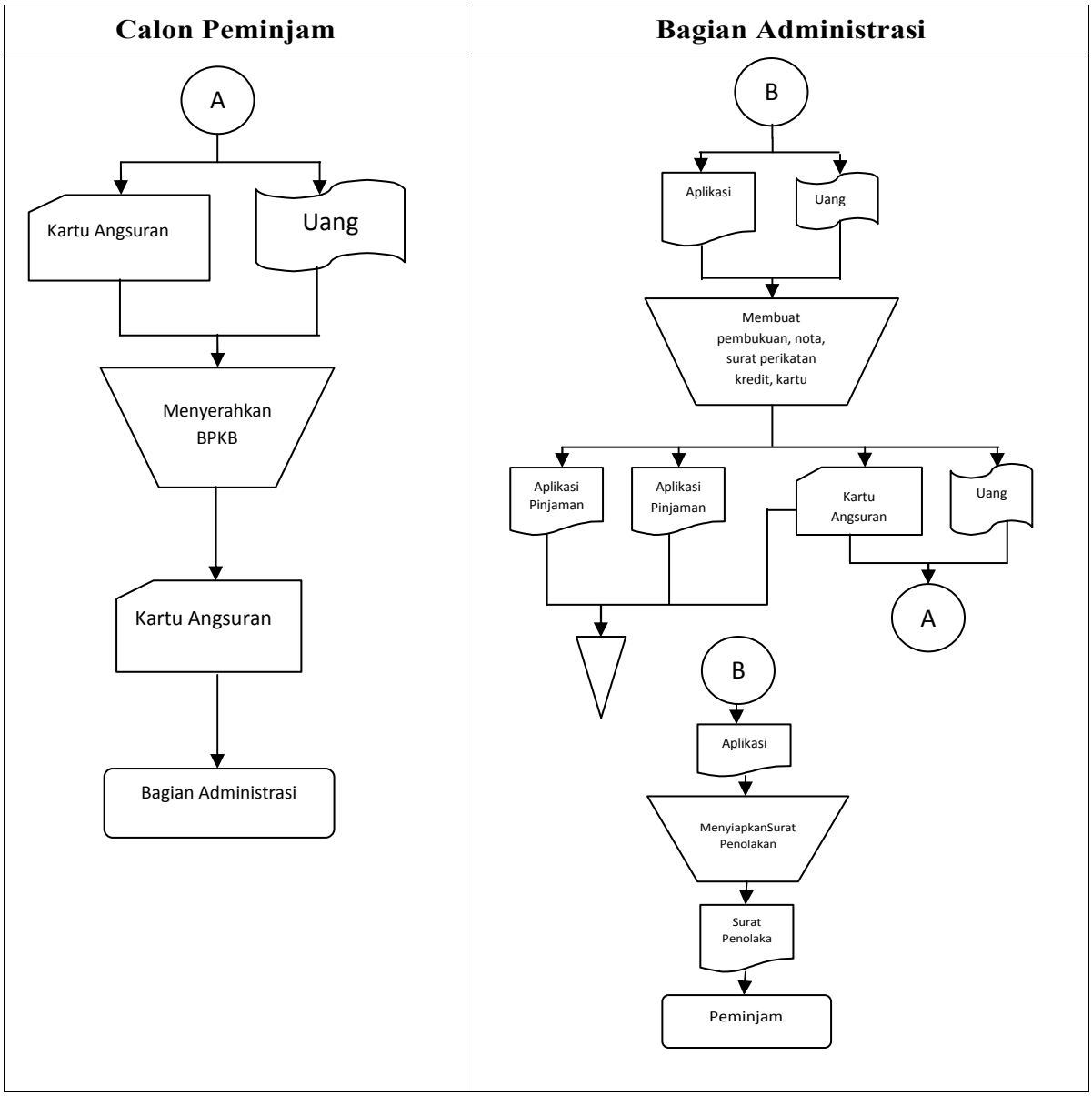

Dalam persyaratan prosedur pemberian kredit system umum, Koperasi Karya Berseri belum memakai surat dasaran usaha sebagai prasyarat seleksi persyaratan permohonan pinjaman. Seharusnya menurut prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri, surat dasaran usaha harus dicantumkan untuk mengetahui kebenaran dan kriteria usaha calon peminjam.

Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri, bagian administrasi melakukan perangkapan fungsi. Dimana dalam prosedur pemberian kreditnya bagian administrasi yang umumnya bertugas untuk melakukan pembukuan data-data peminjam juga menyiapkan surat perikatan kredit, melakukan pencairan pinjaman dan melakukan pembukuan pengeluaran kas. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam prosedur dan kelemahan prosedur di Koperasi Karya Berseri.

5. Kesimpulan

Prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri sudah mengikuti standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri. Namun prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri masih sangat sederhana sehingga terdapat sedikit kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit sehingga prosedur pemberian kredit di Koperasi Karya Berseri menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

Ardiyose, 2013. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Arikunto, 2010. *Anggaran Perusahaan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya.

Hariyani. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi.* Edisi Ke-3. Cetakan Ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Putra. 2012. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada KSP Talenta. Indonesia

Rivai. 2013. *Credit Management Handbook.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rudi. 2013. *Pedoman Penyusunan Standart Operating Prosedur.* Edisi 2013. Penerbit Maiesta

Rosita. 2012. Analisa Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Mandiri Mojokerto. Mojokerto.

Sandi. 2015. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen KreditDi KSP Tri Aji Mandiri Kediri. Kediri.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

SISTEM DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Muslim Harahap, SH. MH[1]

Abstrak

Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara. Oleh karena negara melalui alat pelengkapannya haruslah berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik, ke depan demi terwujudnya tujuan negara. Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, yang secara eksplisit telah menegaskan hak-hak kontitusional anak, sebagaimana yang telah ditetapkan amandemen ke dua Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kriminalisasi anak dalam usia amat muda, disebabkan posisi hukum anak berhadapan dengan hukum belum optimum, dan posisi hukumnya tidak mendukung, misalnya batas usia tanggung jawab pidana anak (the age of of crime responsibility). Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.Anak sebagai aset bangsa sangat berperan penentu nasib suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai mahluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Kata Kunci: Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Sumut

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak *(Convention on the Right of the Child),* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk hak anak yang perlu mendapat perlindungan khusus *(Child in need special protection=Cnsp)* kepada anak dalam situasi berhadapan dengan hukum (ABH), sebagai respon negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus terhadap anak semakin mendapat *justifikasi* dengan hadirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Keadilan Untuk Semua (*justice for all).* Sebagai langkah kongkrit perhatian dan perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu dalam bentuk penghargaan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak anak.

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Anak sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

Pembahasan

1. Penyidik Anak

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. demikian berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri harus dapat mengaktualisasikan

[1] *Dosen Universitas Harahapan Medan Email:muslimharahap09@gmail.com*

dan mengimplementasikan pelaksanaan, pengemban fungsi Kepolisian dengan lebih profesional, lebih dinamis dengan dijamin dan diakui Negara, yakni Negara berkewajiban mewujudkan hak-hak asasi warga Negara, meliputi hak politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak perlindungan hukum.

Kepolisian dalam penerapan tindakan dan penegakan hukum pada saat ini, tentunya tidak cukup kalau hanya bermodalkan pendekatan legalitas formal semata, melainkan harus dilengkapi juga pemahaman terhadap asas *nesesitas,* yaitu asas tentang penerapan penindakan yang memang sangat diperlukan, juga penindakan hukum yang professional agar jangan sampai terjadi tindakan yang eksesif atau berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang kontra produktif. Berdasarkan pemahaman tersebut diharapkan agar setiap anggota Polri mampu menerapkan tindakan yang dapat diterima, dimaklumi, dipahami oleh warga masyarakat (*legitimate),* yaitu dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh angota Polri dilapangan dapat diterima dan diakui kebenaranya oleh masyarakat pada umumnya dan dianggap sebagai tindakan yang paling rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.

Ketentuan hukum acara pengadilan anak atau Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat *lex spesialis, d*emikian juga penyidikan terhadap ABH dilakukan oleh penyidik anak. Tugas utama penyidik anak adalah melakukan penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum, khususnya anak berkonflik hukum. Syarat-Syarat penyidikan untuk anak pelaku pidana yaitu:

UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 26, menyatakan:

(1). Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2). Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. telah berpengalaman sebagai penyidik;

b. mempunyai minat dan perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

(4). Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 27, menyatakan:

(1) Dalam melakukan penyidikan terahadap perkara anak, penyidik wajib wajib meminta pertimbangan atas usaran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kerja sosial dan tenaga ahli lainnya.

(3) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

(5) Dalam hal ruang pelayanan khusus belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.

Pengaturan prihal penyidikan pada pokoknya termaktub Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 30 s/d 33 dan mengatur penangkapan dan penahanan yaitu:

UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 30, menyatakan:

(1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
(4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
(5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 31, menyatakan:

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat jam). Sejak dimulai penyidikan.

2. Tujuan *Diversi* dan *Restorative Justic*

Diversi dan *restorative justice,* sebagai upaya perlindungan terhadap ABH pelaku tindak pidana, keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain, dalam upaya mencari solusi terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan tidak berdasarkan hukum pembelasan.

Diversi secara umum adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat. Sedangkan diskresi adalah kewenangan yang dimilki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau melakukan pengadlihan dengan tujuan agar terhindar dari proses hukum lebih lanjut.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, mengingat cirri dan sifat anak yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memeriksa masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Tabel I
Perbedaan Tujuan Diversi dan Tujuan Restorative Justice

No	Tujuan Diversi	Tujuan Restorative Justice
	a. Proses menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; b. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; d. Menanamkan tanggung jawab kepada anak; e. Mencegah stigmatisasi yang berimplikasi pada tumbuh kembang anak. f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.	a. Menyelesaikan kasus anak secara adil dengan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat; b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait dalam kasus berpartisipasi delam penyelesaian perkara;

Sumber : Jaringan Nasional ABH (Jarnas ABH/RJWG Pusaka Indonesia, Komnas Perlindungan anak, Laha Bandung, SCCC Surabaya, 2010.

3. Syarat Diversi dan Restorative Justice

Konsep *restorative justice* di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation,* program ini dilaksanakan di negara Canada pada tahun 1970, yang pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternative dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku pidana.

Pelaku dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukum bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberi rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

Susan Shape sorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998, memberikan penjelasan kembali terhadap defenisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshal, Susan Sharpe mengusulkan ada (5) lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus, dalam hal ini korban, pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif, selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selam ini marasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk duduk bersama memecah persoalan ini;
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;

3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana, hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta mereintegrasikan keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalulnya demi masa depan yang cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan mendalam, akan tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berarkar dari persoalan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku, oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini kriminalisasi terhadap ABH, maka upaya diversi dan keadilan restorative merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan untuk mengefektifkan restorative justice dalam rangka pemenuhan hak-hak anak ABH, perlu disosialisasikan dan koordinasi dari berbagai pihak terkait, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi maka penerapan *restorative justice* sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah ABH. Penerapan diversi dan non-pemenjaraan sejalan denagan keadilan anak sebagaimana tertuang dalam instrumen Internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi ABH.

Diversi dan *restorative justice* dalam penanganan ABH di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melalui Kepala Unit I Perlindungan Anak dan Perempuan. Penanganan ABH secara Diversi dan *Restorative justce* sangat penting dilakukan untuk dapat mengintegrasikan anak yang terlibat tindak pidana atau case hukum ke lingkungan sosial, syarat keadilan restorative dalam proses hukum dengan; diancam pidana paling lama dahulu 5 tahun dan sekarang Sistem Peradilan Pidana Anak ancaman 7 (tujuh) tahun, sesuai TR. Kabareskrim 1124 dan mengacu ke SKB tentang Anak Berhadapan dengan Hukum dan buku panduan dari Unicef, berupa pelaku mengakui kesalahannya, kesediaan pelaku dan keluarga untuk melaksanakan diversi, bukan merupakan pengulangan tindak pidana/ residivis, persetujuan korban, kesediaan korban dan atau keluarga untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus. Melakukan dieveri dan restorative justice sebanartnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara sangat terbuka peluang, mengingat kultur budaya dan kearifan masyarakat lokal yang masih melekat dalam ciri khas hukum adat, contoh hukum adat di batak (batak toba ada hula-hula sebagai penengah pertikaian dalam sistem kekrabatan adat batak toba, sedangkan di suku adat

Mandailing dikenal tiga serangkai, yakni anak boru, mora dan kahanggi yang sampai saat ini masih menjungjung tinggi kekerabatan di wilayah Kabupaten Mandailing.

4. Kewenangan Kepolisian Diversi dan Restorative Justice Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kepolisian Derah Sumatera Utara

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku penyelidik dan penyidik, telah diatur dan diurai secara rinci dalam bentuk Juklak dan Juknis yang telah menjadi pedoman setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Polri dan Program Strategi Polri, bertujuan untuk menuju Polri yang dicintai masyarakat dengan meningkatkan penanganan kasus-kasus menonjol, yang mencakup;

1. *Truss building* (membangun kesejahteraan masyarakat).
2. *Patnershif building* (membangun kemitraan dengan masyarakat).
3. *Strive execelent* (meningkatkan pelayanan prima).

Fungsi perlindungan bagi ABH sebagai pelaku dalam melakukan tindakan penangkapan dianut dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan TR. Kabareskrim Polri No. 1124, terahadap Keputusan Bersama tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, mekanisme penanganan dan perlakuan terhadap ABH sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berkut:

a. Penyidik melakukan upaya penanganan perkara ABH dengan pendekatan keadilan restorative untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
b. Balai pemasyakatan wajib membuat laporan penelitian pemasyarakatan;
c. Dalam hal anak ditahan, maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Khusus Anak;
d. Proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
e. Dalam hal Jaksa Penunut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
f. Setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restorative;
g. Apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai pemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;
h. Pembimbingan, pembinaan dan perawatan di Bapas, rutan dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan

i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial.

Sistem penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak sebagai Pelaku tindak pidana, Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Ka. Subdit IV Direktorat Reskrimum Polda Sumut dengan :

1. Anak berhadapan dengan hukum pelaku (*children in conflict with the law),* dimaknai seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belasa) tahun, dan penggolongan anak usia antara 12 tahun, anak dikenakan sanksi tindakan dan 14-18 tahun, anak yang berkonflik hukum dengan sistem peradilan pidana anak, dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, dapat dilihat orangtua/mewakili orang tua, dan pengacara/pendamping lain) datang ke Polda Sumut melihat anak sebagai pelaku pidana yang tertangkap tangan.
2. Penyidik melakukan koordinasi dengan petugas piket dan melakukan registrasi. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi tindak pidana terhadap anak. Sedangkan pengaduan adalah permberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap adanya tindak pidana terhadap anak.
3. Penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada pelapor/keterangan anak, dan saksi-saksi.
4. Penyidik mengkoordinasikan kepada pimpinan untuk menerbitkan surat penyitaan alat-alat bukti.
5. Penyidik melakukan koordinasi kepada instansi atau lembaga terkait, sesuai dengan kebutuhan kasus, baik bantuan hukum, layanan psikososial dan bimbingan agama, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan rehabilitasi.

Kewengan penyidik dalam melakukan penangkapan berkonflik hukum sebagai pelaku pidana diatur dalam Pasal 30, 31,32 dan 33, tindakan penyidik dalam Dalam sistem peradilan pidana anak, seorang anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak bagi anak yang ditangkap sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 berbunyi: ”Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisah dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawai serta merendahkan drajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidp;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperolah keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

j. Memperoleh pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksessibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan;
n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indenesia dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, meliputi:

a. Menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan sertifikasi di bidang anak di mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
b. Meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
c. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
e. Menyusun pedoman/panduan standar tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan yang restoratif;
f. Membentuk Kelompok Kerja Penanganan anak berhadapan dengan hukum,
g. Melaksanakan sosialisasi internal, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instasi terkait.

Institusi Polri sebagai gerbang awal Penanganan perkara anak berhadapan, sebagai pelaku pidana, belum banyak melakukan tindakan menjauhkan anak dari penjara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun memperhatikan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan oleh Polisi, yang pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan.

Skema I di bawah ini menjelaskan perlunya penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pidana, untuk mencarikan jalan ke luar pemecahan masalah anak yang berpihak pada kepentingan tebaik bagi anak, dan institusi Polri dapat berperan melibatkan pemangku kepentingan (*stkeholders*), terkait tugas bersama secara *restorative justice* dengan memontum menjauhkan anak dari penjara.

5. Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penerapan Diversi dan Restorative Justice Anak

Seluruh negara telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak, dalam suatu sistem peradilan pidana anak adalah awal dari proses tersebut. Polisi mempunyai otoritas legal yang disebut diskresi (*discretionary power)*, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Dibeberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal polisi dapat menetukan bentuk pengalihan (*divertion*) terhadap suatu perkara anak.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara di dalam penanganan dan pelayanan anak berhadapan dengan hukum (ABH), berdasarkan PE. Kapolri No. Pol. Kep./22/2010/Tgl 28 September 2010 berada di satuan Direktur Umum Polda Sumatera Utara di Bagian Ka.Subdit Unit IV Renakta Direktorat Reskrim Umum Polda Sumatera

Utara, sebelum Remaja Anak dan Wanita (Renakta), Pelayanan Anak dan Perlindungan Perempuan Polda Sumatera Utara berada di bawah Reskrim Polda Sumatera Utara, disebut Unit PPA Polda Sumatera, dan sebelum PPA tahun 2000 dalam layanan pengaduan terhadap anak dan perempuan berada di bawah unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) atau dalam isitilah lain disebut (*Police Women Desk)*. RPK ini dirancang sebagai jawaban atas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang banyak terjadi di masyarakat, dengan pelayanan yang lebih sensitif terhadap ABH.

Untuk melaksanakan tugasnya dan fungsinya malakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tidak pidana yang dilakukan oleh seorang anak atau anak berhadapan dengan hukum (ABH), menempatkan prioritas penyidik Polisi wanita yang memiliki minat dan perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Tujuannya agar penyidikan dalam suasana kekeluargaan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di Kasubdit IV Dir Reskrimum Polda Sumatera Utara, terhadap penanganan kasus-kasus kategori ringan, seperti pencurian, perkelahian dan tindakan pengrusakan barang mengambil tindakan diversi dengan memberikan sanksi wajib lapor atau pernyataan tertulis dari pelaku. sedangkan kasus tindak pidana berat seperti perkelahian yang menyebabkan luka berat seseorang, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melakukan penangkapan dan segera memberitahukan orang tua atau wali atau orang yang terdekat dengan anak tentang penangkapannya. Pemberitahuan bertujuan melindungi anak, selanjutnya mengambil tindakan melanjutkan ke proses selanjutnya.

Anak-anak sebagai pelaku pidana dalam melakukan kejahatan termasuk klasifikasi kejahatan konvensional, yaitu jenis kejahatan yang terjadi dimana pun tanpa mengenal waktu dan tempat, kejahatan ini diatur di dalam KUHP yang tidak berdampak besar, baik bagi korban mapun kerugian yang diderita. Namum kejahatan ini sangat merugikan bagi masyarakat luas, karena sehari-hari kajahatan ini dialami secara langsung. Kejahatan konvensional anak berhadapan dengan hukum, misalanya pencurian, perampokan/perampasan, pembunuhan, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pencabulan/pemerkosaan, dan yang saat ini ABH tergabung dalam geng motor, dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama dan tidak mengenal tempat dimana sasaran aksi kejahatan, seperti pembakaran pos Polisi, pembunuhan siswa/mahasiswa, aksi penyanderaan karyawan pom bensin,dan sebagainya.

Karekteristik pelaksanaan diversi dan *restorative justice* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan :

1. Membuat pelanggar bertangungjawab memperbaiki kerugian yang timbul.
2. Memberikan kesempatan pelanggar membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Penyelesaian kasus melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan kelaurga korban, sekolah dan teman sebaya.
4. Penyelesaian ditujukan untuk menciptakan forum kerjasama.
5. Menempatkan hubungan langsung dan nyata kesalahan dengan reaksi sosial.

Karekteristik *restorative justice* tersebut di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi dapat terlaksananya *restorative justice yaitu;*

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Harus ada persetujuan pihak korban untuk menyelesaikan di luar sistem peradilan.
3. Persetujuan kepolisian sebagai intitusi yang memiliki hak diskresioner.
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyesaian termasuk mintra kerja terkait yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat seperti, Yayasan Pusaka Indonesi, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID SUMUT), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

ABH dalam proses di Kepolisian Polres Kota dan Polres Kabupaten diberikan pemahaman terhadap penyidik untuk tetap mengkoordinasikan hal-hal yang terkait penanganan ABH agar tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran hak anak ketika dalam proses, untuk itu Polda berkoordinasai kepada Polres agar memberikan laporan proses penangaan ABH dan tindak lanjutnya apalagi kasus tersebut sempat di publikasikan melalui media massa, tentunya ini merupakan konsumsi publik yang mungkin masyarakat mengharapkan solusi yang terbaik dalam penanganan ABH sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *restorative justice* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku), Tujuan *restorative justice* yang hendak dicapai melalui proses musyawarah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak pelaku pidana tersebu.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh struktur organisasi Polda Sumatera Utara di Reskrim Polda Sumut yang terdiri dari Direktorat Reskrim Pidana Khusus (penanganan korupsi, money loundering, teroris dsb), dan Direktorat Reskrim Pidana Umum di gedung *Peole Smuggling* Reskrimum Polda Sumatera Utara (penyeludupan manusia).

Kesimpulan:

Sistem diversi dan *restorative justice* terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH),sebagai pelaku pidana di Kepolisian Sumatera Utara ditangani Kepala Sub IV Remaja Anak dan Wanita/Renakta Direktorat Reskrim Pidana Umum, berdasarkan buku saku untuk Polisi tentang Perlindungan Anak yang Berhadapan oleh Unicef, Polri memprioritaskan penanganan dengan sistem mencapai perdamaian antara korban dan pelaku pidana anak, dengan sistem kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif anak dengan menjauhkan anak dari penjara berdasarkan kepatutan, kesusilaan dan memperhatikan kepentingan umum, Penyidik anak dapat melibatkan unsur-unsur masyarakat terkait.

Daftar Pustaka

Ausaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Danuri, Hendarso, Bambang, *Buku Himpunan Peraturan Kapolri di Bidang Operasional*, Jakarta: Polri, Kata Sambutan Kapolri, September, 2010.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung*:* Refika Aditama. 2008.

Hubberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya: Bayumedia. 2008.

Joni, Muhammad, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, Jakarta: Peran Indonesia/Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia. 2012.

Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Buku Pedoman Umum Mekanisme Reveral Kasus Anak*, Jakarta, 2011.

----------*Draft Buku Pedoman Umum Mekanisme Reveral Kasus*, Jakarta Pusat: KPAI, 2011.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

----------*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice System dalam Hukum Pidana,* Medan: USU Press, 2010.

----------*Diversi dan Restoratif Justice sebagai Alternartif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Praktid Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/PKPA, 2007.

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum,* Jakarta, Kencana. 2006.

HUBUNGAN STRUKTUR BANGUNAN DENGAN KEKUATAN BANGUNAN UNTUK MENAHAN GEMPA BUMI

Yelisman Zebua, S.Pd., M.Pd.T[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan struktur bangunan dengan kekuatan bangunan untuk menahan gempa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan sangat berpengaruh dalam mencegah kerusakan bangunan akibat gempa bumi, terutama kekenyalan struktur sehingga dapat meminimalisir kerugian. Gaya gempa hanya dapat ditahan oleh sistem struktur yang menerus (jalur lintasan gaya yang menerus) dari puncak bangunan sampai ke tanah.

Kata kunci : *struktur bangunan*, *kekuatan bangunan* dan *gempa*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Beban kejut ini dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi salah satu faktor yang utama adalah benturan pergesekan kerak bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Lokasi gesekan ini terjadi disebut *fault zone*. Kejutan yang berkaitan dengan benturan tersebut akan menjalar dalam bentuk gelombang. Gelombang ini menyebabkan permukaan bumi dan bangunan diatasnya bergetar. Pada saat bangunan bergetar, timbul gaya-gaya pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya dan gerakan. Setiap tahun kerak luar bumi bergetar sekitar satu juta kali. Getaran-getaran tersebut dapat diukur dengan peralatan seismograf. Sekitar 20 getaran diantaranya merupakan gempa bumi kuat dan 2 getaran merupakan gempa bumi ynag sangat kuat. Gempa bumi merambat melalui getaran keseluruh permukaan Bumi, akan tetapi menjadi berbahaya disekitar pusat gempa. Daerah yang paling rawan adalah yang mengalami pergeseran lempeng tektonik (Mokoginta dan Sondakh, 2015).

Gempa bumi merupakan bencana alam yang paling menakutkan bagi manusia, karena bencana alam ini terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diprediksi kapan terjadinnya. Hal ini akibat kita selalu mengandalkan tanah tempat kita berpijak di bumi sebagai landasan yang paling stabil yang bisa selalu dalam keadaan diam dan menopang kita. Begitu terjadi gempa bumi, kita tiba-tiba menyadari bahwa tanah yang kita pijak tersebut ternyata bisa kehilangan stabilitasnya sehingga dapat merusak lingkungan dan bangunan yang ada di atas lapisan permukaan tanah, dan mampu menelan korban.Wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah yang mempunyai tingkat resiko gempa yang tinggi diantara beberapa daerah gempa diseIuruh dunia. Data-data terakhir yang berhasil direkam menunjukkan bahwa rata-rata setiap tehun terjadi sepuluh kegiatan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di Indonesia. Sebagian terjadi pada daerah lepas pantai dan sebagian lagi pada daerah pemukiman. Pada daerah pemukiman yang cukup padat, perlu adanya suatu perlindungan untuk mengurangi angka kematian penduduk dan kerusakan berat akibat goncangan gempa. Dengan menggunakan

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional Nias*

prinsip teknik yang benar, detail konstruksi yang baik dan praktis maka kerugian harta benda dan jiwa menusia dapat dikurangi (Prajarto, 2009).

Biasanya setelah terjadi gempa manusia baru sadar akan konstruksi bangunan yang kurang kokoh menyebabkan banyak menelan korban jiwa. Bangunan yang tahan gempa bisa dibangun dengan teknologi sederhana yang biasa dipakai dalam rumah-rumah konvensional dengan sistem struktur beton bertulang, dinding batu-bata dan atap kayu. Penambahan yang perlu dilakukan, misalnya pada penambahan angkur yang memperkuat hubungan antara elemen beton, dinding, atap dan elemen lainnya. Dengan sistem-sistem bangunan yang dikenal di Indonesia dan dibuat oleh standarisasi pemerintah.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan struktur bangunan dengan kekuatan bangunan untuk menahan gempa.

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan suatu bencana alam yang disebabkan oleh lempeng-lempeng yang merupakan bagian dari kerak bumi yang bergerak aktif. Pergerakan itu dipicu antara lain oleh air laut dan samudera. Sekitar 71 persen wilayah bumi kita terdiri atas laut dan samudera, atau dengan kata lain berupa air. Lempeng-lempeng bumi ini sebenarnya adalah bagian dari kerak bumi yang terdiri atas berbagai jenis bebatuan. Efek dari pergeseran itu adalah berupa getaran yang disebut gempa. Gempa terjadi karena ada perpindahan massa dalam lapisan batuan bumi. Kekuatan suatu gempa bergantung pada jumlah energi yang terlepas, saat terjadi pergeseran dan tumbukan. Pergeseran tersebut memang memungkinkan terjadinya tumbukan. Ada kalanya pergeseran itu menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba, sehingga terjadi ledakan dan patahan yang menimbulkan gempa hebat yang disebut sebagai gempa tektonik. Keadaan itu tidak bisa dihindari karena memang bagian dari evolusi bumi. Walaupun gempa tidak dapat diprediksi, namun dapat diminimalisir dampak yang ditimbulkannya dengan cara membangun rumah tahan gempa.

Ketika gempa dan tsunami, sebagian besar rumah tradisional (berbahan kayu) masih tetap berdiri kokoh. Bahkan di negara Jepang yang sering terjadi ratusan gempa, bahan dasar rumah mereka terbuat dari kayu dan kertas ditambah lagi dengan pintu yang digeser kesamping, serta meja ala jepangnya yang hampir menyentuh lantai. Kini dengan teknologi barunya, Jepang menciptakan rumah Barier adalah rumah bola nomaden yang memiliki banyak keistimewaan. Diantaranya, tahan gempa dan bisa mengapung di air. Rumah bola ini dibuat berdasarkan Hukum Bernauli yang berbunyi: jika ada angin berhembus di bawah suatu benda, maka benda tersebut mengalami tekanan gaya ke bawah. Dinding rumah ini terdiri dari 32 sisi. Rahasia dari rumah ini adalah pada sistem pondasinya. Dengan menggunakan struktur pondasi bebas (beda dengan rumah biasa) dan pemberian gaya yang merata di 32 sisi dinding rumah bola ini menyebabkan rumah bola ini memiliki kekuatan yang merata

pada setiap bagiannya. Bahan rumah ini terdiri dari tiga lapisan, lapisan tengahnya mampu mengalirkan udara masuk dan keluar. Bagian sisi paling luar dibuat dari bahan urethane anti air, lapisan tengah adalah agregat (kerikil) dan lapisan dalamnya terbuat dari bahan kayu. Makanya, sela-sela kerikil inilah yang dimanfaatkan untuk mengalirkan udara. Jika terjadi banjir, rumah ini akan secara otomatis bisa mengapung di atas air. Hanya saja tidak bisa dikendalikan oleh penghuni rumah bola tersebut. Mereka akan terbawa terus oleh arus. Walaupun demikian, rumah Barier ini juga bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Menurut perusahaan World Window yang berlokasi di Timinaga, Yamagata city, terdapat beberapa ukuran tipe rumah Barier, yaitu ada ukuran 3S, 3SL, 2S, S, M dan L.

2.2. Struktur dan Konstruksi Bangunan

Sebuah struktur harus mampu menahan semua beban yang diberikan pada struktur tersebut secara efisien dan aman. Beban struktural merupakan hasil dari gaya-gaya natural. Bahan-bahan yang umum digunakan dalam konstruksi beton, baja dan kayu dibuat menjadi elemenelemen struktural seperti balok, kolom, lengkungan dan rangka batang. Elemen struktural tersebut harus disusun menjadi bentuk-bentuk struktural yang terbaik yang dapat berfungsi sebagai suatu struktur, namun tetap aman menahan semua beban (Dishongh, 2003).

Konstruksi bangunan merupakan bahan bangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menahan beban dan menentukan pola bangunan. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur disain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi (Ahmad, 2007).

Pada perencanaan suatu konstruksi bangunan gedung diperlukan beberapa teori-teori, analisa struktur, dan metode perhitungan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Ilmu teoritis di atas tidaklah cukup karena analisa secara teoritis tersebut hanya berlaku pada kondisi struktur ideal sedangkan gaya-gaya yang dihitung hanya merupakan pendekatan dari keadaan yang sebenarnya atau yang diharapkan terjadi. Perencanaan dari konstruksi bangunan juga harus memenuhi berbagai syarat konstruksi yang telah ditentukan yaitu kuat, kaku, bentuk yang serasi dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang ekonomis tapi tidak mengurangi mutu bangunan tersebut, sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi utama yang diinginkan oleh perencana (Muto, 1993).

3. Pembahasan

3.1. Prinsip-prinsip Utama Konstruksi Tahan Gempa

Di Indonesia, rumah tahan gempa (Smart Modula) ini tergolong konsep revolusioner untuk konstruksi bangunan serba guna. Desain rumah ini memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dalam membangunnya, dan cukup kokoh. Konsep knock down atau bongkar pasang yang cukup sederhana tapi praktis ini telah digulirkan sejak lima tahun lalu oleh BB Triatmoko SJ. Struktur utama rumah tahan gempa ini tidak ditanam atau ditopang dengan fondasi yang memanjang di bawah dinding rumah, tetapi hanya menggunakan umpak di setiap sudut rumah. Konsepnya mengadopsi model rumah tradisional adat Jawa yang dibuat dari kayu. Dengan penopang semacam ini, saat terjadi gempa, relatif bisa fleksibel. Jika menggunakan model fondasi seperti rumah-rumah konvensional,

hampir dipastikan akan mengalami keretakan atau patah saat dilanda gempa hebat. Berikut perinsip-perinsip utama rumah tahan gempa (Triatmoko, 2009)..

3.1.1. Denah yang Sederhana dan Simetris

Penyelidikan kerusakan akibat gempa menunjukkan pentingnya denah bangunan yang sederhana dan elemen-elemen struktur penahan gaya horisontal yang simetris. Struktur seperti ini dapat menahan gaya gempa Iebih baik karena kurangnya efek torsi dan kekekuatannya yang lebih merata.

3.1.2. Bahan Bangunan Harus Seringan Mungkin

Seringkali, oleh karena ketersedianya bahan bangunan tertentu. Arsitek dan Sarjana SipiI harus menggunakan bahan bangunan yang berat, tapi jika mungkin sebaiknya dipakai bahan bangunan yang ringan. Hal ini dikarenakan besarnya beban inersia gempa adalah sebanding dengan berat bahan bangunan. Sebagai contoh penutup atap genteng diatas kuda-kuda kayu menghasilkan beban gempa horisontal sebesar 3 x beban gempa yang dihasilkan oleh penutup atap seng diatas kuda-kuda kayu. Sama halnya dengan pasangan dinding bata menghasiIkan beban gempa sebesa 15 x beban gempa yang dihasilkan oleh dinding kayu.

3.1.3. Perlunya Sistim Konstruksi Penahan Beban yang Memadai

Supaya suatu bangunan dapat menahan gempa, gaya inersia gempa harus dapat disalurkan dari tiap-tiap elemen struktur kepada struktur utama gaya honisontal yang kemudian memindahkan gaya-gaya ini ke pondasi dan ke tanah. Adalah sangat penting bahwa struktur utama penahan gaya horizontal itu bersifat kenyal. Karena, jika kekuatan elastis dilampaui, keruntuhan getas yang tiba-tiba tidak akan terjadi, tetapi pada beberapa tempat tertentu terjadi Ieleh terlebih dulu. Suatu contoh misalnya deformasi paku pada batang kayu terjadi sebelum keruntuhan akibat momen lentur pada batangnya. Cara dimana gaya-gaya tersebut dialirkan biasanya disebut jalur Iintasan gaya. Tiap-tiap bangunan harus mempunyai jalur lintasan gaya yang cukup untuk dapat menahan gaya gempa horisosontal.

3.2. Struktur Rumah Penahan Gempa

3.2.1. Struktur Pondasi

Struktur pondasi berperanan penting untuk memindahkan beban gempa dari dinding ke tanah. Pertama, pondasi harus dapat menahan gaya tarik vertikal dan gaya tekan dari dinding. Ini berarti sloof menerima gaya geser dan momen lentur sebagai jalur Iintasan gaya terakhir sebelum gaya-gaya tersebut mencapai tanah. Akhirnya sloof memindahkan gaya-gaya datar tersebut ke pada tanah yang ditahan oleh daya dukung tanah dan tekanan tanah lateral. Rumah yang terbuat dari kayu dengan lantai kayu dan pondasi kayu seperti gambar-gambar di bawah ini memerlukan batang pengaku untuk mencegah keruntuhan.

a. Pondasi Batu Kali

Batu Kali Untuk Rumah, beberapa saat yang lalu saya telah memberikan artikel mengenai menentukan pondasi yang baik untuk bangunan dan berikut ini ada artikel menarik mengenai contoh pondasi batu kali serta cara pengerjaanya untuk anda sekalian yang sedang mencari contoh pembuatan pondasi yang baik, dan berikut ini contoh pemasangan pemasangan pondasi batu kali untuk rumah. Gambar pondasi batu kali berbentuk trapesium

ini sering digunakan sebagai struktur pondasi pada rumah tinggal 1 lantai sedangkan pada rumah tinggal bertingkat masih dapat menggunakan pondasi batu kali ini namun diperlukan penambahan dimensi atau penggabungan dengan pondasi foot plat pada area kolom sehingga didapatkan sebuah struktur pondasi yang kuat untuk menahan beban rumah tinggal yang berdiri diatasnya.

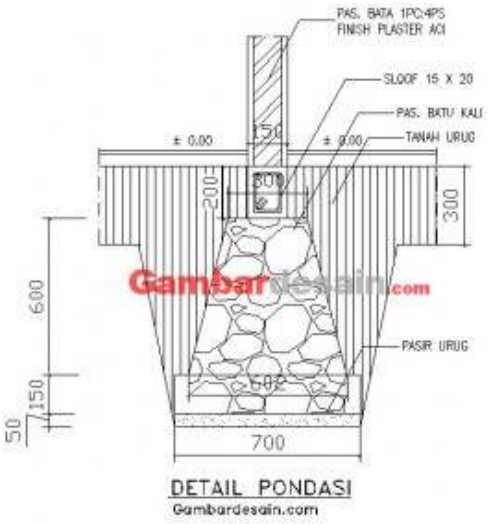

Gambar 1. Pondasi Batu Kali

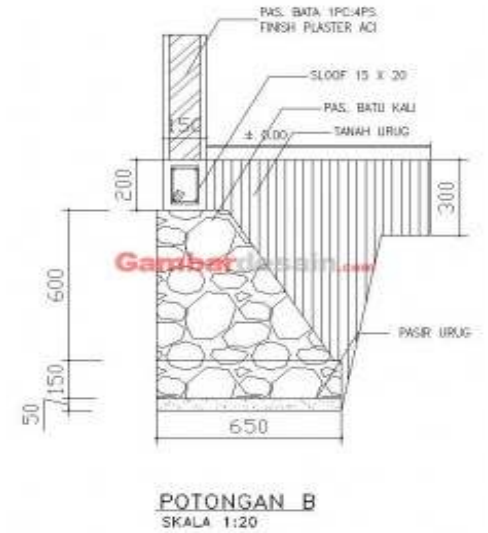

Gambar 2. Potongan Pondasi Batu Kali

Pada Gambar 1 pondasi batu kali diatas terlihat pondasi batu kali secara utuh yang digunakan pada area tengah rumah atau pada lahan bebas yang memungkinkan untuk dibuat pondasi batu kali dengan bentuk seperti ini, sedangkan pada lahan terbatas misalnya pada area pinggir rumah yang berbatasan dengan tetangga maka dapat digunakan pondasi batu kali terpotong sebelah yang dapat dilihat pada Gambar 2, potongan pondasi batu kali yang ada di atas. Pondasi harus diletakkan di tanah yang keras, dan apa bila kondisi tanah kurang baik maka harus dilakukan peerbaikan tanah terlebih dahulu. Sebaiknya pondasi terletak kurang lebih dari 45 cm dari tanah asli yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

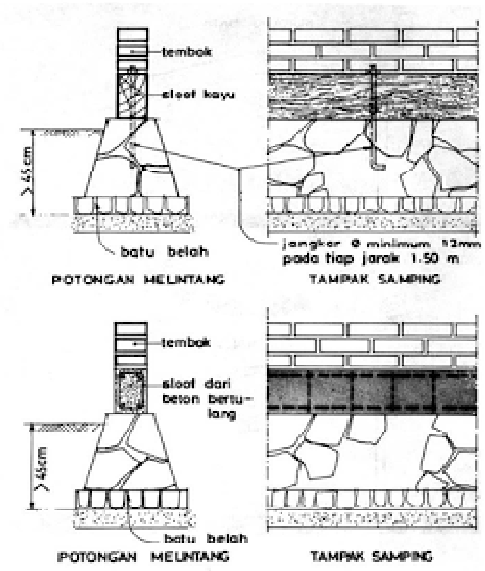

Gambar 3. Pondasi Tanah Kurang Baik

b. Perhitungan Material Pondasi Batu Kali

Material yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini dapat kita uraikan sebagai berikut;

1. Tanah urug
2. pasir pasang
3. Batu kali
4. Semen
5. Air
6. Papan bouw plank

Masing-masing material tersebut di atas dapat dhitung jumlah yang dibutuhkan untuk pasangan batu kali per m3, sehingga didapatkan total kebutuhan material dengan cara mngalikan kebutuhan material per m3 dengan jumlah volume total pekerjaan pasangan batu kali. Pondasi sebaiknya dibuat menerus keliling bangunan tanpa terputus.

3.2.2. Struktur Dinding

Gaya-gaya aksiaI dalam ring balok harus ditahan oleh dinding. Pada dinding bata gaya-gaya tersebut ditahan oleh gaya tekan diagonal yang diuraikan menjadi gaya tekan dan gaya tarik. Gaya aksiaI yang bekerja pada ring balok juga dapat menimbulkan gerakan berputar pada dinding. Putaran ini ditahan oleh berat sendiri dinding,berat atap yang bekerja diatasnya dan ikatan sloof ke pondasi. Jika momen guling lebih besar dari momen penahannya maka panjang dinding harus diperbesar.Kemungkinan lain untuk memperkaku dinding adalah sistim diafragma dengan menggunakan plywood, particle board atau sejenisnya, atau pengaku diagonal kayu untuk dinding bilik. Penggunaan dinding diafragma lebih dianjurkan karena sering terjadi kesulitan untuk memperoleh sambungan ujung yang lebih pada sistim pengaku diagonal. Beban gempa yang bekerja pada arah Y ditahan dengan cara yang sama dengan arah X Sebagal sistem struktur utama yang mana dinding harus mampu menahan

beban gempa yang searah dengan bidang dinding, dinding juga harus mampu menahan gempa dalam arah yang tegak lurus bidang dinding. Dengan alasan ini maka dinding bata (tanpa tulangan) harus diperkuat dengan kolom praktis dengan jarak yang cukup dekat. Sebagai pengganti kolom praktis ini dapat dipakai tiang kayu. Pondasi dinding juga dibuat menerus. Pondasi-pondasi setempat perlu diikat kuat satu sama lain dengan memakai balok pengikat (sloof) sepanjang pondasi tersebut dan seperti contoh gambar dibawah ini:

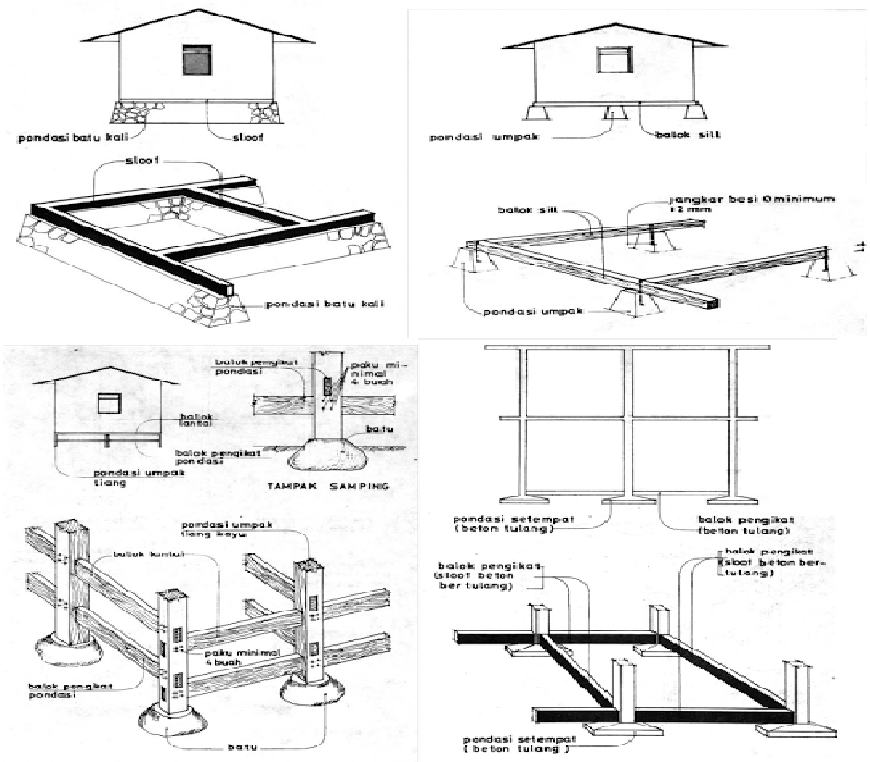

Gambar 4. Struktur dinding

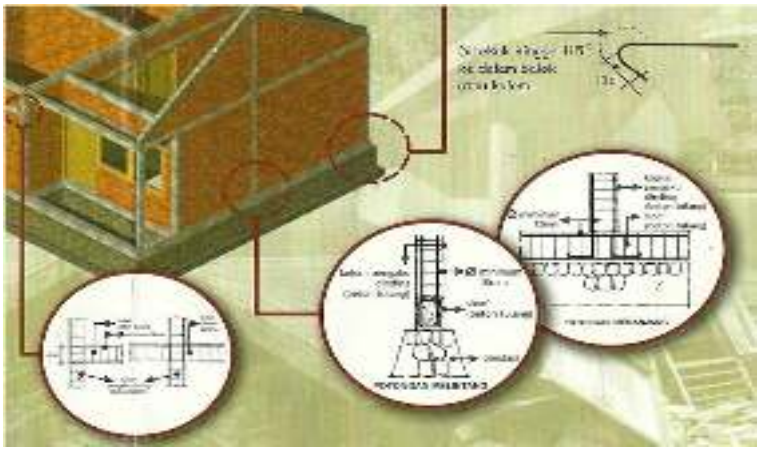

Gambar 5. Kolom Dinding

Pada setiap luasan dinding 12 m², harus dipasang kolom, bisa menggunakan bahan kayu, beton bertulang, baja, plester, ataupun bambu. Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang-lubang pintu/jendela diusahakan

sedapat mungkin simetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan,seperti contoh di bawah ini:

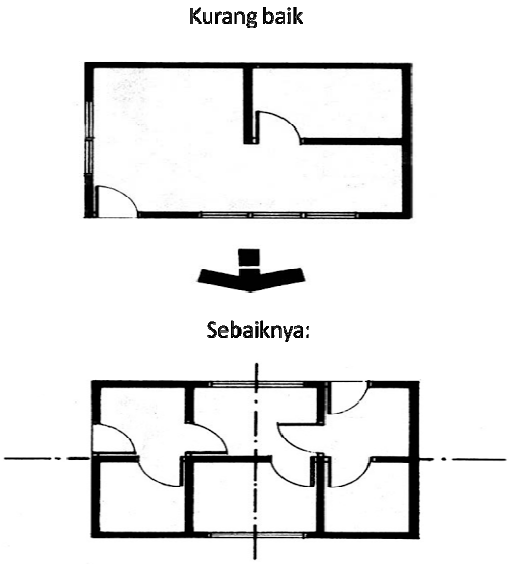

Gambar 6. Pintu Dan Jendela

Keseluruhan kerangka bangunan harus terikat dengan kokoh dan harus dipasang balok keliling yang diikat kaku dangan kolom. Gunakan kayu kering sebagai konstruksi kuda-kuda, pilih bahan atap yang seringan mungkin, dan ikat kaku dengan konstruksi kuda-kuda. Untuk bahan dinding dipilih yang seringan mungkin, papan, papan berserat, papan lapis, bilik, ikat bahan dinding dengan kolom. Bila bahan dinding menggunakan bata/batako, bahan tidak patah dan berbunyi nyaring jika diadukan, pada jarakvertikal 30 cm, pasangan diberi angker yang dijangkarkan ke kolom, panjang angker 50 cm, dan diameter 6 mm. Perhatikan bahan spesi/adukan, setiap jenis tras, pasir, atau semen, mempunyai sifat khusus sebaiknya perbandingan campuran mengikuti standar yang ada. Bangunan tahan gempa memiliki komponen-komponen yang terikat antara satu dengan yang lainnya, baik antara komponen structural maupun nonstructural.

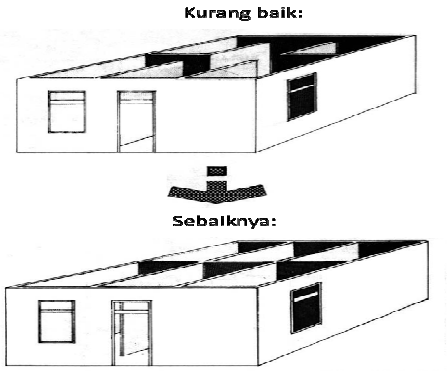

Gambar 7. Bidang Dinding Kotak

3.2.3. Struktur Atap

a Pengertian Struktur Atap

Atap merupakan bagian dari bangunan gedung (rumah) yang letaknya berada dibagian paling atas, sehingga untuk perencanaannya atap ini haruslah diperhitungkan dan harus mendapat perhatian yang khusus dari

si perencana (arsitek). Karena dilihat dari penampakannya ataplah yang paling pertama kali terlihat oleh pandangan setiap yang memperhatikannya. Untuk itu dalam merencanakan bentuk atap harus mempunyai daya arstistik. Bisa juga dikatakan bahwa atap merupakan mahkota dari suatu bangunan rumah. Atap sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya, sehingga akan terlindung dari panas, hujan, angin dan binatang buas serta keamanan. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yng berfungsi sebagai penutup/pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunan bangunan.

Struktur atap pada umumnya terdiri dari tiga bagian utama yaitu : struktur penutup atap, gording dan rangka kuda-kuda. Penutup atap akan didukung oleh struktur rangka atap, yang terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom dan atau balok. Konstruksi atap yang baik memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dengan baik. Sudah sewajarnya setiap rumah dilengkapi dengan atap. Atap rumah merupakan bagian dari bangunan yang befungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. Atap rumah merupakan bagian penting pada konstruksi bangunan rumah karena berada di atas untuk menutupi seluruh bagian bangunan. Untuk konstruksi atau struktur, pada umumnya, atap terdiri dari tiga bagian utama yaitu struktur penutup atap, gording dan rangka kuda-kuda. Penutup atap akan didukung oleh struktur rangka atap, yang terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam fondasi melalui kolom dan atau balok. Struktur atap pada umumnya juga dibuat dengan mengikuti atau menyesuaikan dengan denah atau bentuk keseluruhan bangunan (desain atap rumah). Jika rumah terdiri atas dua lantai, struktur atap dibuat mengikuti denah atau layout rumah pada lantai dua.

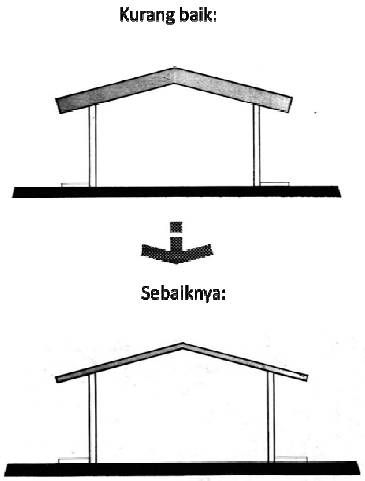

Gambar 8. Atap Ringan

b. Pembagian Struktur Atap

Ada tiga komponen penyusun atap:

1. Struktur atap (rangka atap dan penopang rangka atap);
2. Penutup atap (genteng,polikarbonat);
3. Pelengkap atap (talang horizontal/vertikal dan lisplang).

Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan /mengalirkan beban-beban dari atap. Struktur atap

terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga umumnya berupa susunan balok –balok (dari kayu/bambu/baja) secara vertikal dan horizontal – kecuali pada struktur atap dak beton. Berdasarkan posisi inilah maka muncul istilah gording,kasau dan reng. Susunan rangka atap dapat menghasilkan lekukan pada atap (jurai dalam/luar) dan menciptakan bentuk atap tertentu. Penopang rangka atap adalah balok kayu yang disusun membentuk segitiga,disebut dengan istilah kuda-kuda. Kuda-kuda berada dibawah rangka atap,fungsinya untuk menyangga rangka atap. Sebagai pengaku,bagian atas kuda-kuda disangkutkan pada balok bubungan,sementara kedua kakinya dihubungkan dengan kolom struktur untuk mengalirakan beban ke tanah. Secara umum dikenal 4 jenis struktur atap yaitu:

1. struktur dinding (sopi-sopi) rangka kayu.
2. kuda-kuda dan rangka kayu.
3. struktur baja konvensional.
4. struktur baja ringan.

Penutup merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Ada berbagai pilihan penutup atap dengan pilihan bentuk dan sifat yang berbeda. Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur bangunan dan faktor keawetan terhadap cuaca (angin,panas,hujan). Faktor lain adalah kecocokan/keindahan terhadap desain rumah. Ukuran dan desain dari penutup atap juga memberi pengaruh pada struktur,misalnya konstruksi kuda-kuda,ukuran reng,dan sudut kemiringan.

Elemen pelengkap pada atap selain berfungsi struktural juga estetis.

1. Talang

Saluran air pada atap yang berfungsi mengarahkan air agar jatuh ketanah disebut talang. Talang dipasang mendatar mengikuti tiris atap kemudian dialirkan ke bawah melalui pipa vertikal.

2. Lisplang

Dari segi konstruksi, lisplang menciptakan bentukan rigid (kokoh, tidak berubah) dari susunan kasau. Pada pemasangan rangka penahan atap, batang-batang kasau hanya ditahan oleh paku dan ada kemungkinan posisinya bergeser. Disinilah lisplang berfungsi untuk mengunci susunan kasau tersebut agar tetap berada pada tempatnya. Dari segi estetika, lisplang berfungsi menutupi kasau yang berjajar dibawah susunan genteng/bahan penutup atap lain. Maka tampilan atap pada bagian tepi akan terlihat rapi oleh kehadiran lisplang.

c. Perancangan Atap yang Baik Menurut Iklim dan Tahan terhadap Gempa

Atap dapat dikatakan berkualitas jika strukturnya kuat/kokoh dan awet/tahan lama. Faktor iklim menjadi bahan pertimbangan penting dalam merancang bentuk dan konstruksi atap/bangunan. Keberadaan atap pada rumah sangat penting mengingat fungsinya seperti payung yang melindungi sisi rumah dari gangguan cuaca (panas, hujan dan angin). Oleh karena itu,sebuah atap harus benar-benar kokoh/kuat dan kekuatannya tergantung pada struktur pendukung atap. Mengacu pada kondisi iklim perancangan atap yang baik ditentukan 3 faktor, yakni jenis material,bentuk/ukuran,dan teknik pengerjaan.

a. Jenis Material Struktur Dan Penutup Atap

Penentuan material tergantung pada selera penghuni,namun harus tetap memerhatikan prinsip dasar sebuah struktur yaitu harus kuat,presisi,cukup ringan,dan tidak over design. Atap yang kuat harus mampu menahan besarnya beban yang bekerja pada elemen struktur atap.

Ada 3 jenis beban yang bekerja pada atap yaitu:

1. beban berat sendiri (bahan rangka,penopang rangka,dan penutup atap),
2. beban angin tekan dan angin hisap,dan
3. beban bergerak lain (berat manusia saat pemasangan dan pemeliharaan).

Pemilihan bahan tertentu harus diikuti oleh pengetahuan yang lengkap akan karakteristik setiap bahan.

b. Bentuk dan Ukuran

Dibandingkan hujan dan panas,angin merupakan faktor yang paling diperhitungkan demi menjamin atap yang kuat. Beberapa masalah akibat angin kencang antara lain:penutup atap yg terbang,gording terlepas,kuda-kuda terangkat,dan kolom kayu bergeser atau terangkat. Atap yang baik adalah yang dapat menerima beban angin yang sama dari segala arah (idealnya adalah bentuk atap bulat). Bentuk ini sangat berpengaruh pada besarnya tekanan angin yang bekerja pada bangunan. Semakin tinggi bangunan akan semakin besar tekanan angin. Tekanan angin bekerja lebih ringan bila tinggi bangunan lebih kecil dari setengah lebar bangunan. Kemiringan atap yang memberikan beban angin yg rendah adalah antara 10°-30°. Untuk sudut yang lebih besar dari dari 30°,perlu kekuatan yg lebih baik dan penutup yg sesuai.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan sangat berpengaruh dalam mencegah kerusakan bangunan akibat gempa bumi, terutama kekenyalan struktur sehingga dapat meminimalisir kerugian. Gaya gempa hanya dapat ditahan oleh sistem struktur yang menerus (jalur lintasan gaya yang menerus) dari puncak bangunan sampai ke tanah.

4.2. Saran.

Waspadailah bencana alam, salah satunya gempa bumi, karena kita tidak dapat mengetahui kapan gempa bumi itu datang dan dapat merugikan jiwa dan harta kita, maka dari itu dalam membangun suatu bangunan tempat tinggal haruslah menggunakan prinsip teknik yang benar.

Daftar Pustaka

Ahmad, Rosman. 2007. Bahan Bangunan sebagai Dasar Pengetahuan. Bangun Cipta Pustaka. Jakarta.

DPU, 1987. Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung, Yayasan Badan Penerbit PU, Jakarta.

DPU, 2002. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung, SNI-1726-2002. Departemen Pekerjaan Umum, Bandung

DPU, 2002. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung , SNI 03-2847-2002. Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.

Mokoginta dan Julianus A.R Sondakh. 2015. Penerapan Konsep Arsitektur *Post Modern* pada Pengembangan Bangunan Universitas Dumoga di Kotamobagu. Makalah Arsitektur. Universitas Sam Ratulangi, Menado.

Muto, Kiyoshi, 1993. Analisis Perencanaan Gedung Tahan Gempa, Erlangga, Jakarta.

Prajarto, N. 2009. Bencana, Informasi dan Keterlibatan Media. Makalah FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Triatmoko, B.B. SJ., 2009. The ATMI Story: Rainbow of Excellence. Kanisius, Yogyakarta.

PELAKSANAAN SUPERVISI PENGAWAS DALAM PENINGKATAN STRATEGI PEMBELAJARAN PADA SD NEGERI 071116 SIWALAWA KECAMATAN FANAYAMA, KABUPATEN NIAS SELATAN

Yaaroziduhu Sarumaha, S.Pd.[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi pengawas dalam peningkatan strategi pembelajaran pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Nias Selatan. Sumber data terdiri atas pengawas, kepala sekolah, para guru SD Negeri 071116 Siwalawa, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Nias Selatan sebagai informan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan 3 cara: (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi supervisi pengawas di SD Negeri 071116 Siwalawa yaitu bahwa pengawas mempunyai tiga tugas dan tanggung jawab. a) mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran, b) bertindak sebagai seorang nara sumber, c) memiliki kecakapan dalam melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah, guru, dan staf sekolah serta berupaya mengimplementasikan supervisi pengawas. Strategi Peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa berada dalam kategori baik. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Supervisi Pengawas dalam peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa, faktor penghambat meliputi; a) pengadaan personil, fasilitas, dan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan program supervisi yang baik; b) pengawas hanya akan melakukan kegiatan supervisi jika dana untuk kegiatan supervisi telah di keluarkan oleh dinas setempat; c) kurangnya pelatihan terhadap pengawas, selain hal tersebut guru tidak terlatih dalam implementasi K13; d) masih ada guru yang tidak memperhatikan RPP, dan e) guru masih belum memahami K13. Sedangkan faktor pendukung meliputi; Supervisi kunjungan kelas yang berkelanjutan, pengawas memberi semangat kerja guru untuk dapat bekerja dengan maksimal.

Kata kunci : *supervisi*, *pengawas* dan *strategi pembelajaran*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik dan bermutu serta berhasil maka diperlukan fungsi kontrol yang cukup dan mencakup perhatian (monitoring), pengawasan dengan komponen-komponen pendidikan yang berupa supervisi pendidikan. P. Adam Smith dan Frank, G. Dicky dalam Daryanto berpendapat supervisi pendidikan merupakan suatu program yang terencana untuk memperbaiki pengajaran (Daryanto dan Muhammad, 2013).

Guru dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari kesulitan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun institusi di atasnya. Karena itu dibutuhkan peran pengawas (*supervisor*) untuk membantu menjelaskan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan para guru mata pelajaran agama Islam di sekolah, terutama pembuatan rencana pembelajaran, serta bagaimana mengaktifkan siswa dalam setiap pembelajaran (Daryanto dan Muhammad, 2013).

Pengawasan terhadap sekolah umum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah tersebut, oleh karena itu pengawasan oleh pemerintah lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengayoman bagi semua satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus menerus dapat peningkatan mutu pendidikan maupun pelayanannya.

[1] *Pengawas Sekolah Madya Jenjang SD Kabupaten Nias Selatan*

Pengawas pendidikan merupakan figur utama disamping guru yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan penilaian serta pembinaan terhadap teknik pendidikan dan administrasi. Tugas pengawas pendidikan adalah mengembangkan proses pembelajaran di sekolah baik dalam bentuk intra maupun ekstra kurikuler.

Pengawas adalah salah satu tenaga kependidikan yang keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran agar tujuan pendidikan di sekolah dapat terwujud dengan baik. Demikian pula dibutuhkan hubungan yang sinergis dan kontinyu antara pengawas dan guru sehingga berbagai kegiatan dalam upaya memajukan prestasi siswa.

Kegiatan supevisi menaruh perhatian utama pada bantuan yang dapat peningkatan kemampuan professional, ini tercermin pada kemampuan guru memberikan bantuan belajar kepada peserta didiknya, sehingga terjadi perubahan perilaku akademik terhadap peserta didik. Daryanto mengatakan bahwa tujuan utama sepervisi adalah memperbaiki pembelajaran (Daryanto dan Rachmawati, 2015).

Supervisi dilakukan oleh pengawas sebagai supervisor secara konstruktif dan kreatif dengan cara mendorong inisiatif guru untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreatifitas peserta didik dalam belajar. Seorang supervisior dalam melaksanakan tugas profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, atau pengawas akan lebih berkualitas jika dilakukan berdasarkan prinsip supervisi.

Untuk menciptakan tatanan kerja yang profesional dalam pelaksanaan tugas pengawas yang selama ini dipandang miring oleh sebagian guru yang diidentikkan dengan inspeksi atau bertindak hanya sebagai penilai karya dan kinerja guru, perlu dibenahi ke arah yang lebih baik agar kredibilitas pengawas benar-benar menjadi teman kerja yang diidolakan guru menjadi pemberi inspirasi ketercapaian tugas pokok guru secara maksimal.

Keberadaan pengawas pada lembaga pendidikan sekolah adalah memberikan dorongan dan bantuan kepada guru-guru dalam menyelesaikan segala jenis dan bentuk persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran, dan menjadi mitra kerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan berbeda dengan yang diinginkan. Syarat untuk menjadi pengawas adalah pernah mengajar serta menjadi kepala sekolah agar dapat memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan dengan pengalaman yang dimiliki maka dapat memberikan solusi yang solutif. Di bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan penyelia (supervisor) yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi dan profesi agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan professional (Zainal dan Rohmanto, 2008).

Sekolah yang dikelola secara cepat dan cermat akan mampu menerapkan pemecahan masalah-masalah kompleks dengan cara yang sederhana (*solving complicated problems*), atau dengan cara menyederhanakannya. Tanpa kemampuan kepala sekolah dan guru bertindak semacam itu, akan muncul pengelolaan sekolah yang dilakukan secara salah (*school mismanagement*), untuk selanjutnya tidak akan mampu melahirkan proses dan hasil-hasil yang terukur. Prakarsa peningkatan mutu pendidikan untuk sebagian besar menempatkan transformasi pembelajaran sebagai intinya. Sedangkan upaya ke arah perbaikan mutu pembelajaran itu terus dilakukan, antara lain dengan mentransfer pengalaman di sektor proses fabrikasi ke dalam perilaku pengajaran dan pembelajaran (Arikunto, 2000).

Implementasi supervisi secara optimal bagi seorang pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya didasarkan pada kemampuan dan keterampilan memimpin melainkan didukung oleh sikap positif konstruktif, seperti dedikasi, ketekunan, kedisiplinan, inisiatif, bertanggung jawab, komunikatif, persuasif, kritis dan terbuka. Hubungan antara pengawas/supervisor dengan yang diawasi lebih bersifat kemitraan, hubungan komunikasi pun tidak lagi berjalan masing-masing akan tetapi berjalan bersama-sama atau kerja sama.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi pengawas dalam peningkatan strategi pembelajaran pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Nias Selatan.

1.3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan pedagogik, teologis normatif, dan psikologis. Sumber data terdiri atas pengawas, kepala sekolah, para guru SD Negeri 071116 Siwalawa, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Nias Selatan sebagai informan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan 3 cara: (1) reduksi data, (2) *display* data, dan (3) verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

2. Uraian Teoritis

2.1. Supervisi Pengawas

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung begitu pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit dan kompleks, serta memerlukan pemecahan secara proporsional. Dalam bidang pendidikan juga terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan pemecahan secara proporsional pula, baik yang menyangkut proses pembelajaran, yang berkaitan dengan kebijaksanaan, manajemen, pendekatan, strategi, isi maupun sumber-sumber pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu personil pendidikan terutama guru, harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Namun untuk maksud tersebut guru-guru sering menghadapi kesulitan jika harus melakukannya sendiri karena keterbatasan ekonomi maupun waktu (Nawawi, 2011).

Pada dasarnya guru mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan kinerja. Namun banyak faktor yang menghambat mereka dalam mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Oleh karena itu sangat dirasakan perlunya pembinaan yang berkesinambungan terhadap para guru dan personil pendidikan yang lain di sekolah. Program pembinaan guru dan personil pendidikan lazim disebut supervisi pendidikan. Untuk itu para pembina dan pengawas sekolah perlu memiliki pemahaman tentang supervisi pendidikan (Suhertian, 2000).

Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai supervisor, harus dapat memahami, menghayati, dan menyelami kondisi jiwa guru, staf yang dipimpinnya, karena guru, staf yang dipimpinnya memiliki kapasitas dan kapabilitas tersendiri, sehingga pemimpin harus terus menggali dan mengembangkan kualitas pemahaman terhadap orang yang dipimpin. Seorang pemimpin hendaknya mempelajari banyak ilmu, selain ilmu psikologi, pemimpin juga hendaknya melengkapi diri dengan pengetahuan sosiologi sebagai ilmu pelengkap untuk dapat menguasai teknik supervisor (Sutisna, 2013).

2.2. Pengawas

Pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pengawas Pendidikan pada tingkat sekolah Dasar sehingga pengertiannya lebih spesifik sebagai berikut: Pengawas Pendidikan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan (Sujana, 2011).

Supervisi di bidang pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak yang berkompeten kepada guru dan personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar peserta didik untuk memperbaiki suatu pembelajaran agar peserta didik dapat belajar secara efektif dengan prestasi yang lebih meningkat. Secara umum supervisi dapat diartikan suatu usaha kendali peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran yang ditunjang dengan unsur-unsur guru, sarana, prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Supervisi sebagai suatu usaha memperbaiki pembelajaran menyangkut kompetensi keterampilan dan keefektifan supervisor bekerja sama dengan guru, tenaga kependidikan maupun dengan kepala sekolah. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak akan memudahkan dan memungkinkan tercapainya semua kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah yang telah direncanakan disertai dengan peningkatan kualitas layanan pada bidang tugas masing-masing (Sujana, 2011).

Menjadi pengawas (supervisor), berarti menduduki jabatan dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang berat. Pada pengawas bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan pekerjaannya sendiri. Mereka harus dapat mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan mengambil tindakan. Mereka mendapat tekanan dari atas dan desakan dari bawah. Namun demikian, jika tugas itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pekerjaan sebagai pengawas juga menyenangkan. Pengawas dapat merasakan kepuasan kerja tersendiri karena dapat mencapai hasil dan produktivitas yang tinggi.

2.3. Strategi Pembelajaran

Sebelum menguraikan strategi pembelajaran terlebih dahulu penulis akan menguraikan konsep strategi. Strategi menurut etimologi berasal dari kata strategic (Inggris) yang berarti kiat, cara, taktik utama (Nawawi, 2003) secara historis kata strategi berawal dari dunia militer yang secara populer yang diartikan sebagai "kiat yang digunakan oleh para komandan militer (jenderal) untuk memenangkan peperangan. Sorang pakar manajemen Jauch dan William F. Gluek berpendapat bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi itu (Lawrwnce dan William, 1997).

3. Pembahasan

3.1. Implementasi Supervisi Pengawas di SD Negeri 071116 Siwalawa

Tugas dan tanggungjawab pengawas pendidikan diarahkan untuk tercapainya tenaga pendidikan yang profesional. Profesionalisasi tenaga kependidikan dalam lingkup SD Negeri 071116 Siwalawa, Kecamatan Fanayama semua kemampuan baik yang bersifat fisik maupun non fisik untuk membentuk, mengubah dan

mengembangkan sesuatu yang ada di lingkungan SD Negeri 07116 Siwalawa untuk kepentingan pendidikan. tugas pokok pengawas sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan pada satuan pendidikan

Perencanaan adalah proses pemikiran secara matang dan sistematis untuk mengambil suatu keputusan mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang menuju tujuan yang dikehendaki. Setiap pengawas baik secara kelompok maupun secara individual wajib menyusun rencana program pengawasan yang terdiri atas program tahunan, program semester, rencana pengawasan akademik (RKA) dan rencana kepengawasan manajerial (RKM). Program pengawasan tahunan disusun oleh kelompok pengawas pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten/kota melalaui diskusi terprogram. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan setiap pengawasan pada setiap satuan pendidikan yang dibinanya. Program ini disusun sebagai penjabaran program tahunan ditingkat kabupaten/kota.

Rencana kepengawasan akademik (RKA) dan rencana kepengawasan manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek /masalah atau prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Program tahunanan, program semester, RKA dan RKM sekurangkurangnya memuat aspek: masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi Metode kerja (tehnik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan

Kegiatan supervisi akademik dan manjerial meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar Nasional pendidikan yang terkait yang merupakan kegiatan yang bersifat interaksi langsung antara pengawas dan kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan lainnya kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka pengawas di satuan pendidikan binaannya. Adapun kegiatan yang terkait dengan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari delapan standar Nasional pendidikan.

Pengawas mempunyai peran ganda sebagai pengawas, yaitu pengawas berperan sebagai pemberi bantuan dan pembinaan profesi guru di satu sisi, dan sebagai penilai peformans mengajar guru untuk kepentingan upaya SD Negeri 07116 Siwalawa dalam mengimplementasikan supervisi pengawas tidak terlepas dari tugas pokok pengawas promosi kenaikan pangkat. Karena itu, Pengawas dalam lingkup SD Negeri 071116 Siwalawa dalam melaksanakan tugas harus mempunyai kecakapan dalam memupuk suasana hubungan antar pribadi yang sehat, yang melahirkan saling kepercayaan.

Pandangan tersebut, memberikan suatu pemahaman bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas, diperlukan kemampuan yang memadai baik dalam memberikan bantuan pembinaan profesi guru, maupun dalam menilai kegiatan mengajar. Kemampuan berkomunikasi pengawas dengan guru-guru dan antar sesama pengawas, serta keterampilan lain yang berhubungan dengan tugas pokok kesupervisian. Atas dasar itu, maka suatu keharusan bagi pengawas untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai supervisi, sehingga dengan demikian ia lebih mampu melaksanakan tugas pembinaan terhadap guru-guru.

Pentingnya pembinaan kemampuan profesional guru disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk hidup yang lebih layak dan kompleksitas yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan akibat lajunya informasi, teknologi dan perubahan lingkungan. Semua ini menuntut perubahan semua aspek kehidupan. Oleh karenanya pembinaan kemampuan profesional guru merupakan hal penting yang semestinya mendapat perhatian pengawas pendidikan untuk meningkatkan mutu belajar siswa di sekolah khusunya di SD Negeri 07116 Siwalawa.

c. Melaksanakan Supervisi

Tujuan utama supervisi pada SD Negeri 07116 Siwalawa dan memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf dan personil tesebut mampu meningkatkan kwalitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi fungsi utama supervisi pendidikan SD Negeri 07116 Siwalawa pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Sehingga dapat membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan. Fungsi utama supervisi SD Negeri 07116 Siwalawa ialah menilai dan mempernbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, dan fungsi utama supervisi bukan hanya perbaikan pembelajaran saja akan tetapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong kearah pertumbuhan profesi guru.

Usaha perbaikan merupakan proses yang kontinu sesuai dengan perubahan masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubaha. Perubahan masyarakat membawa pula konsekuensi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Suatu penemuan baru mengakibatkan timbulnya dimensi-dimensi dan perspektif baru dalam bidang ilmu bidang pengetahuan. Makin jauh pembahasan tentang supervisi makin Nampak bahwa kunci supervisi bukan hanya membicarakan perbaikan itu sendiri, melainkan supervisi yang diberikan, kepada guru-guru, supervisi juga merupakan alat untuk mengkoordinasi, menstimulasi dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru.

Adapun analisis yang lebih luas seperti yang dibahas ia mengemukakan delapan fungsi supervisi. Delapan fungsi tersebut adalah mengkoordinasi semua usaha kelas, melengkapi semua kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreati, memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, memberi wawasan yang lebih luas dan teritegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Keterangan di atas menunjukkan adanya implementasi manajemen dan supervisi di SD Negeri 07116 Siwalawa ditinjau dari segi perencanaanya dalam berbagai segi, dan hal itu ditemukan jika dilakukan pembandingan secara mendalam. Adapun bentuk dan implementasi perencanaan program pengajaran adalah berbentuk program tahunan, program semester, RPP, dan silabus. Dari perencanaan yang telah disusun tersebut diwajibkan kepada semua guru pada setiap jenjang dan unit kerja sebelum melaksanakan PBM di kelas, dengan bimbingan dan pengawasan langsung oleh Kepala sekolah. Implementasi perencanaan ini tetap mempertimbangkan baik ketegasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pada pola nasional berpedoman pada penyelenggaraan program kebijaksaan penerapan manajemen berbasis Sekolah.

Guru-guru SD Negeri 07116 Siwalawa memang memiliki perbedaan antara satu dan lainnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, namun pada umumnya sebelum melaksanakan pembelajaran, guru-guru secara terpadu lebih awal merencanakan materi-materi dan merumuskan kompetensi pembelajaran yang akan disampaikan, kemudian dirumuskan hasil belajar yang ingin dicapai, dan beberapa indikatornya, serta strategi pembelajaran yang diterapkan.

SD Negeri 07116 Siwalawa, telah menerapkan manajemen modren dan professional dengan struktur organisasi yang lengkap dan pembagian kerja yang jelas serta profesional di samping itu pembinaan kerjasama dan perilaku terus menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan dalam rangka memperjelas ruang lingkup kerja, tugas, hak, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pribadi dalam tubuh organisasi SD Negeri 07116 Siwalawa, dengan demikian segala bentuk kesalahan seperti tumpang tindih kewenangan dan yang semacamnya dapat dihindarkan. Pembagian tugas secara jelas ini menjadi sangat penting dalam rangka pemberdayaan seluruh SDM yang ada sebagai potensi yang diharapkan secara bersama-sama dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Memperhatikan tugas dan fungsi Pengawas dan kepala Sekolah tersebut, jumlahnya cukup banyak, sehingga mungkin ada sebahagian mempertanyakan mungkin meragukan kemampuan Pengawas dan kepala Sekolah menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Dari sejumlah tugas pokok dan fungsi tersebut, sudah tentu Pengawas dan kepala Sekolah harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang cukup memadai untuk mengimbangi tugas-tugas tersebut. Pengawas dan Kepala Sekolah harus menjadi seorang generalis, yaitu harus memiliki pengetahuan dari semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, artinya memahami sedikit dari banyak masalah yang dihadapi. Seorang kepala tidak dituntut menjadi ahli, tetapi yang diinginkan adalah mengetahui dan memahami banyak masalah, yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Kemudian hal paling penting lagi adalah adanya pendelegasian wewenang (*delegation of otority*) kepada bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan susuai fungsi dan tugas mereka. Fungsi ini ikut meringankan beban kerja kepala Sekolah, terutama dalam kegiatan rutinitas, yang sering melelahkan.

3.2. Strategi Peningkatan Pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi peningkatan pembelajaran melalui pelaksanaan kurikulum pendidikan di SD Negeri 071116 Siwalawa, yang didasarkan pada konsep manajemen terlebih dahulu harus dilihat dari segi implementasi kurikulum yang sudah mulai diterapkan dengan pendekatan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan manajemen secara umum di SD Negeri 071116 Siwalawa dapat dikatakan sudah terimplementasi secara eksplisit, jika dicermati terhadap beberapa keberhasilan yang telah diraih oleh SD Negeri 071116 Siwalawa selama tiga tahun terakhir, baik keberhasilan di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Seluruh aktifitas pendidikan harus terfokus kepada upaya memenuhi harapan dan kepuasan peserta didik. Lembaga pendidikan yang memiliki komitmen besar terhadap kepuasan dan

kebutuhan peserta didik merupakan hal penting dan utama untuk meraih mutu pendidikan yang mempunyai daya saing yang tinggi.

Dalam menghadapi persaingan eksternal yang semakin ketat, terutama di sektor pendidikan, maka Sekolah harus selalu mengadakan perbaikan secara berkesinambungan, dengan kata lain harus melakukan upaya perubahan dan menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya atau menimal mepertahankan mutu dan prestasi yang telah dicapai. Ada beberapa komponen pendidikan yang perlu mendapat perbaikan kualitas secara berkesinambungan, yaitu, 1) perbaikan proses pembelajaran, 2) perbaikan metode dan media pembelajaran, dan 3) pengembangan/ peningkatan kinerja guru dan staf.

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan, karena boleh dikatakan keduanya saling terkait. Kurikulum sebagai pedoman acuan pelaksanaan pembelajaran membutuhkan perubahan dan pengembangan sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Kurikulum yang berisikan seperangkat perencanaan yang mengatur pendidikan melalui proses pembelajaran peserta didik, sangat erat kaitannya dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, agar hasil proses pembelajaran yang dituntut didalam kompetensi kelulusan dapat menjawab tantangan maupun kebutuhan zaman dalam proses kehidupan. Dalam menyikapi terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka SD Negeri 071116 Siwalawa melalui Tim Pengembangan Kurikulum, telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk dapat diterapkan di strategi peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa

3.3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Supervisi Pengawas dalam Peningkatan Pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa

Melalui hasil observasi bahwa pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa selalu diawasi dan dibina oleh Kementerian pendidikan Nasional dan Kebudayaan melalui aparat pengawasnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengawas sebagai supervisor mempunyai tugas dan tanggung jawab membina dan membimbing guru-guru, sehingga dapat melakukan perbaikan proses belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang telah dideskripsikan pada uraian sebelumnya, harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik dapat menumbuh kembangkan minat dan motivasi bagi para guru dan peserta didik dalam melaksanakan interaksi pembelajaran di kelas, interaksi pembelajaran di kelas akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang pada ahirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun dalam faktanya tidak sedikit guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Usaha pengawas dalam mengembangkan kemampuan guru, diarahkan kepada permasalahan yang dihadapi guru saat ini dan yang akan datang. Untuk terlaksananya tugas dan tanggungjawab sebagai supervisor sebagaimana sasaran tersebut di atas, menuntut kemampuan memahami kebutuhan dan mengetahui masalah yang dihadapi guru. Bantuan dan pelayanan yang diberikan akan dapat mengatasi permasalahan guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga guru terhindar dari kemelut kesulitan yang menghadangnya.

Dengan demikian pelaksanaan supervisi pengajaran seharusnya berjalan secara terorganisir sebagaimana mestinya, yaitu memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru-guru, mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, mengembangkan kegiatan pembelajaran, sehingga kualitas hasil belajar siswa meningkat. Namun dalam kenyataannya tidak terlaksana secara maksimal, supervisi pengajaran mengalami banyak hambatan dan kendala, sehingga pelaksanaan tugas pengawas sebagai supervisor tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Solusi implementasi supervisi pengawas dalam peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa yaitu pengawas sangat perlu memberi pengawasan dan petunjuk dalam peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa sesuai tugasnya sebagai supervisor ialah mencakup kegiatan atau usaha untuk membangkitkan dan merangsang para kepala sekolah, guru dan pegawai untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan secara khusus tugas dan tanggung jawab pengawas sebagai supervisor yaitu melaksanakan kegiatan berupa: 1) mendiskusikan tujuan-tujuan pendidikan di SD Negeri 071116 Siwalawa dengan guru-guru; 2) mendiskusikan tentang metode-metode dan tehnik-tehnik pembuatan RPP dan penyediaan bahan ajar; 3) membimbing guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran; 4) membimbing guru dalam memilih dan menilai buku-buku perpustakaan sekolah, buku-buku pelajaran untuk peserta didik.

Pengawas dalam melaksanakan peranan utama sebagai supervisor dituntut sebagai peneliti yang dapat mengumpulkan data tentang proses belajar menagajar, menganalisis dan menarik kesimpulan . peranan utama sebagai kepala sekolah sebagai supervisor harus meniliti dalam melakukan observasi kelas yang direncanakan, menjadi pendengar yang baik untuk berbagai masalah yang disampaikan guru-guru kepadanya, dan berusaha untuk selalu mengikuti permasalahan dan gagasan dalam bidang pendidikan khususnya tentang proses belajar mengajar pada SD Negeri 071116 Siwalawa menurut peneliti bahwa peranan pengawas sebagai narasumber dengan bertindak sebagai konsultan dimana guru membutuhkan sebagai fasilitator, penolong, yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesulitan guru dan mencarikan secara bersama. Pandangan tersebut dapat dimengerti bahwa komunikasi antar pribadi, pengawas sebagai supervisor hendaknya menciptakan suatu kondisi dimana guru merasa bebas untuk menyatakan masalahnya kepada supervisor. Dalam kondisi ini para supervisor harus memperlakukan guru-guru sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan, dan hendaknya dapat emotivasi para guru untuk kreatif, inovatif untuk pembaruan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan inovatoif ini dalam melakukan proses pembelajaran di kelas para guru, diharapkan meningkatkan mutu pendidikan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi supervisi pengawas di SD Negeri 071116 Siwalawa yaitu bahwa pengawas mempunyai tiga tugas dan tanggung jawab. a) mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran, b) bertindak sebagai seorang nara sumber, c) memiliki kecakapan dalam melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah, guru, dan staf sekolah serta berupaya mengimplementasikan supervisi pengawas.

2. Strategi Peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa berada dalam kategori baik dimana guru melakukan perencanaan pembelajaran satu bulan sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, meliputi program tahunan, program semester, pemetaan materi, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kriteria ketuntasan minimal (KKM), Rencana program pembelajaran berisi standar kompetensi (SK), kompetensi dasar KD), rencana materi yang diajarkan, metode dan model pembelajaran, serta sumber dan alat yang akan digunakan, rencana pelaksanaan evaluasi, dan alokasi waktu yang digunakan. Dari segi pelaksanaan pembelajaran berpedoman pada rencana program yang telah disusun. Kemudian evaluasi dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan pembelaaran dalam kurun waktu sesuai rencana kegiatan. Peserta didik yang memperoleh nilai diatas KKM di beri pengayaan dan peserta didik dibawah nilai KKM maka diberi remedial.
3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Supervisi Pengawas dalam peningkatan pembelajaran di SD Negeri 071116 Siwalawa, faktor penghambat meliputi; a) pengadaan personil, fasilitas, dan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan program supervisi yang baik; b) pengawas hanya akan melakukan kegiatan supervisi jika dana untuk kegiatan supervisi telah di keluarkan oleh dinas setempat; c) kurangnya pelatihan terhadap pengawas, selain hal tersebut guru tidak terlatih dalam implementasi K13; d) masih ada guru yang tidak memperhatikan RPP, dan e) guru masih belum memahami K13. Sedangkan faktor pendukung meliputi; Supervisi kunjungan kelas yang berkelanjutan, pengawas memberi semangat kerja guru untuk dapat bekerja dengan maksimal.

Daftar Pustaka

Daryanto dan Farid Muhammad, 2013. *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar*. Cet. I; Yogyakarta : Gava Media.

Daryanto dan Rachmawati Tutik, *Supervisi Pembelajaran Inspeksi Meliputi: Controlling, Correcting, Judging, Directing Demonstrasion*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gaya Media,2015), h.5.

Lawrwnce R. Jauch, and William F. Gluek, 1997. *Business Plicy and Strategic managemen,* diterjemahkan oleh Murad dan AR. Henry Sitanggang dengan judul manajemen Strategik dan kebijakan perusahaan. Jakarta: Erlangga.

Nawawi H. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Gunung Agung.

Sahertian Piet A. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujana Nana, 2011. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Cet . II. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan.

Sutisna Oteng, 2013. *Administrasi Pendidikan*, *Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung : Angkasa.

Zainal Aqib, Elham Rohmanto, 2008. *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Cet. I. Bandung: CV.Yrama Widya.

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DAN PENGUASAAN MATERI OPERASI ALJABAR MELALUI LATIHAN MANDIRI BAGI SISWA SMPN 3 LOLOWAU KABUPATEN NIAS SELATAN

Tandrasokhi Halawa, S.Pd., M.Pd.[1]

Abstrak

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan penguasaan materi kelas VIIIA SMP N 3 Lolowau pada materi operasi aljabar. Prosedur penelitian tindakan kelas yang digunakan mengacu pada metodologi action research, yaitu : (1) perencanaan,(2) implementasi tindakan,(3) pengamatan dan evaluasi,(4) refleksi, yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Latihan mandiri merupakan suatu latihan soal dengan cara siswa membuat soal beserta penyelesaiannya setelah mendapat materi dan disertai dengan contoh dan cara menyelesaikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahw latihan mandiri dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi operasi aljabar pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Lolowau.

Kata kunci : *hasil belajar*, *penguasaan materi* dan *latihan mandiri*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Belajar merupakan tanggung jawab setiap siswa dan kualitas hasil belajar tergantung pada kemampuan setiap siswa. Kegiatan belajar di sekolah bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh perubahan tingkah laku dalam rangka untuk mencapai perkembangan yang seoptimal mungkin. Karena pendidikan sangat penting untuk para siswa, agar mereka mampu mengembangkan kretif masing-masing serta bisa menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. Maka para guru wajib membantu agar siswa bisa menyalurkan bakat yang dimiliki (Winkel, 2004: 57).

Kemampuan belajar yang dimiliki manusia, merupakan bekal yang sangat pokok. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakin maju pesat diperlukan langkah-langkah pemikiran serta langkah-langkah yang saling berhubungan dengan tepat dan sungguh-sungguh. Disini pendidikan sangat memegang peranan penting, karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh individu kapan dan di manapun dia berada. Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan manusia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan (Slameto, 2010 : 56).

Tujuan umum pendidikan matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan kreatifitas siswa serta memberi tekanan pada ketrampilan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut di atas diantaranya banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika, mereka beranggapan pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan memuakkan. Kadang-kadang siswa mengikuti pelajaran karena terpaksa harus mengikuti. Maka tidak aneh kalau hasil belajar siswa matematika selalu rendah seperti halnya kelas VIIIA SMP N 3 Lolowau masih banyak yang di bawah KKM (KKM Matematika SMP Negeri 3 Lolowau 75) pada materi operasi aljabar. Dengan mengefektifkan pembelajaran materi Operasi aljabar menggunakan metode latihan, dalam hal ini peneliti mengistilahkan sebagai latihan mandiri diharapkan ada peningkatan dalam penguasaan materi tersebut.

[1] *Jabatan Pengawas Sekolah Madya di SMPN 3 Lolowau, Kecamatan Lolowau*

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan penguasaan materi kelas VIIIA SMP N 3 Lolowau pada materi operasi aljabar.

1.3. Metode Penelitian

Tempat yang peneliti jadikan penelitian tindakan kelas ini adalah SMP Negeri 3 Lolowau, yang berlokasi di Lolowau, dimana tempat ini sekaligus tempat peneliti melaksanakan pengawasan sekolah. Alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah: 1)Lokasinya dekat dengan rumah sehingga mudah dijangkau. 2)

Peneliti saat ini menjadi pengawas di sekolah tersebut sehingga memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan selama empat (4) bulan mulai bulan sampai Januari bulan April 2018. Subyek Penelitian: 1). Siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Lolowau tahun pelajaran 2017/2018. 2). Peneliti sebagai guru bidang studi matematik SMP Negeri 3 Lolowau.

Prosedur Kerja dalam Penelitian: Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Pemberian tindakan pada siklus pertama berdasarkan pada hasil refleksi awal (prasiklus). Berdasarkan refleksi awal dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui tahapan atau prosedur perencanaan, implementasi tindakan, pengamatan dan evaluasi, dan refleksi dalam setiap siklus 1 (Arikunto, 2006 : 2).

Siklus 1: Siklus 1 terdiri dari : a. Perencanaan yang terdiri dari 1) dokumentasi kondisional meliputi daftar nilai dan lembar observasi, 2). Identifikasi masalah, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya hasil belajar siswa, 3). membuat skenario pembelajaran, 4). membuat lembar observasi untuk melihat proses pembelajaran di kelas, 5). menyiapkan rencana pembelajaran dan 6). membuat alat evaluasi untuk mengetahui daya serap hasil belajar siswa. b. Implementasi Tindakan; Pertama diberikan materi operasi aljabar. Kemudian dilakukan tes siklus 1. c. Pengamatan: a). Menyiapkan lembar pengamatan untuk memantau kegiatan siswa selama proses pembelajaran. b). Mengumpulkan data hasil belajar siswa, baik data para siklus, latihan maupun hasil tes siklus 1. d. Refleksi; Dari hasil penelitian di atas dapat dilakukan analisis dengan cara mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Siklus 2: Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 apabila belum ada peningkatan hasil belajar yang diharapkan siklus kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Perencanaan meliputi; 1). Identifikasi masalah 2). Rencana tindakan. Tindakan yang direncanakan adalah melalui latihan mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar. b. Pelaksanaan meliputi: 1). Menyiapkan rencana pembelajaran selanjutnya. 2). Mengevaluasi hasil belajar siswa melalui tes siklus 2. c. Pengamatan: meliputi; 1). Mengkaji kembali hasil dari observasi pada siklus 1. 2). Observasi harus betul-betul mendata kembali hasil observasi pada siklus 1. d. Refleksi: Setelah diadakan penelitian siklus 1 dan siklus 2 diperoleh analisis tentang data-data yang akurat, dari hasil penelitian guru dapat melaksanakannya untuk refleksi apakah hasil penelitian menggunakan metode latihan mandiri dapat diterapkan dalam pembelajaran kepada siswa.

Jenis Data: Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari : a. Hasil latihan mandiri pokok bahasan operasi aljabar 1.b. Hasil tes siklus 1 dan siklus 2, digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. c. Hasil observasi terhadap pelaksanaan atau belajar mengajar.

Cara Pengambilan Data: a. Hasil latihan diperoleh dari penelitian latihan-latihan yang dikerjakan siswa. b. Prestasi belajar diperoleh dari nilai atau skor tes. c. Situasi KBM pada saat dilaksanakan tindakan diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Indikator Keberhasilan: Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah bila kemampuan siswa secara klasikal dalam menguasai materi operasi aljabar dapat mencapai rata-rata kelas ≥ 70.

2. Uraian Teoritis

2.1. Hasil Belajar

Menurut Supratiknya (2012: 5), hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa sesudah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Kemampuan baru yang dimiliki individu adalah hasil dari aktifitas belajar-mengajar untuk tercapainya sebuah tujuan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Susanto (2013: 5), hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Perubahan aspek-aspek tersebut terjadi secara terencana dan cenderung berubah ke arah yang lebih baik.

Menurut Rusman (2012: 123) hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor.Lain lagi dengan pendapat Wasliman (2007 dalam Susanto 2013: 12), hasil belajar peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan baru yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor diperoleh setelah mereka mengikuti proses belajar-mengajar atau hasil dari interaksi.

2.2. Matematika

Dikmenum (2005 dalam Taniredja, Pujiati dan Nyata, 2012: 93) Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Ada juga yang berpendapat matematika adalah suatu bidang studi hidup, yang perlu dipelajari karena hakikat matematika adalah pemahaman terhadap pola perubaha yang terjadi di dalam dunia nyata dan di dalam pikiran manusia serta keterkaitan di antara pola-pola tersebut secara holistic (Jamaris, 2014: 177). Selain itu matematika merupakan cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi, ilmu deduktif tentang keluasan atau pengukuran dan letak, tentang bilangan-bilangan dan hubungan-hubungan, ide-ide, strukturstruktur, dan hubungan yang diatur menurut urutan yang logis, tentang struktur logika mengenai bentuk yang terorganisasi atas susunan besaran dan konsep-konsep mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat akhirnya ke dalil atau teorema, dan terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri (Hamzah dan Muhlisrarini, 2014: 58).

2.2. Penguasaan Materi Aljabar

Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol (biasanya berupa huruf). Sedangkan untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyerdehanaan dan alat bantu memecahkan masalah.

Aljabar merupakan bagian dari kurikulum dalam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan menyediakan landasan-landasan bagi ide-ide dasar untuk aljabar secara keseluruhan, meliputi sifat-sifat penambahan dan perkalian bilangan, konsep variabel, definisi polinom, faktorisasi dan menentukan akar pangkat. Bentuk aljabar yang mempelajari sifat-sifat operasi pada bilangan *real* direkam dalam simbol sebagai konstanta dalam variabel, dan aturan yang membangun ekspresi dan persamaan matematika yang melibatkan simbol-simbol.

Fakta menunjukkan bahwa di antara semua cabang matematika yang diajarkan, aljabar merupakan materi yang sulit dipahami siswa. Hal yang senada juga dinyatakan Yanto bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aljabar masih rendah (Yanto dkk, 2014 : 17).

2.3. Latihan Mandiri

Latihan mandiri dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri untuk menunjukkan apa yang telah siswa pelajari selama bekerja dalam kelompok. Setelah kegiatan presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara individual. Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling membantu. Hasil evaluasi digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai perkembangan kelompok.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Lolowau tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian tindakan di kelas tersebut, dilakukan dalam dua siklus. Dari siklus 1 ke siklus 2 indikator keberhasilan telah tercapai. Indikator keberhasilan dalam penelitian tersebut adalah apabila rata- rata hasil tes ≥ 70. Sebelum diadakan tindakan terlebih dahulu diadakan pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai materi operasi aljabar.

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian (UH) Kondisi Awal

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian (UH) Kondisi Awal

No	Uraian	UH1	UH2
1	Nilai terendah	50	50
2	Nilai tertinggi	80	90
3	Nilai rata-rata	62,50	67,65
4	Rentang nilai	30	40

Distribusi frekuensi nilai ulangan harian kondisi awal dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Nilai Ulangan Harian Kondisi Awal

Interval Nilai	Ulangan Harian 1	Ulangan Harian 2
50 – 59	9	4
60 – 69	14	13
70 – 79	11	13
80 – 89	6	9
90 – 100	0	1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pra siklus 1 sebesar 62,50. Pada tes pra siklus 2 terjadi peningkatan hasil belajar siswa yaitu dengan rata-rata 67,75. Hasil Penelitian Sikius I

Pada siklus 1 guru sudah memberikan tindakan khusus terhadap siswa yaitu dengan melakukan latihan mandiri, walaupun demikian hasil tes siklus 1 belum mengindikasi keberhasilan dari penelitian ini sekalipun ada peningkatan nilai ratarata hasil tesnya.

Hasil Penelitian Siklus II

Siklus 2 dapat dilihat dari hasil latihan mandiri 1 ketrampilan siswa dalam membuat soal maupun menyelesaikannya pada siklus 1 sebesar 84,62 % pada siklus 2 sebesar 92,86 %. Dengan demikian ada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan.

Tabel 3. Hasil Ulangan Harian (UH) Siklus I dan Siklus II

No	Uraian	UH1	UH2
1	Nilai terendah	55	55
2	Nilai tertinggi	90	100
3	Nilai rata-rata	67,50	78,63
4	Rentang nilai	35	45

Distribusi frekuensi nilai ulangan harian siklus I dan II dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Nilai Ulangan Harian Siklus I dan II

Interval Nilai	Ulangan Harian 1	Ulangan Harian 2
51 – 60	13	4
61 – 70	19	10
71 – 80	9	17
81 – 90	3	6
91 – 100	0	3

Dari hasil tes siklus 1 nilai terndah 55, nilai tertinggi 90 dan nilai rata-rata 67,50 sedangkan siklus 2 nilai tertinggi 100, nilai terendah 55 dan nilai rata-rata kelas mencapai 78.63.

4.2. Pembahasan

Dari lembar observer terhadap kemampuan guru dalam mengajar, rata-rata skor pada siklus 1 sebesar 4,64 dan pada siklus 2 sebesar 4,98, sedangkan skor maksimal adalah 5. Kektifitas siswa pada siklus 1 siswa yang aktif sebesar 85,71 % dan pada siklus 2 sebesar 100%.

Hasil refleksi atas pelaksanaan siklus 2 adalah sebagai berikut : keberanian siswa dalam bertanya, mengemukakan pendapat, kreatifitas siswa, pemahaman siswa lebih baik dan menghargai pendapat temannya dalam 1 kelompok yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menghargai pendapat kelompok lain. Siswa lebih percaya diri dan mulai trampil mengerjakan soal-soal, baik soal sebagai tugas rumah maupun soal-soal tes. Indikator keberhasilan telah tercapai ($\geq$ 85%) . Prestasi belajar siswa cukup memuaskan yaitu dari rata-rata kelas 44,30 pada pra siklus 1 dan 63,50 pada pra siklus 2. Prestasi hasil belajar siswa pada siklus 1adalah 67,50 dan

persentase hasil belajar siswa 67,50%, sedangkan prestasi hasil belajar siwa pada siklus 2 adalah 78,63 dan persentase hasil belajar siswa 87,50% Dengan demikian indikator keberhasilan sudah tercapai.

Berdasarkan pembahasan hasil di atas, ternyata latihan mandiri dapat meningkatkan penguasaan materi operasi aljabar pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Lolowau.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan mandiri dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi operasi aljabar pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Lolowau.

4.2. Saran

1. Guru matematika hendaknya secara aktif dan kreatif dapat menggunakan latihan mandiri agar dapat meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi ajar.
2. Tindakan kelas yang diberlakukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bagi guru dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Daftar Pustaka

Ahmad, Susanto. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arikunto Suharsimi, 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hamzah Ali dan Muhlisrarini. 2014. Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jamaris, Martini. 2014. *Kesulitan Belajar Prespekif, Asesmen, dan Penanggulangannya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rusman, 2012. *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru.* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supratiknya, A. 2012. *Penilaian Hasil Belajar Dengan Teknik Nontes*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Taniredja, T., Pujiati, I. dan Nyata. 2012. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Alfabeta.

Winkel, W. S. 2004. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yanto, Hidayat Dwi, Nila Kurniasih, and Prasetyo Budi Darmono, 2014. "*Eksperimentasi Model Pembelajaran Make A Match Dan Inside Outside Circle Pada Materi Bentuk Aljabar Siswa Kelas VIII*", EKUIVALEN-Pendidikan Matematika.

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA

Peringatan Harefa, S.E, M.M[1]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif dan tunjangan terhadap produkvitas kerja. Penelitian ini dilaksanakan pada STIE Pembangunan Nasional, Nias. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan STIE Pembangunan Nias Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai STIE Pembangunan Nasional yang berjumlah 30 orang. Dengan jumlah populasi yang sedikit yaitu ≤ 30 orang maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif dan tunjangan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas. Secara parsial menunjukkan bahwa insentif dan tunjangan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap produktivitas.

Kata kunci : *insentif*, *tunjangan* dan *produktivitas*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan memberikan insentif dan tunjangan. Pemberian insentif dan tunjangan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang dapat dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa pada perusahaan (Mangkunegara, 2006).

Pada dasarnya pemberian insentif senantiasa dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan serta telah disetujui bersama. Insentif memberikan penghargaan dalam bentuk pendapatan ekstra untuk usaha ekstra yang dihasilkan (Rivai, 2009).

Pengaturan insentif harus ditetapkan dengan cermat dan tepat serta harus dikaitkan secara erat dengan tujuan-tujuan perusahaan yang bersangkutan. Jumlah insentif yang diberikan kepada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu, sesuai dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata. Rumus pembagian insentif ditetapkan secara adil sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran (output) kerja dan meningkatkan keinginan kuat untuk mencapai tambahan penghasilan serta dapat menguntungkan semua pihak (Mangkunegara, 2006).

Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok (Panggabean, 2002).

Tunjangan karyawan merupakan program pelayanan karyawan untuk membentuk dan memelihara semangat karyawan, yaitu sejumlah ganjaran yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan anggota keluarganya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Premis dasar dari setiap program tunjangan kesejahteraan adalah bahwa karyawan menghargai uang

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

dan ingin bekerja demi uang tambahan guna memperoleh kesejahteraan hidup. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa uang merupakan motivasi yang paling kuat, maka perusahaan harus melakukan beberapa hal yang dapat produktivitas kerja karyawan. Tujuannya adalah mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, banyak perusahaan yang menganut sistem tunjangan kesejahteraan yang mencakup seluruh aspek-aspek yang diinginkan perusahaan dan yang diharapkan oleh karyawan sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi para karyawan (Panggabean, 2002).

Menurut Siagian (2002) Produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin yang maksimal. Hal ini sependapat dengan Sumarso (2003: 63) bahwa produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari suatu tenaga kerja, mesin, atau faktor-faktor produksi lainnya yang dihitung berdasarkan waktu rata-rata dari tenaga kerja tersebut dalam proses produksi. Agar tidak terjadi penurunan hasil produksi pada suatu perusahaan diperlukannya kestabilan produktivitas kerja oleh karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis teratarik melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian insentif dan tunjangan terhadap produktivitas kerja.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif dan tunjangan terhadap produkvitas kerja.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada STIE Pembangunan Nasional, Nias. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan STIE Pembangunan Nias Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai STIE Pembangunan Nasional yang berjumlah 30 orang. Dengan jumlah populasi yang sedikit yaitu ≤ 30 orang maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh insentif dan tunjangan terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan uji regresi linier berganda yang didukung dengan program SPSS versi 19 for windows. Adapun rumus *Regression Analysis* adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + ei$$

Keterangan :

Y : Variabel produktivitas

b_1 : Koefisien regresi insentif

b_2 : Koefisien regresi tunjangan

X_1 : Insentif

X_2 : Tunjangan

a : Bilangan konstan

ei : Variabel gangguan

2. Uraian Teoritis

2.1. Insentif

Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan) (Mangkunegara, 2006). Harsono (1987) berpendapat, insentif adalah setiap sistem kompensasi dimana jumlah yang diberikan tergantung pada hasil yang dicapai, yang berarti menawarkan sesuatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dari pengertian insentif di atas, dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan salah satu bentuk rangsangan yang sengaja diberikan oleh perusahaan kepada segenap pekerjanya agar para pekerja tersebut termotivasi dan mau bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Menurut Gorda (2004) pemberian insentif atau upah perangsang bertujuan:

1. Memberikan balas jasa yang berbeda dikarenakan hasil kerja yang berbeda.
2. Mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Dalam melakukan tugasnya, seorang pemimpin selalu membutuhkan bawahannya untuk melaksanakan rencana-rencananya.
5. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah penghasilan karyawan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
6. Mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan

Insentif dapat diukur melalui beberapa bentuk baik berupa benda ataupun non-benda. Menurut Koontz (1986) insentif dapat diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu: berupa uang, lingkungan kerja yang baik, dan partisipasi.

2.2. Tunjangan

Menurut Nawawi (2011: 56) tunjangan adalah pendapatan tambahan selain gaji yang diterima seorang karyawan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kendaraan, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan telepon, tunjangan istri, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Tunjangan adalah pembayaran (*payment*) dan jasa yang melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini (Kartika dalam Simamora, 2004).

Menurut Wibowo (2010) di samping upah dan gaji serta insentif, kepada karyawan dapat diberikan benefits atau tunjangan. Program Tunjangan (*Benefits programs*) adalah kompensasi lain di luar gaji dan upah. Bentuk kompensasinya dapat berupa retirement plan atau cafetaria benefits plan. Retirement plans merupakan rencana pensiun pekerja. Metodenya bisa berbeda-beda. Bentuknya dapat berupa menghimpun potongan gaji, kombinasi cadangan dana perusahaan, menghubungkan dana pensiun dengan asuransi, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara bulanan, dibayarkan sekaligus atau kombinasi di antara keduanya.

Sementara itu, *cafetaria benefit plans* merupakan suatu rencana pemberian kompensasi tambahan dengan menetapkan jumlah batas jumlah tertentu pekerja, tetapi mereka boleh memilih variasi dari bentuknya.

Tujuan variasi ini adalah memberi fleksibilitas kepada pekerja untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula biaya pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain bekerja sama dengan perusahaan asuransi (Wibowo, 2010).

Menurut Simamora (2004) tunjangan digunakan untuk membantu organisasi memenuhi satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut:

1. Meningkatkan moral karyawan.
2. Memotivasi karyawan.
3. Meningkatkan kepuasan kerja.
4. Memikat karyawan-karyawan baru.
5. Mengurangi perputaran karyawan.
6. Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan.
7. Meningkatkan keamanan karyawan.
8. Mempertahankan posisi yang menguntungkan.
9. Meningkatkan citra perusahaan dikalangan karyawan.

Menurut Rucky (2002) terdapat alat ukur dalam pemberian tunjangan kepada karyawan, yaitu:

1. Tunjangan Tunai Tunjangan (di perusahaan asing disebut "*allowance*") adalah segala pembayaran tambahan oleh pengusaha kepada karyawan berupa tunai dan diberikan a) secara rutin atau b) secara periodik. a) secara teratur (rutin) artinya tanpa dikaitkan dengan persyaratan tertentu, misal kehadiran.sedangkan secara priodik artinya tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat tertentu dan biasanya dikaitkan dengan kehadiran karyawan.Fungsi atau tujuan sebenarnya adalah sebagai suplemen (tambahan) dari gaji atau upah.
2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau lebih terkenal dengan istilah THR sebenarnya adalah suplemen dari gaji atau upah juga yang tidak diberikan pada tiap tanggal gajian, tetapi biasanya menjelang Hari Raya Keagamaan (Rucky, 2002).
3. Transportasi Karyawan Untuk perusahaan yang berkantor di pusat kota, misalnya dikawasan bisnis dan perkantoran, sudah tidak menjadi mode lagi untuk menyediakan antar jemput karyawan dengan kendaraan perusahaan. Penyebab utama adalah begitu tersebarnya tempat tinggal karyawan sehingga apabila harus dijemput akan memerlukan kendaraan dalam jumlah besar yang mungkin hanya diisi 2 atau 3 orang dan akhirnya berdampak besar pada biaya operasional atau sewa dan parkir. Karena itu, akan lebih menguntungkan dari segala sudut bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan transportasi berupa uang atau sama sekali memasukannya ke dalam gaji (Rucky, 2002)

2.3. Produktivitas

Menurut Yin Kimsean (2011) produktivitas merupakan sikap dan perilaku tenaga kerja dalam perusahaan terhadap peraturan-peraturan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh perusahaan yang telah diwujudkan baik dalam bentuk tingkah laku maupun perbuatan.

Sedangkan menurut Sumarso (2003) produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari suatu tenaga kerja, mesin, atau faktor-faktor produksi lainnya yang dihitung berdasarkan waktu rata-rata dari tenaga kerja tersebut dalam proses produksi.

Berdasarkan pengertian-pengertian produktivitas di atas, maka dapat diketahui pengertian produktivitas yaitu rasio antara produksi yang dapat dihasilkan dengan keseluruhan kepuasan yang dapat diperoleh dengan pengorbanan yang diberikan, namun tidak hanya mencakup perbandingan output dan inputnya saja tetapi juga pada sikap dan tingkah laku tenaga kerjanya, karena tidak semua produktivitas dapat diukur dengan output dan inputnya.

Ada banyak indikator dalam produktivitas kerja. Menurut Yin Kimsean (2011) indikator produktivitas tenaga kerja sebagai berikut :

1) Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas.
2) Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai.
3) Sikap semangat kerja lebih baik dari hari sebelumnya.
4) Berupaya untuk mengembangkan diri untuk berperilaku lebih baik.
5) Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja.
6) Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu.
7) Perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya masukan yang dipergunakan.
8) Terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualiatas kehidupan.
9) Melakukan kegiatan-kegiatan analisis secara kualitatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi birokrasi.

Bagi perusahaan ataupun sebuah organisasi, nilai seperti produktivitas merupakan salah satu unsur yang penting didalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang harus diperhatikan oleh para pimpinan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Pengujian regresi linear berganda menjelaskan besarnya peranan insentif dan tunjangan terhadap produktivitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.244	2.903		1.118	.274
	Insentif	.283	.109	.403	2.590	.015
	Tunjangan	.541	.162	.521	3.346	.002

a. Dependent Variable: Produktivitas

Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi linier berganda yang mempunyai formulasi : $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$, sehingga diperoleh persamaan : $Y = 3{,}244 + 0{,}283\ X_1 + 0{,}541\ X_2$ dengan estimasi simpangan baku peramalan sebesar 3,389.

Deskripsi dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

b_0 : 3,244

Bilangan konstanta (b_0) sebesar 3,244 menunjukkan besarnya produktivitas apabila insentif dan tunjangan sama dengan 0.

b_1 : 0,283

Koefisien regresi pertama (b_1) sebesar 0,283 menunjukkan besarnya peranan insentif terhadap produktivitas dengan asumsi tunjangan konstan. Artinya apabila faktor insentif meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi produktivitas meningkat sebesar 0,283 satuan nilai dengan asumsi tunjangan konstan.

b_2 : 0,541

Koefisien regresi kedua (b_2) sebesar 0,541 menunjukkan besarnya peranan tunjangan terhadap produktivitas dengan asumsi insentif konstan. Artinya apabila faktor tunjangan meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi produktivitas meningkat sebesar 0,541 satuan nilai dengan asumsi insentif konstan.

Untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi seara simultan dilakukan uji F. Uji ini bertujuan untuk menguji signifikannya peranan insentif dan tunjangan secara simultan terhadap produktivitas. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1059.999	2	529.999	46.136	.000[a]
	Residual	310.168	27	11.488		
	Total	1370.167	29			

a. Predictors: (Constant), Tunjangan, Insentif

b. Dependent Variable: Produktivitas

Berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa secara simultan insentif dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan nilai F-hitung sebesar 46,136 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Berdasarkan analisis koefisien determinasi parsial di atas diketahui bahwa pengaruh insentif lebih besar dibandingkan dengan tunjangan terhadap produktivitas, oleh karena itu untuk menguji kebenarannya digunakan uji hipotesis parsial atau uji-t.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis parsial dilakukan pada setiap variabel indepenen seperti pada Tabel 1 maka dapat dijelaskan.

1). Uji hipotesis peran insentif terhadap produktivitas.

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, insentif tidak berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas.

H_1: $b_1 \neq 0$ artinya, insentif berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas.

b. Uji Hipotesis

Bila tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya insentif berpengaruh secara signifikan meningkatkan produktivitas dan apabila tingkat signifikansi $t_{hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya insentif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 2,590.

d. Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi insentif sebesar 0,015 < 0,05. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t_{hitung} (0,015) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya insentif berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas.

2). Uji hipotesis pengaruh tunjangan terhadap produktivitas.

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, tunjangan tidak mempunyai pengaruh meningkatkan produktivitas.

H_1: $b_1 \neq 0$ artinya, tunjangan mempunyai pengaruh meningkatkan produktivitas.

b. Uji Hipotesis

Bila nilai signifikan $t_{hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya tunjangan mempunyai pengaruh signifikan meningkatkan produktivitas dan apabila nilai signifikan $t_{hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tunjangan tidak mempunyai pengaruh signifikan meningkatkan produktivitas.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 3,346.

d. Dengan α= 5%, diperoleh nilai sinfikansi t_{tabel} sebesar 0,000. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t_{hitung} (0,002) < 0,005, maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya tunjangan memiliki pengaruh signifikan meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa insentif dan tunjangan mempunyai pengaruh yang signifikan meningkatkan produktivitas.

Koefisien deteriminasi parsial digunakan untuk mengetahui sumbangan insentif dan tunjangan terhadap naik turunnya produktivitas, sehingga akan diketahui salah satu variabel yang dominan.

Nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah pada kolom *adjusted R square*. Hal tersebut dikarenakan nilai *adjusted R square* tidak rentan pada penambahan variabel bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880[a]	.774	.757	3.38935

a. Predictors: (Constant), Tunjangan, Insentif

Besarnya nilai pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien adjusted R square sebesar 0,774 atau 77,40 % yaitu persentase pengaruh insentif (X_1) dan tunjangan (X_2) terhadap produktivitas (Y) adalah sebesar

77,40 %. Sedangkan sisanya sebesar 32,60% (100% - 77,40%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

3.2. Pembahasan

1. Pengaruh Insentif terhadap Produktivitas Karyawan

Hasil uji t menunjukkan bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Semakin tinggi insentif yang diberikan maka produktivitas karyawan akan semakin meningkat. Menurut Rivai (2009) insentif sebagai alat untuk memotivasi para pekerja guna mencapai tujuan organisasi yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang berorientasi pada hasil kerja.

Pada penelitian ini, berdasarkan teori sebelumnya ketika perusahaan memberikan insentif kepada karyawan maka karyawan merasa lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Pemberian insentif tersebut sesuai dengan prestasi kerja yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan. Semakin tinggi insentif bagi karyawan maka semakin tinggi kinerja karyawan, sebaliknya semakin rendah insentif maka semakin rendah pula produktivitas karyawan.

2. Pengaruh Tunjangan terhadap Produktivitas Karyawan

Hasil uji t menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Menurut (Mangkunegara, 2006) kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja. Perusahaan yang menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini karena motivasi kerja karyawan banyak dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. Pada penelitian ini, berdasarkan teori sebelumnya bahwa pemberian tunjangan kepada karyawan diharapkan mampu untuk memberikan dorongan agar lebih giat lagi dalam bekerja. Perusahaan dalam memberikan tunjangan ,semakin tinggi tunjangan yang diberikan maka produktivitas karyawan semakin meningkat. Oleh karena itu pemberian tunjangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan

3. Pengaruh Insentif dan Tunjangan terhadap Produktivitas

Hasil uji F menunjukkan bahwa komptensi dan tunjangan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Hal ini berarti bahwa secara serempak insentif dan tunjangan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Insentif dan tunjangan dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. Pemberian tunjangan diberikan pada periode tertentu dan setiap harinya. Oleh karena itu tunjangan dirasakan lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif dan tunjangan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa insentif dan tunjangan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap produktivitas.

4.2. Saran

1. Perusahaan harus mempertimbangkan memberikan insentif sesuai dengan tingkat produktivitas karyawan.
2. Disarankan dalam pemberian tunjangan selalu memperhatikan waktu pemberian tunjangan tersebut agar lebih bermanfaat bagi karyawan.

Daftar Pustaka

Gorda, IGN. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit STIE Satya Dharma Singaraja.

Harsono. 1987. *Manajemen Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Aksara Ghalia Indonesia.

Kimsean, Y. 2011. *Produktivitas Kerja Pegawai Pada Birokrasi*. Yogyakarta: Gava Media

Koontz, Harold & Cyril O"Donnel & Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Jilid 2. Terjemahan: Gunawan Hutauruk. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Panggabean S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Rucky, Achmad S. 2002. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, P. Sondang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: STIE YKPN.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PERAN PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI SD NEGERI 076682 HILIMBOWO

Aluizaro Zega, S.Pd.SD.[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawas sekolah terhadap peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 076682 Hilimbowo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Peneliti ini mengkaji tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial yang dimiliki oleh pengawas sekolah yang diterapkan dalam peningkatan kompetensi guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dan menguraikan secara deskriptif mengenai peran pengawas dalam supervisi akademik dan supervisi manajerial di SD Negeri 076682. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik pengawas sekolah belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau dan membimbing guru sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang akademik belum efektif. Supervisi manajerial pengawas sekolah belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau dan membimbing kepala sekolah sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang manajerial belum efektif.

Kata kunci : *pengawas sekolah* dan *komptensi guru*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka isu utamanya adalah pembangunan pendidikan dalam segala aspek. Salah satu isu peningkatan kualitas pendidikan adalah efektifitas pembelajaran oleh guru profesional (Mulyasa, 2008:136) "Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik membutuhkan peningkatan profesional secara berkesinambungan dan terus menerus".

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, "pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia".

Peningkatan kualitas guru pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang berorientasi pada pencerdasan, keterampilan, kecakapan, dan kesehatan lahir batin. Tinggi rendahnya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kependidikan yang mengolah pendidikan tersebut. Kualitas kemampuan guru yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Peran seorang guru sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut melalui hasil belajar yang diperoleh siswa.

Peningkatan kualitas guru harus ditopang dengan pengelolaan dan pengawas dengan baik oleh pengawas sekolah. Dalam organisasi sekolah pengawas sekolah dan kepalah sekolah merupakan suatu integral dimana kegiatan suatu organisasi sekolah dapat berjalan dengan lancar maka pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan fungsinya masing-masing.

---

[1] *Pengawas Sekolah*

Di beberapa SD di Kecamatan Tuhemberua sebagian guru kurang berkompetensi dalam melaksanakan pengajaran karena kurangnya motivasi dari pengawas bidang studi. Kenyataan yang terjadi di lapangan masih ada kepala sekolah dan guru yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya serta kompetensi yang harus dimilikinya sesuai dengan Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang "kompotensi kepala sekolah" dan Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru". Untuk itu, peneliti ingin melihat peran pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk malakukan penelitian dengan judul: "Peran Pengawas Sekolah terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di SD Negeri 076682 Hilimbowo"

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawas sekolah terhadap peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 076682 Hilimbowo.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Peneliti ini mengkaji tentang supervisi akademik dan supervisi manajerial yang dimiliki oleh pengawas sekolah yang diterapkan dalam peningkatan kompetensi guru.

Peran pengawas sekolah terhadap peningkatan kompetensi guru SD Negeri 076682 Hilimbowo, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias ialah suatu bentuk perilaku seorang pengawas dalam menerapkan peran yang dimiliki oleh pengawas-pengawas yang mengawas dalam peningkatan kompetensi guru di SD Negeri 076682 Hilimbowo.

Penentuan informan pada penelitian ini diambil dari subjek atau sasaran penelitian yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Objek dalam penelitian ini yaitu pengawas-pengawas yang ada di SD Negeri 076682 sebanyak 6 orang, guru 7 orang dan 1 kepala sekolah.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu mengamati cara supervisi pengawas dan penerapan supervisi yang dimiliki oleh pengawas. Dalam hal ini, peran yang dimaksud adalah supervisi akademik dan supervisi manajerial yang sangat jelas peranannya dalam peningkatan kompetensi guru.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dan menguraikan secara deskriptif mengenai peran pengawas dalam supervisi akademik dan supervisi manajerial di SD Negeri 076682. Peran tersebut harus mampu diterapkan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan kompetensi guru.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah merupakan jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pasal 1 ayat 2 "menyebutkan pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (guru) yang diberi tugas dan tanggung

jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakasanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan".

Tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan: pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 55 dituliskan pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Lebih jelas tentang kewajiban supervisi pada pasal 57 yaitu supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan.

Danim (2010:154) mengatakan : Supervisi adalah sebagai upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran dengan jalan meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru melalui bimbingan profesional oleh pengawas sekolah. Supervisi adalah proses kerja supervisor dalam mendiagnosis, menentukan fokus, melakukan bimbingan profesional, dan menilai penigkatan profesionalitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai penigkatan profesionalitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik secara individual maupun secara kolektif. Supervisi adalah proses bimbingan profesional untuk meningkatkan derajat profesionalitas guru bagi peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran, khususnya prestasi belajar siswa.

Dalam bahasa dan praktek keseharian di lingkungan institusi pendidikan, kata supervisi juga bermakna pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Kegiatan supervisor tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan melainkan lebih banyak mengandung unsur pembinaan keprofesionalan guru, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekuranganya, untuk dapat diberitahu bagian mana yang perlu diperbaiki.

Secara sematik supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan kearah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Dengan rumusan yang sedikit berbeda. Sejalan dengan uraian sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 mengatakan bahwa : Kompetensi pengawas, dinyatakan bahwa pengawas sekolah professional harus memiliki 6 kompetensi yakni: kompetensi internal meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi penelitian dan pengembangan profesionalisme. Sedangkan kompetensi eksternal meliputi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik dan evaluasi pendidikan(tugas pengawasan). Dalam menjalankan pengawasan yang fungsinya sebagai supervisor, seseorang pengawas harus menjalankan dua macam sepervisi yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial pada dasarnya melakukan pembinaan atau bimbingan kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dealam meningkatkan mutu pendidikan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP serta penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan. Supervisi akademik erat kaitannya dengan melakukan pembinaan guru atau

pembimbing guru, pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompotensi kelulusan dan standar proses, serta penilaian kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas belajar siswa.

2.2. Kompetensi Guru

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke dan Stone dalam Mulyasa (2008:25) mengemukakan bahwa "Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti" Sementara Carles dalam Mulyasa (2008:25) mengemukakan bahwa "Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan".

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam Mulyasa (2008:25) merumuskan defenisi "Kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilainilai dasar yang firefleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak". Oleh karena itu kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan berwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 10 tentang guru dan dosen "Kompetensi dalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya''. Kompetensi yang diartikan pemilikan, penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut jabatan seseorang, maka seorang guru harus menguasai kompetensi guru, sehingga dapat melaksanakan kewenangan profesionalnya.

Dari uraian di atas, kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Depdiknas tahun 2004 dalam Mulyasa (2008:32) mengemukakan bahwa : Guru dalam era globalisasi memiliki tugas dan fungsi yang lebih kompleks, sehingga perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang standar. Kompetensi guru lebih bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang guru yang terkait dengan profesinya yang dapat direpresentasikan dalam amalan dan kinerja guru dalam mengelolah pembelajaran. Kompetensi ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualifikasi dan profesionalitas gur pada suatu jenjang dan jenis pendidikan.

Peranan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana supervisor, motivator dan konselor.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru SD Negeri 076682 Hilimbowo

Untuk menjadi seorang pengawas yang profesional tentunya harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam proses kepengawasan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang akademik maupun manajerial. Salah satu tugas pengawas sekolah adalah supervisi akademik yang diterapkan pada guru dalam proses pengawasan serta membina guru dalam menerapkan pembelajaran kepada siswa dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk menjadi seorang pengawas, telah mengetahui arti penting dari supervisi itu sendri karena dengan supervisi akan dapat menentukan kompetensi guru binaan yang mereka hadapi. Pada dasarnya pengetahuan mengenai supervisi merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pengawas. Supervisi akademik adalah yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

a. Membina Guru

Selanjutnya, mengenai pembinaan guru oleh pengawas sekolah akan lebih menguatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan seorang guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Seorang pengawas dalam tugasnya membangun, mendirikan, mengusahakan dalam proses pembinaan guru pada tujuan pembelajaran.

Selain itu membina guru juga merupakan bagian yang mesti diketahui oleh pengawas sekolah. Membina guru dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa membina guru dapat dilakukan dengan membimbing guru tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini pengawas belum maksimal dalam membina guru karena pembinaan kepada guru tentang kelemahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pembinaan guru di SD Negeri 076682 Hilimbowo belum berjalan dan belum efektif.

b. Pemantauan Pelaksanaan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan

Dalam kegiatan pemantauan seorang pengawas mengamati, mengatur, mengontrol guru dalam proses pembelajaran sehingga dalam mencapai tujuan pendidikan tercapai. Berdasarkan hasil observasi dapat dikatakan bahwa bentuk pelaksanaan dengan cara melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan menyusun administrasi perencanaan pembelajaran, melakukan mendampingan dalam kemampuan proses pelaksanaan bimbingan atau pembelajaran, melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan hasil belajar peserta didik, melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan menggunakan media dan sumber belajar. Penilaian kinerja guru antara lain merencanakan pembelajaran, melksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Pelaksanaan pemantaun kinerja guru dilakukan dengan membagikan berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja guru yaitu skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku dalam suatu kategori yang memiliki makna atau nilai dan observasi teknik pengumpulan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang alami maupun situasi buatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pemantauan kinerja guru SD 076682 Hilimbowo belum berjalan dengan baik dan belum efektif.

c. Standar Penilaian Kinerja Guru

Pada proses kepengawan belajar mengajar berlangsung seorang pengawas harus mampu menjalankan tahap dimana seorang guru bisa menerapkan dengan baik kepada siswanya seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan, menilai dan membimbing peserta didik. Berikut dipaparkan beberapa hasil wawancara dari beberapa informan mengenai standar penilaian kinerja guru.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan penilaian kinerja guru dengan cara monitoring dan evaluasi dengan mengontrol dan mengecek sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai.

Beberapa guru menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan dan meningkatkan kemampuan menyusun administrasi pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan kemampuan menggunakan media pembelajaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa standar penilaian kinerja guru SD 076682 Hilimbowo sudah berjalan tetapi belum efektif.

d. Membimbing dan Melatih Profesional Guru

Didalam proses pengawasan seorang guru di bimbing oleh pengawas, memberikan petunjuk, memberikan penjelasan bagaimana menjadi guru yang baik dan profesional. Berikut dipaparkan beberapa hasil wawancara dari beberapa informan mengenai membimbing dan melatih profesional guru. Dari hasil observasi diketahui bahwa : "Membimbing dan melatih profesional guru adalah membimbing guru dalam mengelola pembelajaran, kemampuan dalam mengelola pembelajaran didukung oleh penguasaan materi pembelajaran, pengelolaan kelas, strategi mengajar maupun metode mengajar dan penggunaan media".

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa membimbing dan melatih profesional guru SD 076682 Hilimbowo belum berjalan dan belum efektif.

3.1.2. Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah terhadap Peningkatan Kompetensi Guru SD 076682 Hilimbowo

Supervisi manajerial merupakan merupakan supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi sumber daya pendidik dan kependidikan.

a. Membina Kepala Sekolah

Membina adalah membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik. Dalam hal ini pengawas membina kepala sekolah dalam mengola sekolah dengan baik menciptakan pendidik yang baik dan generasi yang terdidik. Berikut dipaparkan hasil wawancara dari beberapa informan mengenai supervisi manajerial.

Dari hasil observasi diketahui bahwa bentuk pembinaan terhadap kepala sekolah yaitu membimbing kepala sekolah menyusun RKS baik baik rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Membimbing kepala sekolah dan menyusun RKS seperti dari mana sumber dananya, pembiayaan atau pengeluaran di sekolah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa membina kepala sekolah SD 076682 Hilimbowo belum berjalan dan belum efektif.

b. Memantau Pelaksanaan Sarana dan Pengelolaan Prasarana Serta Standar Pembelajaran

Memantau adalah mengamati, mengatur, mengontrol. Didalam proses pembelajaran pengawas bertugas untuk mengontrol guru dan kepala sekolah pada pelaksanaan sarana dan pengelolaan prasarana serta standar pembelajaran. Pengawas bertugas mengontrol guru pada pengelolaan kelas pada saat pembelajaran, pengelolaan waktu pada saat mengajar, kesesuaian waktu dan materi yang disampaikan dan mengecek administrasi nilai siswa. Sedangkan pada kepala sekolah pengawas memantau sarana dan prasarana sekolah.

Dari hasil observasi diketahui bahwa : “Didalam pengelolaan kelas, pengelolaan waktu guru pada saat mengajar dan administrasi nilai siswa. Saya sekedar mengingatkan cara mengajar dengan baik, penguasaan kelas dan bagaimana supaya semua siswa bisa mencapai nilai KKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa memantau pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah SD 076682 Hilimbowo belum berjalan dan belum efektif.

c. Menilai Kinerja

Menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu terhadap sesuatu. Pengawas mempunyai tugas menilai kinerja pada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi bahwa : cara menilai kinerja kepala sekolah adalah dengan melihat semua yang sudah dia perbuat di sekolah kemudian saya pergunakan instrumen penilaiannkinerja untuk diisi dengan teknik wawancara langsung dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

d. Membimbing dan Melatih Profesional Kepala Sekolah

Membimbing adalah memberi petunjuk, memberi penjelasan, memberi pelajaran. Pengawas mempunyai kewajiban memberikan arahan, petunjuk, pelajaran kepada kepala sekolah didalam pengelolaan sekolah, bagaimana cara meningkatkan akreditasi sekolah, meningkatkan kompetensi guru, menyusun program sekolah berdasarkan SNP.

Berdasarkan hasil observasi bahwa membimbing dan melatih profesional kepala sekolah adalah dengana cara pengawas dan kepala sekolah bersama-sama memilki tanggung jawab terhadap perkembangan kepala sekolah. Pengawas memberikan motivasi tentang peran kepala sekolah tentang musyawarah kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, dan pusat kegiatan kepala sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa membimbing dan melatih profesional kepala sekolah SD 076682 Hilimbowo belum berjalan dan belum efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa supervisi manajerial pengawas sekolah SD 076682 Hilimbowo belum efektif, serta dalam peningkatan kompetensi guru masih sangat jauh dari harapan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru

Supervisi akademik pengawas merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Pengawas yang dapat menjalankan semua yang mencakup di dalam supervisi akademik dengan baik, tentunya kompetensi guru juga bisa baik. Pada dasarnya pengawas dikatakan berkompoten apabila dapat melaksanakan proses kepengawasan dengan baik sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan penjelasan di atas tidak sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Pengawas sekolah SD 076682 Hilimbowo belum efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Depdiknas (2006:107-109) Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Adapun di SD 076682 Hilimbowo pengawas belum menerapkan secara efektif mengenai aspek pembinaan dan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Di bidang kepengawasan akademik. Melalui pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pembimbing untuk mencapai tujuan pendidikan dengan pengelolaan interaksi belajar mengajar Djamarah (2010: 12) menyatakan bahwa belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Tujuan adalah sebagai pedoman kearah mana akan dibawa proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan berhasil bila hasilnya mampu membawa perubahan dalam pengetahuan,keterampilan dan nilai sikap dalam diri.

Terlepas dari landasan di atas pengawas juga harus mampu memahami karakter dari setiap guru binaan. Seseorang pengawas sebaiknya tidak memiliki sifat diskriminasi terhadap guru. Untuk itu pengawas harus mempunyai cara atau metode untuk dapat mengetahui karakter dari setiap guru binaan. Berdasarkan cara pengawas dalam menjalankan tugas supervisi akademiknya yaitu dengan cara membina, memantau, membimbing, melatih profesional dan menilai kinerja guru. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru. Adapun di dalam supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan membimbing di sekolah. Pemantauan pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Penilaian kinerja guru seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih. Supervisi akademik pengawas sekolah terhadap peningkatan kompetensi guru SD 076682 Hilimbowo belum efektif dilihat dari indikator pengawas dalam bidang akademik diantaranya membina guru, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian kinerja guru, membimbing dan melatih profesional guru belum diterapkan dengan baik kepada guru-guru diantaranya kurangnya bimbingan,

pelatihan, dan binaan dari pengawas sekolah. Hal di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru SD 076682 Hilimbowo di bidang akademik belum efektif.

Bebagai cara pengawas meningkatkan kompetensi guru utamanya dari hal supervisi akademik dan supervisi manajerial yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru meskipun masih banyak hal yang tidak dilaksanakan oleh seorang pengawas. Berdasarkan hasil penelitian didukung oleh pernyataanpernyataan guru yang menjadi pengawasan di sekolah tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang ideal.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pengawas di SD 076682 Hilimbowo belum mampu meningkatkan kompetensi guru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik pengawas terhadap peningkatan kompetensi guru belum efektif.

3.2.2. Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru

Salah satu tugas dari pada pengawas sekolah adalah supervisi manajerial, supervisi manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah.

Seperti pengelolaan kelas di SD 076682 Hilimbowo tidak diterapkan dengan baik melainkan guru hanya melatih, menghayati, memahami dan mengolah materi yang disajikan.Tidak melakukan pengolaan kelas seperti roling tempat duduk siswa supaya siswa tidak terpaku berdasarkan tempat duduk mereka. Hal ini yang menjadi kekurangan guru dalam mengola kelas karena kurangnya binaan dan bimbingan dari pengawas sekolah mengenai penerapan supervisi manajerial, kemudian pada pengelolaan waktu guru menyesuaikan jam pelajaran dan materi yang dibahas dan administrasi nilai siswa sesuai dengan jurnal nilai siswa seperti nilai harian, nilai kelompok, dan nilai ulangan ini sudah diterapkan dengan baik oleh guru.

Berdasarkan Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang supervisi manajerial pada dasarnya melakukan pembinaan atau bimbingan kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendididkan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP serta penilaian kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan. Pernyataan di atas tidak sesuai dengan yang terjadi di SD 076682 Hilimbowo karena pengawas di sekolah ini tidak menerapkan dengan baik tugasnya sebagai seorang pengawas yaitu membimbing dan membina dalam bidang manajerial.

Berdasarkan cara pengawas dalam menjalankan tugas supervisi manajerialnya yaitu dengan cara membina kepala sekolah, memantau, membimbing, melatih profesional dan menilai kinerja kepala sekolah. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru.

Supervisi manajerial pengawas sekolah terhadap peningkatan kompetensi SD 076682 Hilimbowo belum efektif, dilihat dari indikator pengawas dalam bidang manajerial diantaranya membina kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar pengelolaan sarana dan prasarana, standar pembelajaran, menilai kinerja kepala sekolah, membimbing dan melatih profesional kepala sekolah, belum diterapkan dengan baik kepada kepala sekolah dan guru-guru diantaranya kurangnya bimbingan, pelatihan, dan binaan dari pengawas sekolah.

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi SD 076682 Hilimbowo di bidang manajerial belum efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran pengawas mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mengelola struktur pendidikan untuk menciptakan kompetensi guru yang baik, keberhasilan yang kemudian akan dicapai oleh pengawas dan guru sangat bergantung pada bagaimana struktur dan fungsi dijalankan oleh seorang pengawas dan guru.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengawas berada dalam kategori belum efektif baik dibidang akademik maupun manajerial. Asumsi dasar teori struktural fungsionalisme adalah setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya apabila tidak fungsional maka struktur itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak ada. Jika kita melihat seorang pengawas merupakan struktur dalam sitem pendidikan fungsional terhadap kepala sekolah dan guru karena seorang pengawas merupakan pemimpin atau atasan di dalam dunia pendidikan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Supervisi akademik pengawas sekolah belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau dan membimbing guru sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang akademik belum efektif
2. Supervisi manajerial pengawas sekolah belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau dan membimbing kepala sekolah sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang manajerial belum efektif.

4.2. Saran

1. Dalam proses supervisi akademik dan manajerial seorang pengawas harus menjalankan tugasnya sesuai kewajiban pengawas yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Agar dapat meningkatkan kompetensi guru, pengawas harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik di bidang akademik maupun manajerial.

Daftar Pustaka

Abimanyu, Soli. 2010. Pengembangan Profesionalisme Guru. Makassar: Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Rayon 24 UNM.

Aqib, Zainal dan Elham Rohmanto. 2007. Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah. Cetakan I. Bandung : Yrama Widya.

Djamrah, Syaiful Bahri. 2010. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif : Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis. Cetakan III. Jakarta : Rineka Cipta.

Danim, Sudarwan. 2010. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta. Dirjen pmptk depdiknas. 2006. Dimensi Kompetensi Supervisi Mnajerial. (Bahan Belajar Mandiri Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah). Jakarta.

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Mulyasa. 2008. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ . 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 : Tentang guru dan Dosen. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E.. 2008. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Salim, Peter.1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta : Modern.

Sudjana, Nana.2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah. Jakarta: Kemendiknas.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

PERENCANAAN PAJAK DANLABA BERSIH PADA PERUSAHAAN *FINANCE* DI INDONESIA

Shita Tiara, SE, Ak, M,Si[1] dan Reza Hanafi Lubis,SE, M.Si[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih pada Perusahaan Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan dengan data akhir berjumlah 96 laporan keuangan.. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhanaHasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Kata kunci : *Perencanaan Pajak, Laba bersih.*

Pendahuluan

Pemerintah mulai menggalakkan penerimaan pajak yang optimal pada masing-masing daerah. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2017, Pendapatan Negara yang diperoleh tahun 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun, dengan Pendapatan Negara yang berasal dari sektor pajak yaitu sebesar 85,6% dari Pendapatan Negara yang diperoleh dan Pendapatan Negara bukan pajak hanya sebesar 14,4% yang terdiri dari Penerimaan Hibah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (APBN RI, 2017).

Pajak bagi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah seringkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajak. maka salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalisasikan beban pajak yaitu mulai dari cara yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan beban pajak sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*).

Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak yang baik dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu perencanaan pajak yang tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak, sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan.

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*
[2] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Jumlah Perusahaan *Finance* yang terdaftar di BEI yaitu 90 Perusahaan. Laba bersih yang diperoleh setiap Perusahaan *Finance* mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya, seperti Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk mengalami kenaikan laba bersih setiap tahunnya untuk periode 2014-2016. Dan Bank CIMB Niaga Tbk mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan laba bersih untuk periode 2014-2016. Sedangkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. mengalami kerugian untuk periode 2014-2016. Dengan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut mempengaruhi besar beban pajak pengahasilan yang ditanggung. Semakin besar jumlah laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dan sebaliknya jika jumlah laba yang dihasilkan perusahaan rendah, maka rendah pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Maka dengan hal tersebut setiap perusahaan berupaya untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dengan beban pajak penghasilan perusahaan yang seminimal mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak.

Kajian Pustaka

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu indikator terpenting yang digunakan untuk menilai perusahaan adalah laba bersih. Sering kali para manajemen terpusat pada laba sehingga terdorong untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarnya kepada pemerintah.

Menurut Nabilah dkk. (2016:3), "Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, yaitu mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan".

Maksud dari penjelasan diatas berhubungan dengan pengendalian dari setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan pajak dengan tujuan dapat menghemat jumlah pajak yang harus dibayar.Menurut Herlina dan Toly (2013:3), faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Tarif Pajak

   Perbedaan tarif pajak yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenai tarif yang paling rendah. Sehingga semakin besar beban pajak, semakin kuat motif dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak.

2. *Loopholes*

   Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu. Dalam penghindaran pajak, WP dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan

perpajakan. Hal ini yang memotivasi WP dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Sanksi Administrasi Perpajakan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih kesulitan dalam menerapkan sistem administrasi yang memadai sehingga sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara WP dengan fiskus. Hal ini mendorong WP melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi akibat perbedaan penafsiran tersebut.

Laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Adapun pengertian laba bersih menurut Kasmir (2011:303), "Laba Bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak".

Menurut Simamora (2013:46), "laba bersih adalah laba bersih yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu".

Metode Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih pada Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang *finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 yang berjumlah 90 perusahaan.penelitian ini yang menjadi sampelnya yaitu laporan rugi-labaperusahaan untuk tahun 2014 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sampling bertujuan (*purposive sampling*) dimana sampel dipilih atas kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan *Finance* tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut.
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2014 hingga tahun 2016.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian dari tahun 2014-2016.
4. Perusahaan yang membuat format laporan rugi-laba dengan format multiple step dari tahun 2014-2016.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, maka diperoleh sampel 32 Perusahaan untuk periode 2014-2016.

Hasil Dan Pembahasan

Data yang diperoleh sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 diolah melalui uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian. Deskripsi dari masing-masing variabel penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	96	9,68	23,47	1500,35	15,6287	2,77360
Laba Bersih	96	13,31	24,94	1789,47	18,6403	2,42626
Valid N (listwise)	96					

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai N berjumlah 96 yang menunjukkan jumlah sampel sebanyak 32 Perusahaan *Finance* dengan waktu pengamatan selama 3 tahun (2014 – 2016), sehingga jumlah observasi menjadi 96. Berdasarkan Tabel 1di atas menunjukkan bahwa nilai terendah (*Minimum)* dari perencanaan pajak adalah sebesar 9,68. Sedangkan nilai perencanaan pajak yang tertinggi (*maximum*) sebesar 23,47. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai beban pajak maka semakin besar pula perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Nilai rata-rata (*Mean)* dari perencanaan pajak adalah sebesar 15,6287 dengan standar deviasi sebesar 2,77360.

Selanjutnya untuk variabel Y yaitu laba bersih, dari Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa laba bersih dengan nilai terendah (*Minimum)* sebesar 13,31 dan nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 24,94. Nilai rata-rata (*Mean)* dari laba bersih adalah sebesar 18,6403 dengan standar deviasi sebesar 2,42626. Statistik deskriptif variabel laba bersih menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 2,42626<18,6403, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini variasi nilai laba bersih dari perusahaan sampel tergolong cukup relatif stabil dan penyimpangan data yang terjadi relatif kecil.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia digunakan regresi linier sederhana dan hasil analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,510	,831		9,032	,000
	Perencanaan Pajak	,712	,052	,814	13,594	,000

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih adalah sebesar 0,712 dengan t_{hitung} sebesar 13,594. Sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,986. Sesuai dengan uji parsial diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 7,510 + 0,712X_1$$

a : Konstanta sebesar 7,510artinya apabila nilai perencanaan pajak dianggap bernilai 0, maka laba bersih sebesar 7,510.

b : Koefisien nilai perencanaan pajak (X) sebesar 0,743 artinya apabila nilai perencanaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,001 atau 1% akan menambah laba bersih sebesar 0,712

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* taraf nyata 5% (α = 0,05). Berdasarkan perhitungan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung}> dari t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} sebesar 13,594dan nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,986. Hal ini menyatakan bahwa H_a dengan hipotesis bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap laba bersih pada Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui Tabel 3 di bawah ini akan diketahui seberapa besar semakin kemampuan variabel X dalam menerangkan variabel Y.

Tabel 3
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,814[a]	,663	,659	1,41633

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas dapat dilihat R sebesar 0,814 yang berarti bahwa hubungan kedua variabel relatif kuat, yaitu sebesar 81,4%. Sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,663 menunjukkan bahwa variabel X (Perencanaan Pajak) menjelaskan variabel Y (Laba Bersih) sebesar 66,3% selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengolah data keuangan tahunan Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data diolah untuk mendapatkan hasil dari perencanaan pajak yang akan digunakan untuk menilai pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih.

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Herlina dan Toly, "bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak adalah perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi perpajakan yang menjelaskan bahwa semakin besar beban pajak, semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak dan semakin tinggi

pula motivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan Pajak, artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba bersih yang maksimal". Maka berdasarkan penelitian ini, hasil pengolahan data dari perencanaan pajak (variabel X) dan laba bersih (variabel Y) pada Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 diolah dengan program SPSS versi 20, untuk memperoleh bukti pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih diperoleh nilai signifikan regresi sebesar 0,712 dan dinyatakan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan menggunkan taraf signifikan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 <0,05 maka keputusannya adalah H_o ditolak dan H_a diterima, ini berarti bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Dan hasil koefisien determinasi R sebesar 0,814 yang berarti bahwa hubungan kedua variabel relatif kuat, yaitu sebesar 81,4%. Sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,663 menunjukkan bahwa variabel X (Perencanaan Pajak) menjelaskan variabel Y (Laba Bersih) sebesar 66,3% selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini, seperti pertumbuhan penjualan, biaya operasional, tingkat bunga dan lain-lainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih, artinya Perusahaan *Finance* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayar kepada pemerintah karena dengan total aktiva yang besar dapat berdampak pada laba yang tinggi sehingga Perusahaan *Finance* pada saat membayar pajak juga dengan jumlah yang tinggi. Sehingga Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba bersih yang maksimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Menurut Brrades & Khairani (2014), dengan judul "*Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Laba PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang".* yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data, perencanaan pajak berpengaruh terhadap laba pada PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang. Perushaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijadikan sebagai biaya pengurang bruto (biaya fiskal), tanpa melanggar peraturan Undang-Undang Perpajakan yang telah ditetapkan

Kesimpulan

Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak terhadap laba bersih.Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba bersih yang maksimal (begitupun sebaliknya), walaupun pengaruhnya cukup kuat tetapi masih ada faktor lain yang menentukan hal yang mempengaruhi laba bersih yang diperoleh. Oleh karena itu dengan hipotesis yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap laba bersih pada Perusahaan *Finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini dapat diterima.

Daftar Pustaka

Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2014. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non-Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Jurnal, Vol. 26. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Brrades, Een dan Siti Khairani. 2014. "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Laba PT. Adhya Tirta Sriwijaya Palembang". Jurnal. Palembang: STIE MDP.

Damanik, Melani. 2017. "Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Dalam Meningkatkan Laba Bersih Pada PT Indofood Suka Makmur Tbk". Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Efendi, Igna. 2014. "Analisis Pengaruh *Tax Planning* Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Pengasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2012". Skripsi. Semarang: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ernawati, Ayu. Moch. Dzulkirom A.R., dan Devi F.A. 2015. "Analisis *Tax Planning* Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan". Jurnal, Vol.23 No.1. Surabaya: Universitas Brawijaya.

Herlina dan Agus Arianto Toly. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak". Jurnal, Vol. 3 No. 2. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muaja, Rifaldi Josua. Jullie S., Steven T. 2015. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan PT Elsadai Servo Cons". Jurnal, Vol.3, No. 4. ISSN 2303-1174. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Nabilah, Nyimas Nisrina. Yuniadi M., dan Niken N.H. 2016. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan". Jurnal, Vol. 8 No. 1. Surabaya: Universitas Brawijaya.

Rahmanto, Sadar. 2015. "Manfaat Pajak Ditinjau Dari Teori Hukum Positive". Jurnal, Vol. III No. 2. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Saefi, Fendi Resti Ika. Agus I.K., Ibnu A.L. 2017. "Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan". Jurnal, Vol. 14. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Simamora, Henry. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE KPN.

Sugiyono. 2016. *Metode Penenlitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2016. *Hukum Pajak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin dan Damayanti. 2011. *Metode Penelitian Pendididkan Bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Themin, Suwardy. Walter T. Harrison J.R., Charles T. Horngren., dan C. William T. 2012. *Akuntansi Keuangan, Edisi IFRS, Edisi 8, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Turmudi, Muhamad. 2015. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam". Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 dan Pasal 28 ayat (1), (3), (4) dan (7) Tentang Pembukuan Dan Syarat-Syarat Bagi Wajib Pajak.

Wahab, Nor Shaipah Abdul dan Kevin Holland. (2012). *Tax Planning, Corporate Governance, and Equity Value. Jurnal. University Of Southampton*.

www.idx.co.id/, Diakses 05 April 2018.

www.kemenkeu.go.id/APBN 2017, Diakses 16 Maret 2018.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

Hj. Adawiyah Nasution, SH. M. Kn[1]

Abtraks

Praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Ada beberapa permasalahan dalam penelitian yaitu: Bagaimana ketentuan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditinjau dari Hukum Islam dalam praktik hukum di Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis tentang ketentuan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan untuk menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak. Disamping itu pula, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam dalm praktik hukum di Indonesia.

Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan ditam bah analisis penetapan pengadilan dan Kantor Catatan Sipil. Alat pengumpulan data primer adalah informan dengan pedoman wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif dalam bidang hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Angkat, UU No. 22 Tahun 2002

Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak – hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keinginan untuk memiliki anak adalah hal yang alami karena manusia memiliki akal sehat dan keinginan. Dengan akal fikiran manusia dapat menelaah serta mengkaji sesuatu agar terasa bermanfaat dan disisi lain keinginan tersebut mendorong manusia berusaha untuk memperolehnya bahkan terkadang menjurus kepada hal yang tidak mampu dan diluar kuasa manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hasil Pembahasan

A. Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, perbuatan hukum dan wali nikah atas anak angkatnya. Sedangkan menurut Penetapan Pengadilan Agama, orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta perbuatan hukum dan tidak termasuk wali nikah apabila anak angkat itu perempuan. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatnya sedangkan menurut Penetapan Pengadilan Agama, anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.

Menurut penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung. Penetapan Pengadilan Agama menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya tetapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Terhadap perkara perdata yang telah secara khusus dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan peradilan lain selain peradilan umum maka perkara perdata tersebut telah berada wilayah yurisdiksi kewenangan peradilan umum. Apa yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan peradilan lain bukan termasuk wewenang peradilan umum.

Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut peradilan agama. Kewenangan relative (kewenangan berdasarkan daerah) maksudnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas-batas wilayah kabupaten atau kota setempat. Cara penentuan batas-batas kewenangan relatif Pengadilan Agama juga demikian.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah

terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Anak yang tidak mempunyai ibu lagi harus ada ibu pengganti. Bapaknya ada kemungkinan menjadi ibu pengganti atau walinya atau orang tua angkatnya. Rumusan pengangkatan anak mutlak diperlukan dikalangan ummat Islam. Kalau terabaikan maka banyak anak menjadi terlantar.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap kesehatan
3. Perlindungan terhadap pendidikan
4. Perlindungan terhadap hak sosial
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah masyarakat, keluarga, rang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan secara komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif. Baik untuk

pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan baik dalam lembaga maupun dari luar lembaga termasuk dilakukan lembaga masyarakat dengan mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut. Pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain dengan cara wajib melindungi anak dari perbuatan antara lain:

1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
2. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak, dan
3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seijin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa demikian juga yang memiliki keunggulan juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan khusus.

Di samping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang Perlindungan Anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus berupa perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) menyatakan tentang anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan orang tua, wali yang sah atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Rumusan seperti ini diperlukan untuk menjaga dan mengawasi hak asasi anak angkat. Dalam ajaran Islam ditentukan lembaga Baitul Maal sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perlakuan wali terhadap anak yang berada dalam perwalianya. Pengawasan ini termasuk juga dalam perlindungsan hak asasinya.

Hal lain yang juga termasuk ke dalam perlindungan hak asasi anak angkat adalah kejelasan orang tua kandung dan kerabat-kerabatnya. Tidak boleh ada usaha menyembunyikan identitas anak. Prof. Runtung pernah mengomentari buku yang ditulis oleh B. Bastian Tafal. Buku ini menyebutkan bahwa H. David Kirk melakukan penelitian dengan mengungkapkan adanya orang tua angkat yang tidak mempunyai anak hendak menutup-nutupi pengangkatan anaknya *(rejection of difference)* dan ia ingin dipandang sebagai orang tua asli. Orang mempunyai naluri untuk menutupi hal-hal yang dianggap kurang baik karena dalam kehidupan bermasyarakat dan pada keluarga normal terdapat anggota keluarga karena adanya hubungan darah maka keluarga yang terjadi bukan karena adanya hubungan darahdapat dianggap kurang atau tidak normal.

C. Pelaksanaan dan Kendala Yang Dihadapi dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Pengangkatan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu anak angkat dan orang tua angkat. Pelaksanaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak akan melahirkan keharmonisan hubungan antara keduanya.situasi ini tidak akan bermasalah bagi kelangsungan pengangkatan anak. Namun sebaliknya, jika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat berakibat pada tidak terlindunginya anak angkat. Anak angkat merupakan pihak yang paling rentan terhadap perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan bahkan terhadap tindakan eksploitasi dari orang tua angkat atau pihak-pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena anak angkat umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak yatim atau anak terlantar.

Tindakan diskriminasi, tidak memperoleh hak dan berbagai tindakan lain dapat saja terjadi terhadap anak angkat. Oleh karenanya, ketentuan hukum yang jelas dan tegas sungguh dibutuhkan dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Fakta selama ini, peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang jelas dan tegas bagi perlindungan anak angkat. Akibatnya ketika terjadi permasalahan dalam kehidupan dimana anak angkat tidak mendapatkan sesuatu dari orang tua angkatnya maka anak angkat tidak dapat memperjuangkan haknya karena peraturan perundang-undangan tidak cukup kuat memberikan jaminan dan hak bagi anak angkat.

Dalam praktek pengangkatan anak masih terus dilaksanakan di masyarakat dari sebagian besar penerapannya menurut hukum adat kebiasaan setempat, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara terhadap beberapa orang yang telah melakukan pengangkatan anak.

Ibu Anisah bersama suaminya Bapak Indra telah menikah selama 5 (lima) tahun namun belum juga dikaruniai keturunan. Atas kesepakatan bersama akhirnya mereka mengangkat seorang anak laki-laki bernama Faisal Hadi berumur 3 (tiga) tahun anak dari adik kandung Pak Indra. Pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui

penetapan pengadilan karena mereka mengangkat anak tersebut berdasarkana adanya hubungan kekeluargaan yang telah diketahui orang tua kandung, asal usul anak angkat tersebut.

Dan pengangkatan anak ini juga dilakukan tanpa ada unsur paksaan dengan keyakinan bahwa anak angkat tetap mengetahui orang tua kandungnya. Sampai sekarang anak angkat tersebut masih dalam pengasuhan orang tua angkatnya. Selain itu, ada juga kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga A. Pandia yang mengangkat seorang anak perempuan yang begitu lahir ditinggal oleh orang tuanya di sebuah rumah bersalin. Karena tidak mengetahui asal usul anak tersebut dan siapa orang tua kandungnya maka keluarga A. Pandia yang karena merasa kasihan melihat anak tersebut langsung mengangkat anak tersebut seperti anaknya sendiri.

Keluarga A. Pandia hanya mempunyai seorang anak perempuan sehingga pada saat mereka hendak mengangkat anak tersebut mereka pun bermaksud untuk menambah anggota/anak dalam keluarga mereka. Menurut penjelasan Bapak A. Pandia bahwa mereka mengangkat anak tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku maksudnya pengangkatan anak tidak berdasarkan penetapan pengadilan.

Lain halnya dengan masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Keluarga P. Siregar yang juga melakukan pengangkatan anak secara langsung dari tetangganya yang dinilai kurang mampu untuk memelihara anaknya tersebut. Namun pengangkatan anak ini juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan karena berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa alasan bagi mereka yaitu mereka tidak paham tentang tata cara pengajuan permohonan ke pengadilan, selain itu mereka juga beranggapan bahwa tanpa adanya penetapan pengangkatan anakpun mereka tetap menganggap anak tersebut adalah anak angkat yang telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kandung anak angkat tersebut. Bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara diam-diam dapat melakukan pengalihan harta bendanya kepada anak angkat dengan jalan hibah ataupun dengan wasiat yang dibuat secara otentik dengan akte Notaris. Hal itu semata-mata dilakukan oleh orang tua angkat sebagai suatu bentuk perlindungan kepada anak angkat karena pengangkatan anak tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Menurut pendapat penulis, masyarakat yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan putusan/penetapan pengadilan sebagian besar berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang pegawai negeri sipil, maka bertambah banyak para pegawai negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administrasi yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari pemerintah.

Ketiadaan jaminan bagi anak angkat bukan hanya disebabkan oleh kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat terjadi karena faktor pengangkatan anak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, masyarakat banyak yang tidak mengetahui telah terjadi pengangkatan anak. Padahal pengangkatan anak yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat akan dapat menjadi pengontrol dan penjamin sosial bagi anak angkat untuk memperoleh haknya setelah orang tua angkatnya meninggal. Masyarakat dapat saja mengingatkan ahli waris dari orang tua angkat yang meninggal dunia untuk memberikan sesuatu bagi kepentingan anak angkat

karena anak angkat sudah cukup lama berbakti dan mengurus berbagai kepentingan orang tua angkat selama mereka masih hidup.

Beban psikologis juga dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Proses pengangkatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh beban psikologis. Akibatnya, orang tua yang anaknya dijadikan anak angkat tidak bersedia mendaftarkan atau melaporkan kepada lembaga yang berwenang bahwa anaknya telah dijadikan anak angkat. Mereka dipandang tidak baik oleh masyarakat jika anaknya dijadikan anak angkat. Sebagian masyarakat juga masih memegang ungkapan: ”walaupun anak kita banyak jangan sampai diambil atau dipelihara oleh orang lain”. Padahal kalau dilihat realitasnya, keluarga tersebut tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya, baik kebutuhan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam akte kelahiran tersebut akan dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat/diadopsi dan disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. Konsekuensi dari pencatatan akte kelahiran anak di kantor pencataan sipil berimplementasi terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul dan orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2002.

Tidak tersedianya orang tua untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak pada lembaga yang berwenang akan menyulitkan aparatur memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat karena pengangkatan anak yang telah terjadi dianggap tidak ada karena tidak memiliki bukti-bukti konkrit telah terjadi pengangkatan anak sehingga tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak angkat tersebut dan aparat hukum serta masyarakat dapat memberikan kontrol bagi anak angkat dalam memperoleh jaminan hak-haknya dari orang tua angkatnya.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat juga berupa komitmen pemerintah yang terbatas dalam memperjuangkan hak anak angkat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Faktanya, sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai hari ini, tidak ada satupun undang-undang yang secara lengkap mengatur persoalan anak angkat ini. Padahal praktek anak angkat telah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan hanya sejak Indonesia merdeka bahkan sudah dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 3. Membiarkan praktek pengangkatan anak sebenarnya tidak boleh terjadi dalam suatu negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan melindungi segenap warga negaranya termasuk kepada anak angkat.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Simpulan

Peraturan pengangkatan anak diawali dengan peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berlaku untuk golongan Tionghoa. Menurut Hukum Adat, masalah pengangkatan anak masih berdasarkan adat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat istiadat dan kebiasaan dalam

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Islam tidak mengenal adanya adopsi. Adapun istilah pengangkatan anak berdasarkan *hadhanah* (kasih sayang). Dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya ada mengatur tentang pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan putusan/penetapan pengadilan yang tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Terhadap tata cara pengangkatan anak dia tur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

Saran

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara khusus tentang pengertian dan pelaksanaan pengangkatan anak melalui berbagai cara atau media baik media massa maupun media elektronik untuk dapat memberi informasi secara luas kepada masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak anak terlantar dan anak orang miskin dari aspek hukum.

Daftar Pustaka

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantara Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam Indonesia.* Gema Insani Press, Jakarta, 1994

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1995

Ali as-Shabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat Al Ahkam*,. Darul Qur'anil Karim, tt

Asiskin, Zainal, *Pengantar Methode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Basyir, Azhar, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam,* UII Press, Yokyakarta, 1986

Badudu, JS ddan SM Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Cet.2 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996

Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,* Akademi Pressindo, Jakarta, 1996

Faisal, Hanafiah, *Format-format Penelitian Sosial,* Raja Grafindo, Jakarta, 1999.

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Pekawinan Adat,* Alumni Bandung, 1977.

Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramaja, Jakarta, 1981.
……, dan Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Malangm, 2007*

Irsyad, Samsuhadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, DITBINBAPERAIS Departememn Agama RI, Jakarta, 1999.

PELATIHAN PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DENGAN MEDIA LAGU ISLAMI PADA GURU TK ZIKRUL FALAH

Diana Sopha, SS, M.Hum[1]

Abstrak

Pelatihan pengajaran bahasa Inggris dengan Media Lagu Islami pada Guru TK Zikrul Falah merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang dihadapi oleh guru TK Zikrul Falah dalam mendidik anak muridnya yaitu para guru belum pernah mengajarkan bahasa Inggris dengan media lagu Islami dan para murid TK juga belum tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Melalui pelaksanaan pengabdian ini, para guru TK dilatih untuk dapat mengajar bahasa Inggris dengan media lagu islami.Hasil yang dicapai adalah para guru TK Zikrul Falah dapat mengajarkan bahasa Inggris menggunakan media lagu Islami dan dapat mengembangkannya ke dalam program pengajaran mereka.Selain itu para murid juga lebih tertarik dan termotivasi belajar bahasa Inggris dengan media lagu Islami dan dapat mempraktekkan bahasa Inggris tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci*: Pelatihan, Bahasa Inggris, Media Lagu Islami*

Abstract

English Teaching Training with Islamic Songs Media for the Teachers at Zikrul Falah Kindergarten is the application of one of three obligations (teaching, research and service) in university by a lecturer. This service is needed for the problems faced by Zikrul Falah teachers in teaching English to their students. They never use Islamic songs to teach English and their students are also still not interested and motivated to study English. After doing this service, the teachers are able to teach English to their students and further develop it into their teaching program. Besides, the students are more interested and motivated to study English and are able to practice it into their daily lives.

Keywords: *Training, English, Islamic Songs Media*

1. Pendahuluan

1.1 Analisis Situasi

Pkm ini berlokasi di TK Zikrul Falah Medan.Di sekolah ini anak anak belum memiliki kemampuan yang cukup dalam berbahasa Inggris.Karena itu diperlukan satu media yang dapat memfasilitasi anak untuk dapat belajar bahasa Inggris dengan baik. Di usia dini, anak dalam masa perkembangan mempunyai kompetensi memori yang sangat baik untuk dapat mengingat pelafalan dan kosa kata bahasa Inggris sehingga guru TK dapat mengajarkan bahasa Inggris pada anak dengan media yang sesuai dengan usia perkembangan anak.

Walaupun anak memiliki kemampuan memori yang sangat bagus dalam mengingat kosa kata, pengucapan, dll khususnya dalam mempelajarai bahasa Inggris namun pada anak usia dini ditemukan sejumlah masalah yaitu anak sulit untuk diam dan berkonsentrasi dalam belajar karena di usia mereka, mereka cenderung lebih senang bermain sehingga perlu dirancang suatu media atau metode pengajaran yang tepat dalam mengajar mereka sehingga mereka lebih termotivasi.

Karena itulah diperlukan suatu media pengajaran yang dapat menarik minat dan motivasi anak usia dini atau Taman Kanak-kanak untuk mau belajar dengan senang dan riang. Dengan kata lain, melalui pengabdian ini,

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan*

para guru TK dapat mengajar bahasa Inggris dengan media yang menarik dan tidak membosankan. Anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dengan lagu, musik dan gerakan sehingga dapat memotivasi anak-anak untuk belajar.

1.2. Permasalahan Mitra

Adapun masalah yang dihadapi sekolah Zikrul Falah adalah:

a. Paraguru TK Zikrul Falah belumpernah mengajarkan bahasa Inggris kepada murid-muridnya dengan menggunakan media lagu Islami dan belum pernah mengembangkannya ke dalam program pengajaran mereka.
b. Para murid TK Zikrul Falah belum tertarik dan termotivasi belajar bahasa Inggris

2. Metode Pelaksanaan

2.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Program PkM ini yaitu:

a. Tim pengabdian memperkenalkan diri kepada guru TK Zikrul Falah dan menjelaskan maksud kunjungan dan manfaat dari materi yang akan disampaikan dan berdiskusi antara Tim Pengabdian dan Guru TK Zikrul Falah tentang hal yang belum mereka pahami dari penjelasan tim pengabdian.
b. Presentasi materi Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris dengan Media lagu Islami oleh Tim Pengabdian
c. Tanya-jawab antara Tim Pengabdian dan Guru TK Zikrul Falah tentang materi yang telah disampaikan
d. Para guru TK Zikrul Falah membuat program pengajaran bahasa Inggris menggunakan media lagu islami dan mempraktekkan program pengajaran yang telah dirancang sebelumnya kepada murid TK mereka di kelas.

2.2. Metode Pendekatan

Simpson (2015) mengatakan salah satu masalah yang dihadapi ketika mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak atau dewasa adalah mempertahankan minat para pembelajar bahasa selama jam belajar. Karena itu kita seringkali harus menggunakan teknik yang sangat kreatif.Musik secara universal merupakan alat mengajar yang sangat luar biasa karena musik dapat menghubungkan semua budaya dan bahasa. Hal ini menjadikan bahasa sebagai sumber yang terbaik dan motivasi bagi pembelajar bahasa tanpa melihat batas usia dan latar belakang si pembelajar bahasa.

Proses pemilihan lagu adalah aspek menggunakan musik dalam pelajaran yang paling sulit. Hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Mempelajari dengan teliti apa yang ingin dipelajari di kelas
2. Menentukan level bahasa kelas
3. Menyesuaikan lagu dengan usia pembelajar
4. Menyesuaikan lagu dengan budaya pembelajar di kelas

Simpson (2015) menjelaskan enam cara agar lagu menjadi pusat perhatian di dalam kelas yaitu dengan 1) mendengarkan lagu, 2) menanyakan judul lagu, 3) mendengarkan kembali lagu dengan lirik, 4) memperhatikan tata bahasa, 5) memperhatikan kosa kata, idiom dan ekspresi kalimat dan 6) berkreatifitas.

Penggunaan lagu dalam mengajar juga didukung oleh Budden, Jo (2008) yang berpendapat bahwa lagu dalam bahasa Inggris dinyanyikan di seluruh dunia dan para pembelajar seringkali dapat merasakan kemajuan bahasa Inggris mereka ketika mereka mulai menyanyikan lagu.Karena itu lagu dapat digunakan untuk pengajaran di kelas.

3 Penelitian Sebelumnya

Roffiq, Qiram dan Rubiono (2017) dalam penelitiannya tentang media musik dan lagu pada proses pembelajaran menemukan bahwa Musik dapat mempengaruhi detak jantung pendengarnya. Musik juga dapat menenangkan pikiran seseorang dan menjadi alat bantu bagi pengembangan kecerdasan manusia. Salah satu jenis musik yang banyak dipakai dalam pengkondisian suasana belajar atau suasana kerja adalah jenis musik klasik. Hasil-hasil penelitian tindakan kelas menyatakan bahwa musik berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa.

Isnaningsih (2016) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Bahasa Melalui Bernyanyi dan Bercerita terhadap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Indonesia Anak TK ABA Seropandlingo Bantul Yogyakarta menunjukan bahwa metode bernyanyi mempunyai pengaruh yang lebih efektif, yakni 19% lebih tinggi daripada metode bercerita

Nuswantari dan Astuti (2015) dalam penelitiannya Pengaruh Pemberian Lagu Anak-anak Terhadap Perilaku Propososial Siswa Taman Kanak-Kanak menjelaskan Subjek penelitian adalah siswa-siswiTK ABA 39 Banyumanik, Semarang.Hasil uji Wilcoxon testmenunjukkan adanyapeningkatan perilaku prososial pada anak yang mendapat perlakuan berupa pemberian lagu anak-anak.

4. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilaksanakan oleh tim pengabdian menerapkan beberapa prosedur yakni:

1) Presentase/ pemaparan materi oleh Tim Pengabdian
2) Diskusi (Tanya-jawab) antar Tim Pengabdian dan Guru TK Zikrul Falah
3) Praktek pengajaran bahasa Inggris dengan media lagu Islami dan mengembangkannya ke dalam program pengajaran

5. Hasil Yang Dicapai

Setelah melaksanakan Program Pengabdian "Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris dengan Media lagu Islami kepada Guru TK Zikrul Falah" maka hasil yang dicapai adalah:

a. Para guru TK Zikrul Falah dapat mengajar bahasa Inggris dengan media lagu Islami yaitu di samping anak-anak murid TK dapat menguasai bahasa Inggris para guru juga dapat meningkatkan ilmu agama anak-anak didik mereka dan selanjutnya dapat mengembangkannya ke dalam program pengajaran mereka sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajan di kelas tersebut.
b. Para murid TK Zikrul Falah dapat belajar bahasa Inggris dengan media lagu Islami yang mereka senangi sehingga anak-anak semakin tertarik dan termotivasi untuk belajar berprestasi.

6. Kesimpulan Dan Saran

6.1 Kesimpulan

Melalui Pelatihan Pengajaran Bahasa Inggris dengan Media Lagu Islami pada Guru Tk Zikrul Falahmaka dapat disimpulkan:

a. Para guru TK Zikrul Falah dapat mengajar bahasa Inggris dengan media lagu Islami dan dapat mengembangkannya ke dalam program pengajaran mereka.
b. Para murid Zikrul Falah menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris dengan media lagu Islami.

6.2 Saran

Melalui pelatihan ini disarankan agar media lagu khususnya lagu Islami dapat digunakan dalam pengajaran karena dengan media lagu para murid atau pembelajar akan lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Selain itu juga disarankan agar para guru dapat memasukkan media lagu dalam program pengajaran mereka di kelas.

Daftar Pustaka

Budden, Jo. 2008. *Teaching Using Songs*. https://www.eslbase.com/teaching/ using-songs-to-teach-efl.

Isnaningsih.2016. *Pengaruh Metode Pembelajaran Bahasa Melalui Bernyanyi dan Bercerita terhadap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Indonesia Anak TK ABA Seropandlingo Bantul Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta*at https://repository.usd.ac.id/9405/2/131134134_full.pdf .January 2019.

Lynch, Larry M. The Effect of Using Songs on Young Learners and Their Motivation for Learning English.https://www.research gate.net/ publication/312054146 _The_Effect_of_Using_Songs _On_Young _ Learners_and_Their_ Motivation_for_Learning_English. January 2019.

Nuswantari, Wahyu dan Astuti, Tri Puji. 2015. *Pengaruh Pemberian Lagu Anak-anak Terhadap Perilaku Propososial Siswa Tamann Kanak-Kanak. Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro Jurnal Empati*, Oktober2015, Volume4(4),101-106 at https://media.neliti.com/media/publications/ 66329 -ID-none.pdf. Januari 2019.

Roffiq, Ainoer, Ikhwanul Qiram dan Gatut Rubiono. 2017. *Media Musik dan Lagu pada Proses Pembelajaran* at https://www.researchgate.net/ publication/ 322130745_MEDIA_MUSIK_DAN_LAGU_PADA_ PROSES_PEMBELAJARAN. January 2019.

Simpson, J.Adams. 2015. *How to Use Songs in Language Classroom*. At https:// www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-use-songs-english-language-classroom.January 2019.

PENGARUH KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA TANJUNG MORAWA KECAMATAN TANJUNG MORAWA

Rukmini[1]

Abstract

This research entitled "The Influence Of Empowerment Activities And Family Welfare (Pkk) Toward Welfare Of Rural Communities In The Village Of Tanjung Morawa Sub-District Of Tanjung Morawa", the study is limited to one PKK activity in educational and skill activities. The purpose of this research is to know the influence of education and skills activity on the welfare of rural community in Tanjung Morawa village and to know how big the influence of education and skill activity on the welfare of rural community in Tanjung Morawa village with total sample is 40 people. Collection technique used is by using questionnaire given to each respondent. The data analysis technique used is simple linear regression, with the formula Y = a + bX + e, and to know how big the influence of education and skills activity on the welfare of rural community in Tanjung Morawa village using determinant coefficient test (R2). Based on correlation test results known rxy value = 0.631, means Educational Activities and Skills have a positive and strong influence on the Welfare of Villagers. The value of determinant coefficient (R2) is 0.399 or 39.9%, which means that the variables of educational and skill activities affect the welfare of rural communities in Tanjung Morawa village. Knowing the acceptance or absence of hypotheses in this study, used t test (partial) obtained from educational activities and skills (X) has a value of t_{hitung} *5,020 >* t_{table} *2.024. Thus Ha is accepted because* $t_{hitung} > t_{tabel}$*. Therefore, it can be concluded that educational activities and skills partially significant effect on the welfare of village communities. The result of simple linear regression test shows that Y = 11,669 + 0,740X + e, where Educational and Skill Activity have significant influence to variable of Welfare of Villagers in Tanjung Morawa Village.*

Keywords : Educational and Skills Activities and Welfare Communit.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak luput terkena dampak dari perkembangan teknologi. Peningkatan pembangunan telah dilakukan Pemerintah Indonesia diberbagai daerah seperti peningkatkan pembangunan fisik.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain melakukan pembangun fisik pemerintah Indonesia juga melakukan pembangunan non fisik yaitu berupa pengembangan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan yang terjadi di Indonesia tidak hanya berpusat pada pembangunan perkotaan, namun pembangunan di pedesaan juga telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pembangunan tersebut tidak hanya tertuju pada Infrastruktur semata, namun pembangunan juga dilakukan dengan melakukan pengembangan organisasi-organisasi yang bersifat kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok. Contohnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga (PKK).

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Gerakan yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa

[1] *Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan rukminimsi@gmail.com*

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran Hukum dan Lingkungan, yang nantinya gerakan ini diharapkan bisa berakibat pada tercukupinya sandang, pangan, papan sehingga tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat terwujud melalui peran PKK ini.

Terdapat 10 program pokok PKK yang hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia yang meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Kelompok PPK di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa merupakan salah satu program PKK yang diadakan di Kabupaten Deli Serdang. Peran kelompok PKK ini diharapkan dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya program PKK masyarakat diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pembekalan yang diberikan berupa keterampilan dan pemanfaatan lingkungan sendiri serta pemanfaatan pekarangan yang dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan dapat memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna dilihat dari keadaan demografis dan geografisnya.

Kegiatan PKK di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa dinilai sebagian pihak belum berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada saat ini. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang tersedia, PKK masih dinilai belum seutuhnya memiliki kompetensi dan kemampuan yang mencukupi untuk menerapkan, menjalankan, serta membimbing masyarakat. Faktor lain yang menjadi permasalahan ialah masih terdapat anggota yang enggan untuk melibatkan diri atau berpartisipasi dalam Program PKK, misalnya mereka lebih memilih diam di dalam rumah dari pada harus keluar dan mengikuti sejumlah kegiatan yang sudah di siapkan oleh Tim Penggerak PKK.

Di sisi lain, motivasi yang dinilai masih kurang membuat masyarakat kurang berminat untuk melibatkan diri dalam program-program yang telah ditetapkan dalam Organisasi ini. Hal lain yang juga menjadi hambatan yaitu kurang maksimalnya pengalokasian dana yang dimiliki dikarenakan anggaran dana yang belum mencukupi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Penggerak PKK dan Masyarakat Desa Tanjung Morawa dalam membantu meningkatkan kesejahterakan masyarakat desa di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Apakah kegiatan pendidikan dan keterampilan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tanjung Morawa ? Dan seberapa besar pengaruh kegiatan pendidikan dan keterampilan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tanjung Morawa ?

B. Methode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan pengaruh kegiatan PKK yaitu pendidikan dan keterampilan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa.

Tempat penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tanjung Morawa Jl.Pendidikan N0 96 Desa Tanjung Morawa dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2018. Populasi adalah sebagian masyarakat desa yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 40 orang.

Data yang telah diperoleh kemudian di uji dengan:

Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2010:191), analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Rumus metode regresi linear sederhana.

(Sugiono,2010)

$$\mathbf{Y = a + bX + e}$$

Keterangan :

Y = Kesejahteraan Masyarakat
X = Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan
a = Konstanta
b = Koefisien
e = Error

Uji Hipotesis :

1. **Uji Korelasi (Uji r)**

   Uji r menggunakan rumus korelasi *produst moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

   Keterangan:
   x = Variabel Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan
   y = Variabel Kesejahteraan Masyarakat
   n = Jumlah Data

2. **Uji T (Parsial)**

Menurut Sugiyono (2010:184), uji secara parsial untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan (X) sebagai variabel bebas terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebagai variabel terikat.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sugiyono, 2010

1. Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Sugiyono (2010:199), uji koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin baik kemampuan variabel (X) menerangkan variabel (Y).

$$D = r^2 \times 100\%$$

Sugiyono, 2010

Keterangan:
D = Koefisien determinan
r^2 = Koefisien korelasi yang di kuadratkan

C. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hubungan tersebut dapat digunakan pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil perhitungan regresi linier sederhana yang diperoleh dengan menggunakan program SPSS 20,0 *for windows* dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.669	6.536		1.785	.082
	Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan	.740	.147	.631	5.020	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Sumber : Pengolahan data angket penelitian, 2017

Pada tabel 1.2 dapat dilihat nilai r_{xy} = 0,631 berarti pengaruh Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Morawa adalah **positif dan kuat** (sesuai dengan tabel interprestasi koefisien korelasi , tabel 1.2 diatas) .

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai konstanta (a) 11,669 dan b sebesar 0,740, sehingga diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y = 11,669 + 0,740X + e, dimana Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan (X) di Desa Tanjung Morawa berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Analisis tabel 1.2 mengetahui pengaruh variabel *independent* secara parsial terhadap variabel *dependent* adalah variabel Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan (X) memiliki nilai t_{hitung} 5,020 > t_{tabel} 2,024, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel *independent* atau *predictor*-nya. Range nilai dari R^2 adalah 0-1. $0 \leq R^2 \leq 1$ semakin mendekati nol berarti model tidak baik atau variansi model dalam menjelaskan amat terbatas, sebaliknya semakin mendekati satu model semakin baik.

Tabel 1.3

Hasil Uji R Square (R^2) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631[a]	.399	.383	2.90025

a. Predictors: (Constant), Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan
Sumber : Pengolahan data angket penelitian, 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa:

1. R menunjukkan korelasi sederhana, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 63,1%. Artinya hubungannya erat, semakin besar R berarti hubungannya semakin erat.
2. R square (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi adalah sebesar 0,399, artinya persentase sumbangan Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 39,9%, sedangkan sisanya sebesar 60,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan korelasi *product moment* diketahui bahwa pengaruh Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan terhadap Kesejahteraan Masyarakat desa (R) yaitu sebesar 0,631 yang berarti bahwa Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan berpengaruh positif dan kuat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Morawa.
2. Nilai koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,399 atau 39,9% yang berarti bahwa variable Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di desa Tanjung Morawa.
3. Berdasarkan uji t diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan (X) memiliki nilai t_{hitung} 5,020 > t_{tabel} 2,024, maka Ha diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga Kegiatan Pendidikan

dan keterampilan secara parsial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Morawa.

4. Berdasarkan uji regresi linier sederhana, maka diperoleh persamaan nilai konstanta sebesar 11,669 dan b sebesar 0,740, sehingga diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y = 11,669 + 0,740X + e, dimana Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat.

Daftar Pustaka :

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian.* Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Ekonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Fachruddin, Imam. 2009. *Desain Penelitian. Jurusan Matematika*. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri (UIN). Malang.

Iskandar. 2012. *Bechmarking Kemiskinan (Suatu Studi Ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal). IPB. Bogor.*

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Riset Untuk Bisnis danEkonomi*. Erlangga. Jakarta.

Kurniadin, Didin. 2012. *Manajemen Pendidikan*. AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta

Kurniawan, Syamsul, M.S.I. 2013. *Pendidikan Karakter.* AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta.

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Mu'in, Fatchul. 2016. *Pendidikan Karakter.* AR-RUZZ MEDIA. Jogjakarta

Rukminto, Isbandi, Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu pengantar.* PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Siagian, Shondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Edisi 9. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.

----------. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Edisi 19. Alfabeta. Bandung.

Bram Christanto. 2015. *"Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan GodongKabupaten Grobogan"*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 17 agustus 1945. Semarang.

Ely Kusuma Retno. 2013. *"Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia"*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Ni Putu Yani Astiti. 2016. *"Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Citra Perusahaan"*. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Mahasaraswati. Denpasar.

Widiastuti, Sri. 2010. *"Peningkatan Motivasi dan Keterampilan Menggiring Bola Dalam Pembelajaran Sepak Bola"*. Jurnal. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga. Yogyakarta.

PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. NUSANTARA CARD SEMESTA MEDAN

Sri Murniyanti[1]

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada PT Nusantara Card Semesta di Medan dan berapa besar Stres Kerja berpengaruh terhadap pada Kepuasan Kerja pada PT Nusantara Card Semesta di Medan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan regressi linier sederhana, uji signifikan dan uji Determinasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Nusantara Card Semesta di Medan yang berjumlah 32 orang. Berdasarkan analisis diperoleh pengaruh Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada PT Nusantara Card Semesta sebesar 79,90 % , uji signifikan sebesar 7,281 dimana t hitung > dari t tabel, 7,281>2,042 dan uji Determinasi sebesar 63,84%.

Kata Kunci : Stres Kerja dan Kepuasan Kerja

A. Pendahuluan

Stres kerja dapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas yang tidak dapat mereka penuhi. Artinya, stress muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling bertentangan, merupakan contoh pemicu stress.

Apabila hal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius dari perusahaan akan menyebabkan stress kerja bagi para karyawan dan jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan stress kerja yang cukup tinggi akan mengakibatkan karyawan menderita kelelahan fisik, emosional, maupun mental dan akan mempertinggi tingkat perputaran tenaga kerja.

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliknya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal.

Apabila stress kerja terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut para karyawan membutuhkan suatu bentuk dukungan social maupun dalam suatu pendekatan yang dilakukan perusahaan guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para karyawan sehingga para karyawan dapat mengelola stress kerjanya dengan baik dan dapat memberikan dampak yang positif kepada para karyawan dan perusahaan.

Stres kerja pada karyawan PT. Nusantara Card Semesta Medan ditunjukkan dengan karyawan dalam bekerja mudah mengeluh, merasa gelisah, dan merasa kesulitan. Stres yang rentan terjadi disebabkan oleh padatnya jam bekerja dan beban kerja yang tinggi, adanya keterlambatan pengiriman, kerusakan barang sebelum

[1] STMIK Tri Guna Darma srimurnianti21@gmail.com

dikirim kepada pelanggan, dan gaji yang kemungkinan tidak sesuai dengan harapan tersebut karena waktu jam bekerja yang berlebihan dan menyebabkan karyawan suka mengeluh terhadap beban berlebih yang dirasakan. Stres yang terjadi menyebabkan ketidakpuasan karyawan dalam bekerja.

Melihat dampak stress kerja yang berakibat negatif pada kepuasan kerja karyawan maka diperlukan suatu upaya untuk mengatasinya antara lain dengan menggunakan sumber-sumber yang ada disekitar individu yaitu dukungan sosial. Oleh sebab itu penting bagi perusahaan PT. Nusantara Card Semesta untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan menciptakan kenyamanan kerja sehingga sangat tidak mungkin untuk terkena stres.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; " Apakah stress kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Nusantara Card Semesta Medan? dan seberapa besar pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Nusantara Card Semesta Medan?

B. Methode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif dan kuantitatif, Waktu penelitian dimulai pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2017. Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Nusantara Card Semesta Medan Jalan. Garu 1 No. 25 Medan. Populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 105 orang dan sampel diambil sebesar 30% yaitu sebanyak 32 orang karyawan pada PT. Nusantara Card Semesta Medan.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2010:191), analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi.

Y = a + bX + e

Hipotesis : Diduga Stres Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Kaaryawan pada PT. Nusantara Card Semesta Medan.

1. 1. Uji korelasi :

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang ordinal. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan rumus korelasi *produst moment*, menurut Sugiyono (2010:147) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

1.2. Uji T (Parsial)

Menurut Sugiyono (2010:184), uji secara parsial untuk membuktikan hipotesis awal tentang pengaruh Stres Kerja (X) sebagai variabel bebas terhadapKepuasan Kerja (Y) sebagai variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2010:184) :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1+r^2}}$$

2. Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Sugiyono (2010:199), uji koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin baik kemampuan variabel (X) menerangkan variabel (Y).Menurut Sugiyono (2010:199) :

$D = r^2 \times 100\%$

C. Hasil Penelitian

Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui apakah hubungan variabel X dengan Y signifikan atau tidak,dapat diketahui melalui perhitungan berikut ini dengan menggunakan rumus korelasi product moment yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{(32)(36134) - (1075)(1073)}{\sqrt{32(36376) - (1075)^2 . 32(36025) - (1073)^2}}$$

$$r_{xy} = 0{,}799$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif sebesar 0,799 antara stress kerja dengan kepuasan kerja.

1.1. Regresi Linier Sederhana

Untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel Stres Kerja (X) dengan variabel Kepuasan Kerja (Y) digunakan persamaan Regresi Linier Sederhana, yaitu:

$Y = a + bx$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh, nilai konstanta (a) = 0,334 dan konstanta (b) = 22,31 dan selanjutnya dapat disusun persamaan regresi linier sederhana:

$Y = a + bx$
$Y = 22{,}31 + 0{,}334\ x$

Dari persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diprediksi seberapa besar pengaruh variabel Stres Kerja (X) dengan variabel Kepuasan Kerja (Y). Ini menunjukkan bahwa apabila variabel Stres Kerja (X) meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepuasan Kerja (Y) sebesar 0,334 satuan atau 33,4%.

1.2. Uji t

Untuk menguji signifikan hubungan, yaitu apakah hubungan yang di temukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 32 orang, maka perlu diuji signifikannya dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0{,}799\sqrt{32-2}}{\sqrt{1-(0{,}799)^2}}$$

$$t = 7{,}281$$

Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Untuk tingkat kesalahan 5% uji dua pihak dan dk= n-2 = 30, maka diperoleh t tabel = 2,042. Karena t hitung lebih besar dari t tabel, (7,281> 2,042), maka dengan demikian koefisien korelasi adalah signifikan.

4.6. Uji Determinasi

Selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, maka akan di uji determinasi sebagai berikut:

$D = (r_{xy})^2 \times 100\%$

$D = (0,799)^2 \text{ X } 100\%$

$D = 63,84\%$

Pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 63,84% sedangkan 36,16% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti berdasarkan dengan korelasi diatas, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuji kebenarannya.

D. Kesimpulan :

1. Diperoleh koefisien korelasi product moment, nilai r yaitu: 0,799 dimana dengan taraf signifikan 5% (0,05) dengan jumlah sampel n=32 orang diperoleh r_{tab}= 0,349, berarti bahwa $r_{hit}>r_{tab}$ (0,799>0,349) yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tersebut adalah positif dan konteksnya kuat.
2. Diperoleh nilai t_{hit} = 7,281 sedangkan nilai pada n-2 adalah 30 pada taraf signifikan 5% (0,05), adalah 2,042 dan jika $t_{hit}>t_{tab}$ yaitu 7,281>2,042. Dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan.
3. Hasil penelitian dengan uji Determinasi diperoleh kontribusi stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 63,84% sedangkan 36,16% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian.* Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Cetakan kedua belas, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Malayu S.P Hasibuan. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar, Dan Kunci Keberhasilan)*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sutrisno Edy Dr, M.Si. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana Predana Media Grup.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeda. Bandung.

Fachruddin, Imam. 2009. *Desain Penelitian. Jurusan Matematika*. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri (UIN). Malang.

Hermita. 2011. *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Semen Tonasa (Persero) Pangkep*.

Irna Sari Pratiwi. 2015. *"Pengaruh Stress Kerja, Komunikasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Kantor PT. PLN (Persero) Cilacap Jawa Tengah*". Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Peni Tunjungsari. 2011. *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (PERSERO) Bandung"*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Poundra Rizky Afrizal. 2015. *"Pengaruh Konflik Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. TASPEN (Persero) Cabang Malang)"*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Salleh,A. L., Bakar, R. A., &Keong, W. K., (2008). How Detrimental is Job Stress? : A Case Study Of Executives in the Malaysian Furniture Industry. *International Review of Business Research Paper,* 4 (5), 64-73.

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI DENGAN *FLIP CHART* DI SMP NEGERI 3 NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS UTARA

Dalifati Ziliwu, S.Pd., M.Pd.[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran biologi dengan media Flip Chart di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian pengembangan dikarenakan diakhir penelitian dihasilkan suatu produk. Produk yang dimaksud ialah media pembelajaran biologi berbentuk media cetak Flip Chart dengan menggunakan materi pewarisan sifat pada mahluk hidup. Subjek ujicoba dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, kelas IX sebanyak 9 orang dalam kelompok kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Flip Chart yang dikembangkan dapat dijadikan masukan dan acuan dalam pengembangan media pembelajaran biologi. Hasil persepsi guru diperoleh skor sebesar 117 atau 94,1% yang tergolong ke dalam kategori "sangat baik". Dengan demikian media pembelajaran Flip Chart dinyatakan dapat diterima oleh guru dan dapat membantu pembelajaran di dalam kelas. Hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh skor sebesar 547 atau 95% dengan kategori "sangat baik". Dengan demikian media Flip Chart dapat diterima oleh siswa dan dapat digunakan pada pembelajaran di kelas, dapat dijadikan pedoman belajar mandiri serta dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar.

Kata kunci : *media pembelajaran*, *biologi* dan *flip chart*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelajaran biologi termasuk salah satupembelajaran yang bersifat dinamis, karena kajian teori yang dikembangkannya mengacu pada fenomena-fenomena di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran biologi siswa dituntut untuk terus belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:18). Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks yang melibatkan seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimana proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah kognitif tersebut bertujuan pada bahan belajar tertentu.

Kegiatan pembelajaran tentu tidak selalu berjalan lancar dalam pelaksanaannya. Lancar atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran tergantung kepada faktor-faktor tertentu. Beberapa faktor yang dimaksud diantaranya, keterlibatan guru saat kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran dan sarana pendukung seperti (model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran) yang digunakan. Untuk itu, sebagai tenaga pendidik seorang guru harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus dipebaiki agar kegiatan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengembangkan media pembelajaran, karena media pembelajaran dapat dijadikan alat bantu ataupun bahan ajar tambahan dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Kustandi dan Sutjipto (2013:8) mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih baik dan sempurna. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat membantu agar siswa lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan.

[1] *Dosen FMIPA/Biologi IKIP Gunung Sitoli*

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan saat kegiatan belajar adalah media *Flip Chart.* Media *Flip Chart* dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran IPA di kelas. Menurut Susilana dan Riyana (2009:87) *Flip Chart* adalah lembaran-lembaran kertas yang menyerupai album atau kalender berukuran 50 x 75 cm, atau ukuran yang lebih kecil 28 x 21 cm sebagai *flipbook* yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara diperoleh hasil bahwa, masih minimnya jumlah infokus di sekolah tersebut, sehingga saat mengajar guru lebih sering hanya menggunakan buku paket untuk menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, masih ada siswa yang tidak menggunakan buku paket saat pelajaran biologi, padahal buku panduan merupakan sumber belajar utama saat itu. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru biologi di sekolah tersebut, diketahui bahwa masih terdapat nilai ulangan siswa yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), salah satunya nilai ulangan pada materi pewarisan sifat pada mahluk hidup. Rendahnya nilai ulangan siswa tersebut dapat dijadikan alasan bahwa materi peewarisan sifat pada mahluk hidup termasuk materi yang sulit bagi siswa. Selain itu, media pembelajaran yang pernah digunakan guru saat mengajar hanya media kartu nama dengan jumlah terbatas sehingga bergantian menggunakannya, dan media *Flip Chart* juga belum pernah digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah tersebut. Untuk itu, peneliti berharap dengan mengggunakan media *Flip Chart* dapat membantu mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran biologi khususnya materi perwarisan sifat pada mahluk hidup.

Berdasarkan beberapa paparan latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan media pembelajaran berupa *Flip Chart* dalam penelitian yang judul: **"Pengembangan Media Pembelajaran Biologi dengan *Flip Chart* di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara"**

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran biologi dengan media *Flip Chart* di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian pengembangan dikarenakan diakhir penelitian dihasilkan suatu produk. Produk yang dimaksud ialah media pembelajaran biologi berbentuk media cetak *Flip Chart* dengan menggunakan materi pewarisan sifat pada mahluk hidup. Model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE, dengan alur sebagai berikut (Lee & Owens, 2004:3)

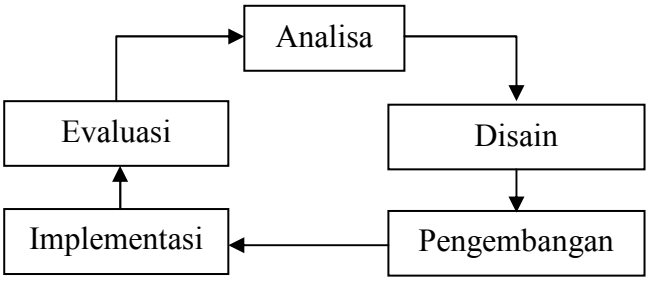

Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE

Adapun proses pengembangan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Analisis

Tahapan analisis yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa dan analisis materi pelajaran.

2. Tahap Desain

Pada tahap desain hal yang dilakukan adalah menyusun Rencana Pembuatan Media dan menentukan cara penyajian yang digunakan.

3. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan desain yang telah dirancang menjadi sebuah produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbentuk *Flip Chart* materi pewarisan sifat pada mahluk hidup. Pada tahap pengembangan memerlukan tim kerja yang terdiri dari peneliti, validator media dan validator materi. Pada tahap ini hal yang dilakukan yaitu, Validasi terhadap produk yang dikembangkan. Validasi terhadap desain media *Flip Chart* dilakukan oleh validator ahli media, sedangkan validasi terhadap materi pembelajaran dilakukan oleh validator ahli matei. Hasil validasi kemudian direvisi sesuai dengan saran dan komentar dari masing-masing tim validator, sehingga menghasilkan produk akhir yang layak digunakan dan dapat diujicobakan.

4. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi hal terpenting yang dilakukan yaitu ujicoba produk yang telah dikembangkan sebelumnya. Produk tersebut selanjutnya diperkenalkan kepada subjek ujicoba dan diberikan angket penilaian terhadap media *Flip Chart.*

5. Tahap Evaluasi

Setelah dilakukan ujicoba kemudian dilakukan evaluasi terhadap penerapan media *Flip Chart* selanjutnya. Proses evaluasi dilakukan untuk memperlihatkan produk yang dikembangkan berhasil dan sesuai dengan yang ditargetkan pada tahap *analysis*. Hasil evaluasi ini tentunya berperan dalam perbaikan produk yang sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk akhir yang layak untuk digunakan.

Desain ujicoba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efesien, dan daya tarik produk yang dihasilkan. Untuk itu, dilakukan ujicoba kelompok kecil terhadap 9 orang siswa SMP kelas IX dengan tingkat akademik yang berbeda-beda. Siswa dipilih sacara *purposive sampling* yaitu, berdasarkan penilaian guru mata pelajaran biologi yang dianggap mengetahui tingkat akademis dari masing-masing siswa. Ujicoba dilakukan untuk melihat persepsi siswa terhadap produk yang dikembangkan. Selain persepsi siswa dilihat juga persepsi guru terhadap produk media yang dikembangkan.

Subjek ujicoba dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas IX sebanyak 9 orang dalam kelompok kecil. Menurut Setyosari (2010 : 225) Ujicoba kelompok kecil melibatkan subjek yang terdiri dari 6-12 siswa. Subjek ujicoba diambil berdasarkan tingkat akademis yang berbeda berdasarkan pemilihan guru mata pelajaran biologi. pemilihan subjek dari tingkat akademis yang berbeda bertujuan untuk melihat keefektifan media *Flip Chart* yang dikembangkan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa saran dan pernyataan kesesuaian media pembelajaran *Flip Chart* berdasarkan saran dan masukan dari tim validator. Data yang diperoleh digunakan sebagai acuan dalam revisi produk. Data kuantitatif yaitu berupa skor penilaian validator, guru dan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran *Flip Chart*.

Instrumen penelitian ini menggunakan jenis angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka diberikan kepada tim ahli media dan ahli materi yang digunakan peneliti untuk memvalidasi desain media dan validasi materi dari produk yang dikembangkan. Sedangkan angket model tertutup diberikan kepada guru dan siswa yang nantinya digunakan untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap materi ajar yang disampaikan melalui media *Flip Chart*.

Sugiyono (2010:148) mengemukakan bahwa instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Sehingga secara spesifik semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa tanggapan, saran dan masukan dari tim validator, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari skor angket yang telah diisi oleh tim validator, guru, dan siswa. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan Skala *Likert.*

2. Uraian Teoritis

2.1. Media Pembelajaran

Menurut E. De Corte dalam Winkel (1989 : 187) media pembelajaran yaitu suatu sarana non personal (bukan manusia) yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar, yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan intruksional. Hamalik Oemar (1989:23) dengan menggunakan istilah media pendidikan mengartikannya sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dengan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah.

Pengertian ini secara eksplisit menyatakan bahwa peran media dalam proses pembelajaran membawa pengaruh terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Kemudian, positif tidaknya media pengaruh media tersebut lanjut Winkel bergantung pada kesesuaian media yang dipilih dengan tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktik, serta sifat dan kecenderungan peserta didik (Winkel, 1989:189).

Berbagai batasan di atas dapat didefinisikan bahwa media pembelajaran adalah segala wujud yang dapat digunakan sebagai alat bantu belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Selain itu media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat membangkitkan semangat, perhatian dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa.

2.2. Media *Flip Chart*

Flip chart adalah lembaran kertas yang berisikan bahan pelajaran, yang tersusun rapi dan baik. Penggunaan ini adalah salah satu cara guru dalam menghemat waktunya untuk menulis di papan tulis. Lembaran kertas yang sama ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian dengan flip chart

sangat menguntungkan untuk informasi visual seperti: (1) gambar-gambar, (2) huruf-huruf, (3) diagram, (4) bagan / chart dan (5) angka-angka. (Arsyad Azhar, 2003 : 40).

Flip chart sebagai salah satu media visual mempunyai fungsi yaitu memberi informasi secara simbolis, memperjelas dan memudahkan siswa dalam menangkap data kuantitatif yang rumit, dan juga media ini dapat menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan suatu peristiwa atau objek dengan jelas sehingga siswa bisa lebih sistematis dalam mempelajari suatu peristiwa atau ilmu (Sumantri dan Permana, 2001: 64).

Penggunaan *flip chart* merupakan salah satu cara guru dalam menghemat waktu terutama untuk menulis di papan tulis. Penyajian informasi ini dapat berupa gambar, huruf, diagram, dan angka-angka. Sajian pada *flip chart* harus disesuaikan dengan jumlah dan jarak maksimum siswa dalam melihat *flip chart* tersebut dan direncanakan tempat yang sesuai dimana dan bagaimana *flip chart* tersebut ditempatkan.

Susilana dan Riyana (2009: 87) mengemukakan bahwa *flip chart* merupakan salah satu media cetakan yang seder- hana dan cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses pembuatannya yang relatif mudah dan efektif karena *flip chart* dijadikan sebagai media penyampai pesan pembelajaran secara terencana maupun secara langsung dan menjadikan percepatan ketercapaian tujuan dengan menghemat waktu bagi guru untuk menulis atau menggambar di papan tulis.

3. Pembahasan

Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbentuk *Flip Chart* pada Materi Pewarisan sifat pada mahluk hidup untuk Siswa SMP Kelas IX telah melalui serangkaian tahapan model pengembangan ADDIE. Dimana hasil yang diperoleh dari pengembangan ini adalah berupa penilaian dari validator media terhadap desain media *Flip Chart* dan penilaian oleh validator materi yaitu penilaian terhadap isi media pembelajaran biologi berbentuk *Flip Chart* pada materi pewarisan sifat pada mahluk hidup untuk siswa SMP Kelas IX yang dikembangkan, persepsi subjek ujicoba (siswa) pada kelompok kecil terhadap media *Flip Chart*, serta persepsi guru biologi dan desain akhir produk yang dikembangkan.

a. Tahap Analisis *(Analysis)*

Beberapa tahap analisis yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa dan analisis materi pembelajaran. ketiga aspek tersebut diperoleh dari hasil observasi langsung peneliti di SMP Negeri 3 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa sumber belajar seperti media pembelajaran belum banyak digunakan, dimana guru hanya lebih sering menggunakan buku paket untuk menyampaikan materi pelejaran di kelas. Selain itu, sarana pendukung pembelajaran seperti infokus masing sangat minim jumlahnya, sehingga untuk mengajar guru hanya menggunakan buku paket.

b. Tahap Disain *(Design)*

Beberapa tahapan desain yang dilakukan yaitu :

1). Penentuan jadwal

Pembuatan media pembelajaran *Flip Chart* pewarisan sifat pada mahluk hidup berlangsung selama 4 bulan (Juli – Desember 2018) yaitu, dimulai dari menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, pengumpulan materi

pembelajaran, pembuatan media *Flip Chart*, dan validasi desain media serta validasi materi (isi media) hingga revisi produk.

2). Tim pengembang : Untuk membuat media pembelajarn *Flip Chart* pewarisan sifat pada mahluk hidup diperlukan 2 tim kerja yang terdiri dari 3 orang.

3). Spesifikasi Media *Flip Chart*

Media pembelajaran yang dikembangkan didesain menggunakan Aplikasi *Adobe Photoshop CS4* yang kemudian akan dibuat dalam bentuk cetak. Lembaran media meliputi, cover media (halaman judul *Flip Chart*), halaman silabus yang memuat (KI, KD dan Tujuan pembelajaran) sesuai silabus kelas X SMP semester II, kumpulan materi (deskripsi materi dan gambar pewarisan sifat pada mahluk hidup) dan halaman kesimpulan. – Kertas yang digunakan *Double glossy photos paper* yang berukuran 29,7 x 21 cm dengan ketebalan 150 gsm. – Karakter huruf yang digunakan yaitu *Times New Roman* ukuran 12 pt. – Materi yang digunakan pada media pembelajaran yaitu materi Pewarisan sifat pada mahluk hidup.

c. Tahap Pengembangan *(Development)*

Setelah produk media awal dibuat selanjutnya dilakukan serangkaian validasi oleh tim validator. Penilaian terhadap desain media pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali oleh tim ahli media, dan penilaian terhadap materi pelajaran dilakukan sebanyak 3 oleh tim ahli materi.

d. Tahap Implementasi *(Implementation)*

Pada tahap ini produk media pembelajaran yang telah dikembangkan yang telah divalidasi oleh tim validator dengan kategori layak digunakan selanjutnya diujcobakan. Ujicoba produk media dilakukan untuk melihat persepsi siswa dan guru terhadap produk yang dikembangkan.

e. Tahap Evaluasi *(Evaluation)*

Tahap evaluasi merupakan tahapan untuk melihat apakah media pembelajaran biologi berbentuk *Flip Chart* pewarisan sifat pada mahluk hidup yang dikembangkan layak dan sesuai dengan harapan pada tahap analisis, serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Berdasarkan serangkaian proses validasi, revisi dan ujicoba yang telah dilakukan maka media *Flip Chart* dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi dan dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran di kelas.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil validasi oleh validator ahli media mendapatkan skor akhir sebesar 62 atau 77,5% dengan kategori "sangat baik". Dimana ahli media menyatakan bahwa bentuk dan ukuran media *Flip Chart* sudah sesuai, serta tampilan media *Flip Chart* secara keseluruhan sudah baik dan menarik. Sehingga media yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan dan dapat diujicobakan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari revisi-revisi yang telah dilakukan sesuai dengan saran dan komentar yang diberikan oleh ahli media.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil validasi oleh validator ahli materi mendapatkan skor akhir sebesar 57 atau 89,1% dengan katergori "sangat baik". Dimana ahli materi menyatakan bahwa, materi yang disampaikan sudah sesuai dengan KI dan KD yang ada pada silabus SMP kelas IX semester I materi pewarisan sifat pada mahluk hidup. Selain itu, ahli materi juga menyatakan bahwa sistematika penyusunan materi, gambar yang digunakan dan penggunaan kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa, serta dapat memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami materi pembelajaran. Karena penyajian materi pada media

Flip Chart disampaikan secara sistematis, yaitu dari materi yang umum ke materi yang lebih khusus. Selain itu, gambar dan kalimat yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik siswa (gambar yang representatif dan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami). Sehingga ahli materi menyatakan bahwa penyajian materi pada media *Flip Chart* sudah layak digunakan dan dapat diujicobakan. Setelah dilakukan validasi, media *Flip Chart* selanjutnya diujicobakan untuk melihat persepsi guru dan persepsi siswa terhadap media *Flip Chart* yang dikembangkan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil persepsi guru memperoleh skor sebesar 117 atau 91, 4% dengan kategori "sangat baik". Dimana guru menyatakan bahwa materi yang disajikan pada media *Flip Chart* sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penyajian materi yang digunakan juga mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan media *Flip Chart* juga dapat membantu guru dalam mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran, karena di sekolah tersebut sarana pendukung pembelajaran masih sangat minim. Oleh kerena itu, bahan ajar tambahan masih sangat diperlukan oleh guru. Sehingga secara keseluruhan guru menyatakan bahwa media *Flip Chart* dapat digunakan pada pembelajaran di kelas, dengan komentar "sangat inovasi dan dapat digunakan pada pembelajaran di kelas".

Berdasarkan analisis data hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh skor sebesar 547 atau 95% dengan kategori "sangat baik". Dimana siswa menyatakan bahwa penggunaan media *Flip Chart* pewarisan sifat pada mahluk hidup pada kegiatan pembelajaran dapat membantu memperoleh informasi pembelajaran biologi yang dipelajari. Gambar yang ditampilkan pada media *Flip Chart* dapat memudahkan mengingat konsep yang dipelajari. Dan media *Flip Chart* juga berperan dalam meningkatkan partisipasi belajar, karena sajian materi yang disampaikan lebih menarik jika dibandingkan belajar dengan hanya menggunakan buku paket. Selain itu, media *Flip Chart* juga dapat digunakan sebagai pedoman belajar mandiri oleh siswa.

Berdasarkan analisis data hasil penilaian oleh guru dan siswa terhadap media *Flip Chart* pewarisan sifat pada mahluk hidup yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa media *Flip Chart* dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas dan dapat membantu mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran. Serta dapat meningkatkan partisispasi belajar siswa dan dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi sisiwa.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Media *Flip Chart* yang dikembangkan dapat dijadikan masukan dan acuan dalam pengembangan media pembelajaran biologi.
2. Hasil persepsi guru diperoleh skor sebesar 117 atau 94,1% yang tergolong ke dalam kategori "sangat baik". Dengan demikian media pembelajaran *Flip Chart* dinyatakan dapat diterima oleh guru dan dapat membantu pembelajaran di dalam kelas.
3. Hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh skor sebesar 547 atau 95% dengan kategori "sangat baik". Dengan demikian media *Flip Chart* dapat diterima oleh siswa dan dapat digunakan pada pembelajaran di kelas, dapat dijadikan pedoman belajar mandiri serta dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar.

4.2. Saran

1. Media *Flip Chart* dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai media pembelajaran biologi.
2. Disarankan melakukan penelitian lanjut yang diujicobakan pada kelompok besar dengan kreatifitas desain media yang berbeda.

Daftar Pustaka

Arsyad, Azhar. 2003. *Media Pembelajaran.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dimyati dan Mujiono. 2009. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : PT Rineka. Cipta.

Kustandi, C dan Sujipto, B. 2013. *Media Pembelajaran, Manual dan Digital*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Lee, W. W dan Owens, D. L. 2004. *Multimedia Based Indtructional Design, Second Edition*. San Fransisco: Pleiffer.

Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabelvariabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Setyosari, P. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi kedua*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2010. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sumantri, M. dan Permana, J. 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Maulana.

Susilana, R dan Riyana, C. 2009. *Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian.* Bandung: Wacana Prima.

Winkel, W.S. 1989. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT.Gramedia.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sonitehe Gea, S.H, M.M[1]

Abstrak

Penelitain ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di kaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan-tinjauan literatur dan pendapat-pendapat ahli. Secara umum berbagai masalah hukum yang berhubungan dengan substansi hukum maupun prosedur hukum dalam transaksi e-commerce memang sudah dapat terakomodasi dengan pengaturan-pengaturan hukum yang ada, terutama dengan aturan-aturan dalam KUH Perdata. Secara khusus pranata atau pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah terakomodasi di Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun untuk perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce belum terakomodasi dalam UU Perlindungan konsumen tersebut. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hokum perjanjian yang berlaku.

Kata kunci : *e-commerce*, *hukum* dan *konsumen*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-fice* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e–ecommerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam e-*commerce* merupakan suatu persyaratan mutlak. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/ komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya.

E-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan, dan dapat diaplikasikan hampir disetiap jenis hubungan bisnis. *e-commerce* mengizinkan produsen untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Calon

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

pelanggan atau konsumen dapat menemukan website produsen, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan membayar produk-produk secara online.

Alasan di gunakannya jaringan internet oleh konsumen saat ini dalam media transaksi *e-commerce* antara lain :

1. Internet merupakan jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*) sehingga memiliki kemudahan untuk diakses, murah dan cepat.
2. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Perkembangan transaksi *e-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Pada dasarnya keuntungan penggunaan *e-commere* dapat dibagi menjadi dua bagian yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli.

Adapun keuntungan bagi pedagang diantaranya :

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan *(revenue generation)* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melaluai cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa;menjual informasi,iklan *(baner)*, membuka *cybermall*, dan sebagainya;
2. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pamer *(outlet)*, staf operasional yang banyak, gudang yang besar dan sebagainya;
3. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk supplier langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk – produk tersebut;
4. Melebarkan jangkauan *(global reach)*. Pelanggan dapat menghubungi perusahaan /penjual dari manapun di seluruh dunia;
5. Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluahan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya.

Sedangkan keuntungan bagi pembeli antara lain :

1. *Home Shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi;
2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet;
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya;

4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet-outlet*/pasar tradisional.

Di samping itu, menurut Atip Latifulhayat, beberapa karakteristik khas *e-commerce* menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan seperti:

1. Perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan;
2. Konsumen sulit memperoleh jaminan umtuk mendapatkan "*Local follow up service or repair*" (service lokal atau perbaikan);
3. Produk yang dibeli konsumen berkemungkinan tidak sesuai dengan persyaratan lokal (*local requirement*).

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UUPK 1999). Tetapi, UUPK 1999 yang berlaku sejak April 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi *online* belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Indonesia memilik potensi dan prospek untuk pengembangan *e-commerce*. Namun kendala yang dihadapi dalam pengembangan ini antara lain keterbatasan infra struktur, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi *e-commerce*, masih kurangnya jaminan terhadap keamanan transaksi, dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa diupayakan secara bersamaan dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce*.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan membahas masalah-masalah tersebut yang dituangkan ke dalam tulisan ini dengan berjudul : Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *e-commerce.*

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitain ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di kaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan-tinjauan literatur dan pendapat-pendapat ahli.

2. Kajian Teoritis dan Pembahasan

2.1. Mekanisme Transaksi *E-commerce* yang Berlangsung Saat ini

E-commerce dapat di definisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa *(trade of goods and services)* dengan menggunakan media elektronik. Sistem perdagangan yang digunakan dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Adapun segmentasi atau ruang lingkup *e-commerce* meliputi tiga sisi yakni segmentasi bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen dan konsumen ke konsumen.

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem E-Commerce adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai (cash). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debet card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat dimana produk atau jasa tersebut diperjualbelikan.

Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada. Melalui online catalog-nya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah selesai "memasukkan" semua barang (pesanan dalam bentuk informasi) ke dalam digital cart (kereta dorong digital), maka tibalah saatnya untuk melakukan pembayaran (seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket).

Langkah selanjutnya adalah konsumen berhadapan dengan sebuah halaman situs yang menanyakan berbagai informasi sehubungan dengan proses pembayaran yang ingin dilakukan. Informasi yang biasa ditanyakan sehubungan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut:

1. Cara pembayaran yang ingin dilakukan, seperti: transfer, kartu kredit, kartu debit, cek personal, dan lain sebagainya. Jika menggunakan kartu kredit misalnya, informasi lain kerap ditanyakan, seperti nama yang tercantum dalam kartu, nomor kartu, expire date, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah jika menggunakan cek personal, biasanya selain nomor cek, ditanyakan pula nama dan alamat bank yang mengeluarkan cek tersebut.
2. Data atau informasi pribadi dari yang melakukan transaksi, seperti: nama, alamat, nomor telepon, alamat penagihan, dan lain sebagainya. Jika konsumen ingin melakukan pembayaran dengan metoda lain, seperti digital cash atau electronic check misalnya, konsumen diminta untuk mengisi user name dan password terkait sebagai bukti otentik transaksi melalui internet.
3. Bagi perusahaan yang memperbolehkan konsumennya untuk melakukan pembayaran beberapa kali (cicilan), biasanya akan ditanyakan pula termin pembayaran yang dikehendaki.

Setelah konsumen mengisi formulir elektronik tersebut, maka perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Melalui sebuah sistem gateway (fasilitas yang menghubungkan dua atau lebih sistem jaringan komputer yang berbeda), perusahaan akan melakukan pengecekan (otorisasi) terhadap bank atau lembaga keuangan yang berasosiasi terhadap medium pembayaran yang dipilih oleh konsumen (misalnya menghubungi Visa atau Mastercard untuk jenis pembayaran kartu kredit). Lembaga keuangan yang terkait kemudian akan melakukan proses otorisasi dan verifikasi terhadap berbagai hal, seperti: ketersediaan dana, validitas medium pembayaran, kebenaran informasi, dan lain sebagainya. Jika metode pembayaran yang dipilih melibatkan lebih dari satu bank atau lembaga keuangan, proses otorisasi dan verifikasi akan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer antar bank atau lembaga keuangan yang ada.

Hasil dari proses otorisasi dan verifikasi di atas secara otomatis akan "diinformasikan" kepada pelanggan melalui situs perusahaan. Jika otorisasi dan verifikasi berhasil, maka konsumen dapat melakukan proses

berikutnya (menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen atau konsumen dapat melakukan download terhadap produk-produk digital). Jika otorisasi dan verifikasi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama. Berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:

1. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan;
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi "berita acara" jual-beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan;
3. Pengiriman kwitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi konsumen;
4. Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan; dan lain sebagainya.

Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh mereka yang mengembangkan sistem E-Commerce, yaitu:

1. Security – data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai "dicuri" oleh yang tidak berhak, karena dapat disalahgunakan di kemudian hari;
2. Confidentiality – perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank);
3. Integrity – sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujuai bersama;
4. Authentication – proses pengecekan kebenaran dimana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak;
5. Authorization – mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli);
6. Assurance – kondisi dimana konsumen yakin bahwa perusahaan E-Commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dsb.).

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mengingat bahwa seluruh mekanisme tersebut dilakukan di sebuah dunia maya yang penuh dengan potensi kejahatan, maka adalah merupakan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan audit terhadap kinerja sistem pembayaran perusahaan E-Commerce-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Di pihak konsumen, adalah baik untuk tidak langsung percaya begitu saja terhadap perusahaan maupun "dunia maya" yang ada.

2.2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Mengakomodasi Transaksi *e-commerce*

UUPK belum dapat melindungai konsumen dalam transaksi *e- commerce* karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPK belum mengakomodir hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Hal tersebut

dikarenakan *ecommerce* mempunyai karakteristik tersendiri dibandingan dengan transaksi konvensional. Karakteristik tersebut adalah : tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi melintasi batas-batas yuridis suatu negara, barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang/jasa atau produk digital seperti software. Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak konsumen diakomodir dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada transaksi *e-commerce* hak-hak konsumen sangat riskan sekali untuk dilanggar, dalam hal ini konsumen tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam transaksi *e-commerce*. Hak-hak tersebut antara lain :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi suatu barang;
3) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya dalam penggunaan barang dan jasa;
4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila diperhatikan, hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang bersifatnya konvensional. Di samping itu perlindungan difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keaman konsumen dalam bertransaksi.

Keterbatasan UUPK untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi *ecommerce* juga tampak pada terbatasnya ruang lingkup pengertian pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) undang-undang ini menyebutkan, yang dimaksud pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sedangkan menurut penjelasan pasal 1 ayat (3) UUPK, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah "pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Melihat pengertian di atas sangatlah sempit sekali ruang lingkup pengertian pelaku usaha yang diatur oleh UUPK, dimana pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang ini adalah pelaku usaha yang wilayah kerjanya di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal jika kita lihat dari karakteristik dari*ecommerce*, salah satunya adalah perdagangan yang melintasi batas-batas negara maka pengertian pelaku usaha dalam UUPK ini tidak dapat menjangkau jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi UUPK tetap masih menjangkau pelaku usaha toko*online* yang melakukan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

2.3. Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi *e-commerce* seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha dan konsumen sama-sama berada di wilayah negara Republik Indonesia maka penyelesaian sengketa dapat di lakukan menurut cara penyelesaian sengketa yang ada di UUPK. Akan tetapi yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana jika pelaku usaha tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia sedangkan konsumennya warga negara Indonesia. Haruslah dipilih cara penyelesaian sengekta yang efektif dan efisien. Maka cara untuk mengatasi masalah ini adalah mengunakan alternative penyelesaian sengketa. Dimana alternatif penyelesaian sengketa ini lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan.

Memperhatikan semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari *e-commerce*dalam aktivitas perdagangan serta adanya kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak. Maka penerapan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam perdagangan secara elektronik merupakan solusi alternatif dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi *e-commerce* terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam bisnis.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1 Perkembangan teknologi informasi sehubungan dengan transformasi global yang melanda dunia membawa akibat pada berkembangnya aktivitas perdagangan, salah satunya adalah perdagangan atau transaksi melalui media elektronik (transaksi *e-commerce*). Secara umum berbagai masalah hukum yang berhubungan dengan substansi hukum maupun prosedur hukum dalam transaksi *e-commerce* memang sudah dapat terakomodasi dengan pengaturan-pengaturan hukum yang ada, terutama dengan aturan-aturan dalam KUH Perdata. Namun

karena karakteristiknya yang berbeda dengan transaksi konvensional, apakah analogi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi bisnis pada umumnya dapat diterima dalam transaksi *e-commerce*? Demikian pula dengan validitas tanda tangan digital (*digital signatures*). Bila hal demikian tidak dapat diterima, tentunya dibutuhkan aturan main baru untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam rangka melindungi para pihak dalam transaksi *e-commerce.*

2. Secara khusus pranata atau pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah terakomodasi di Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun untuk perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* belum terakomodasi dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Hal ini terutama disebabkan karena karakteristik dari transaksi *e-commerce* yang khusus, terutama transaski yang bersifat transnasional yang melewati batas-batas hukum yang berlaku secara nasional. Serta UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya menjangkau pelaku usaha yang wilayah uahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal e-commerce merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selainitu hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja.Walaupun UUPK memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebutmasih dapat menjangkau pelaku usaha toko *online* yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia.
3. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hokum perjanjian yang berlaku.

4.2. Saran

1. Sebaiknya dalam mengadakan transaksi perdagangan dalam *e-commerce* baik pelaku usaha maupun konsumen lebih teliti dalam melakukan transaksi pembayaran.
2. Sebaiknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dapat mengakomodasi transaksi e-commerce karena saat ini transaksi dalam dunia maya bukan hal yang asing lagi.
3. Pemerintah hendaknya segera membuat undang-undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena nantinya *e-commerce* akan menjadi suatu keniscayaan, sehingga pemerintah jangan sampai tertinggal perangkat hukumnya. Meskipun saat ini telah ada UU ITE yang mengakomodir transaksi *e-commerce.*

Daftar Pustaka

Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Atip Latifulhayat, *Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.

Dikdik M. Arief Mansyur dan Erlisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Riyeke Ustadianto, *Frameworks E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN

Aferiaman Telaumbanua, S.E, M.M[1]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilaksanakan pada STIE Pembangunan Nasional, Nias. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan STIE Pembangunan Nias Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai STIE Pembangunan Nasional yang berjumlah 30 orang. Dengan jumlah populasi yang sedikit yaitu ≤ 30 orang maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disiplin dan motivasi kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci : *disiplin kerja*, *motivasi kerja* dan *kinerja*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Mangkunegara (2005: 67) bahwa "kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya". Setiap pekerjaan yang diselesaikan memiliki nilai dan mutu sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan oleh organisasi, sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi pertumbuhan organisasi untuk berkembang dan maju mencapai sasaran utama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi sumber daya manusia juga menyangkut masalah disiplin dalam kemampuan teknis, konseptual, dan hubungan manusia. Pengelolaan disiplin tenaga kerja meliputi beberapa disiplin seperti: disiplin berbasis input, disiplin transformasional, disiplin output.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia adalah faktor disiplin. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan perusahaan maupun bagi karyawan. Bagi perusahaan adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal dan target perusahaan akan tercapai. Dan bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi tercapainya tujuan dan target yang telah ditetapkan organisasi.

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik diperusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jelasnya perusahaan sulit mencapainya tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada. Menurut Davis dan Newstrom (1996:366) disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi.

Disamping disiplin kerja, motivasi kerja juga mempunyai peranan yang penting dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk bekerja secara optimal. Karyawan yang memiliki motivasi kerja yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan. Seorang karyawan yang memiliki intelegensia cukup tinggi bisa gagal karena kekurangan motivasi.

STIE Pembangunan Nasional, Nias merupakan institusi pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan pendidikan bagi masyarakat. Maka untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas yang diembannya yang pada gilirannya adalah kinerja karyawannya memadai sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan motivasi yang tinggi dari ke atasan ataupun bawahan yang harmonis, terlebih dengan warga masyarakat yang membutuhkan layanan.

Penurunan kinerja karyawan juga tercermin dari rendahnya tingkat kedisiplinan dari beberapa karyawan terhadap peraturan dan kebijaksanaan perusahaan serta minimnya partisipasi dari tiap karyawan untuk memajukan organisasi. Ditambah lagi dengan permasalahan seputar motivasi kerja internal yang belum efektif, adanya kerancuan pada deskripsi kerja dan kekurangakuratan dalam evaluasi kerja yang dilakukan oleh sebagian penilai dapat semakin memicu lemahnya motivasi kerja yang sudah dimiliki oleh para karyawan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian tentang pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada STIE Pembangunan Nasional, Nias.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada STIE Pembangunan Nasional, Nias. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan STIE Pembangunan Nias Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai STIE Pembangunan Nasional yang berjumlah 30 orang. Dengan jumlah populasi yang sedikit yaitu ≤ 30 orang maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan uji regresi linier berganda yang didukung dengan program SPSS versi 19 for windows. Adapun rumus *Regression Analysis* adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + ei$$

Keterangan :

Y : Variabel kinerja karyawan

b_1 : Koefisien regresi disiplin kerja

b_2 : Koefisien regresi motivasi kerja

X_1 : Disiplin

X_2 : Motivasi kerja

a : Bilangan konstan

ei : Variabel gangguan

2. Uraian Teoritis

2.1. Disiplin Kerja

Menurut Hasibuan (2006:444) bahwa: "Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku." Menurut Rivai (2011:825) bahwa: "Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan."

Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerelaan dan kesedian seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya.

Disiplin menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Menurut Siagian (2011:230) bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana yaitu:

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan.
3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.
4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan karyawan.
5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan.

2.2. Motivasi

Motivasi (*motivation*) diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam arti kognitif, motivasi diasumsikan sebagai aktivitas individu untuk menentukan kerangka dasar tujuan dan penentuan perilaku untuk mencapai tujuan.itu. Dalam arti afeksi, motivasi bermakna sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang untuk bertindak atau tidak bertindak (Sudarman, 2004 : 2).

Gibson, dkk (2003 : 94) menjelaskan bahwa "motivasi diartikan sebagai konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku". Siagian (2009 : 102) menjelaskan bahwa "motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya". Dengan pengertian bahwa

tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan.

Menurut Rivai (2009:837) motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Manusia dalam suatu kegiatan tertentu bukan saja berbeda dalam kemampuannya, namun juga berbeda dalam kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Dari pendapat di atas didefenisikan bahwa motivasi adalah proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Unsur intensitas, arah dan ketekunan tersebut menyangkut seberapa kerasnya seseorang berusaha dalam mendapatkan sesuatu. Unsur inilah yang paling dominan dalam motivasi. Kemudian karyawan yang termotivasi sangat mengerti tujuan dan tindakan mereka dan meyakini juga tujuan tersebut akan tercapai. Inilah bentuk motivasi yang paling efektif.

2.3. Kinerja Karyawan

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat *tangible* (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau *intangible* (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai.

Mangkuprawira (2009:153) mengatakan bahwa ”kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan”. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, motivasi kerja vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, system hukuman dan sebagainya.

Hasibuan (2006:94) Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Menurut Sedarmayanti (2004:174) Kinerja merupakan memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar, hasil para pekerja, proses organisasi, terbukti secara konkrit, menyempurnakan tanggung jawab, dapat diukur, dapat dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan dari individu atau kelompok yang dilakukan berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu dengan maksimal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Pengujian regresi linear berganda menjelaskan besarnya peranan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.192	3.188		.374	.711
	Disiplin_kerja	.267	.123	.324	2.174	.039
	Motivasi_kerja	.624	.159	.585	3.928	.001

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan regresi linier berganda yang mempunyai formulasi : $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$, sehingga diperoleh persamaan : $Y = 1{,}192 + 0{,}267\ X_1 + 0{,}624\ X_2$ dengan estimasi simpangan baku peramalan sebesar 3,769.

Deskripsi dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

b_0 : 1,192

Bilangan konstanta (b_0) sebesar 1,192 menunjukkan besarnya kinerja karyawan apabila disiplin dan motivasi kerja sama dengan 0.

b_1 : 0,267

Koefisien regresi pertama (b_1) sebesar 0,267 menunjukkan besarnya peranan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan asumsi motivasi kerja konstan. Artinya apabila faktor disiplin meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi kinerja karyawan meningkat sebesar 0,237 satuan nilai dengan asumsi motivasi kerja konstan.

b_2 : 0,624

Koefisien regresi kedua (b_2) sebesar 0,624 menunjukkan besarnya peranan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan asumsi disiplin konstan. Artinya apabila faktor motivasi kerja meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi kinerja karyawan meningkat sebesar 0,624 satuan nilai dengan asumsi disiplin konstan.

Untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi seara simultan dilakukan uji F. Uji ini bertujuan untuk menguji signifikannya peranan disiplin dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1019.795	2	509.898	35.880	.000[a]
	Residual	383.705	27	14.211		
	Total	1403.500	29			

a. Predictors: (Constant), Motivasi_kerja, Disiplin_kerja

b. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa secara simultan disiplin dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai F-hitung sebesar 35,880 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Berdasarkan analisis koefisien determinasi parsial di atas diketahui bahwa pengaruh disiplin lebih besar dibandingkan dengan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, oleh karena itu untuk menguji kebenarannya digunakan uji hipotesis parsial atau uji-t.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis parsial dilakukan pada setiap variabel indepenen seperti pada Tabel 1 maka dapat dijelaskan.

1). Uji hipotesis peran disiplin terhadap kinerja karyawan.

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, disiplin tidak berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.

H_1: $b_1 \neq 0$ artinya, disiplin berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.

b. Uji Hipotesis

Bila tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya disiplin berpengaruh secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan dan apabila tingkat signifikansi $t_{hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya disiplin tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 2,174.

d. Dari hasil uji t diperoleh nilai signifikansi disiplin sebesar 0,039 < 0,05. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t_{hitung} (0,044) < 0,05, maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya disiplin berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

2). Uji hipotesis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.

Prosedur dan kriteria penerimaan serta penolakan hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

a. Hipotesis

H_0: $b_1 = 0$ artinya, motivasi kerja tidak mempunyai pengaruh meningkatkan kinerja karyawan.

H_1: $b_1 \neq 0$ artinya, motivasi kerja mempunyai pengaruh meningkatkan kinerja karyawan.

b. Uji Hipotesis

Bila nilai signifikan $t_{hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan meningkatkan kinerja karyawan dan apabila nilai signifikan $t_{hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya motivasi kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan meningkatkan kinerja karyawan.

c. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS diketahui t_{hitung} sebesar 3,924.

d. Dengan α= 5%, diperoleh nilai sinfikansi t_{tabel} sebesar 0,000. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi t_{hitung} (0,001) < 0,005, maka dapat disimpulkan H_1 diterima, artinya motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan meningkatkan kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa disiplin dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan meningkatkan kinerja karyawan, dimana faktor disiplin mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan, dibandingkan dengan motivasi kerja.

Koefisien deteriminasi parsial digunakan untuk mengetahui sumbangan disiplin dan motivasi kerja terhadap naik turunnya kinerja karyawan, sehingga akan diketahui salah satu variabel yang dominan.

Nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah pada kolom *adjusted R square*. Hal tersebut dikarenakan nilai *adjusted R square* tidak rentan pada penambahan variabel bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852[a]	.727	.706	3.76979

a. Predictors: (Constant), Motivasi_kerja, Disiplin_kerja

Besarnya nilai pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien adjusted R square sebesar 0,727 atau 72,70 % yaitu persentase pengaruh disiplin kerja (X_1) dan motivasi kerja (X_2) terhadap kinerja karyawan (Y) adalah sebesar 72,70 %. Sedangkan sisanya sebesar 37,30% (100% - 72,70%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

3.2. Pembahasan

1. Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Karyawan

Hasil uji t menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa disiplin kerja telah dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dalam hal ini pimpinan telah memberlakukan aturan disiplin kerja secara konsisten dan terprogram sedemikian rupa, sehingga kinerja karyawan dapat diketahui dari evaluasi yang dilakukan secara rutin. Melihat kenyataan di lapangan pelaksanaan disiplin kerja ini telah dijalankan dengan penuh kesungguhan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, makna dari pelaksanaan disiplin kerja tersebut menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja karyawan. Keberhasilan ini memberi pengaruh bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan pelayanan mahasiswa. Dengan demikian, pengaruh secara simultan menunjukkan hasil yang valid dan potensial untuk meningkatkan kinerja karyawan.

2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Hasil uji t menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya motivasi yang tinggi berarti pula karyawan tersebut mempunyai minat yang tinggi dalam menjalankan rutinitas kerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya minat yang tinggi, karyawan akan bekerja dengan perasaan senang. Perasaaan senang inilah yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja karyawan. Motivasi yang tinggi ditunjukkan dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan. Apabila target yang diharapkan organisasi terpenuhi, karyawan tersebut merasa senang. Sikap positif lainnya adalah merasa memiliki dan mempunyai frekuensi kehadiran yang tinggi. Sikap tersebut memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja karyawan.

Motivasi bepengaruh signifikan meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja akan memberikan kinerja kerja yang baik, sedangkan bagi karyawan yang memiliki motivasi yang rendah tidak akan memberikan kinerja sebaik karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi. Semua itu tercermin melalui sikap karyawan dalam menghadapi pekerjaannya, antara lain ditandai dengan turunnya semangat kerja, cepat merasa bosan, sering absen, terlambat datang dan sebagainya yang pada akhirnya semua berdampak pada penurunan produktivitas karyawan. Menurut Danim (2004 : 140) menyatakan bahwa motivasi rendah akan merugikan produktivitas kelompok. Perilaku anggota yang hanya ingin memenuhi kebutuhan atau kepentingan diri sendiri akan mengurangi rasa kepuasan anggota lainnya, karena itu akan timbul konflik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan negatif antra produktivitas dengan keinginan mementingkan diri sendiri. Susana kerja adalah salah satu faktor penentu produktivitas kelompok. Dengan adanya pemberian motivator yang efektif diharapkan perilaku sumber daya manusia yang mengacu pada peningkatan produktivitas tenaga kerja bisa dibentuk. Oleh karena itu, motivasi kerja menjadi subjek yang sangat penting karena secara fungsional dianggap mempunyai kaitan dengan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan kinerja.

Motivasi pada suatu organisasi bertujuan untuk mendorong semangat kerja para karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan suatu organisasi. Pimpinan yang mengarahkan karyawannya dengan memberikan motivasi kerja akan menciptakan kondisi dimana karyawan merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi merupakan salah satu syarat jika hasil-hasil kinerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Vroom (*dalam* Mangkunegara, 2005:51) bahwa motivasi adalah faktor utama membangun kinerja, untuk itu penerapan upah/gaji yang dikaitkan dengan kinerja individu akan dapat lebih meningkatkan motivasi, sekaligus mengisi faktor kesempatan untuk meningkatkan kinerja.

3. Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Hasil uji F menunjukkan bahwa komptensi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa secara serempak disiplin dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki displin yang tinggi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat.. Hal ini akan semakin didukung oleh adanya motivasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Adanya motivasi tertentu kepada karyawan akan semakin memacu semangat karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi yang diberikan merupakan faktor yang dapat membangun kinerja karyawan. Pemberian motivasi tergantung pada perusahaan, biasanya perusahaan memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan dan pemberian insentif kepada karyawan yang memiliki kinerja tinggi.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

4.2. Saran

1. Pihak pimpinan perusahaan perlu mencermati pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan, karena terbukti bahwa disiplin beperan dalam meningkatkan kinerja karyawan.
2. Disarankan kepada perusahaan untuk melaksanakan motivasi kerja organisasi yang efektif karena terbukti motivasi kerja berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi kerja dapat dilakukan dengan keterbukaan informasi antara karyawan, frekuensi bermotivasi kerja yang sering dilakukan dan adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh karyawan.

Daftar Pustaka

Danim Sudarwan, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gary Dessler, 2010. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Edisi Keempatbelas. Klaten : PT. Intansejati.

Gibson, Ivancevich dan Donnelly, 2003. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.

Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu, 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya.* Bandung: PT Refika Aditama.

Mangkuprawira, Sjafri, 2009. *Bisnis, manajemen, dan Sumberdaya Manusia*. Jakarta : PT. Gramedia.

Mathis, R.L. dan J.H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Salemba Empat.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka. Cipta.

Palan, R. 2007. *Competency Management : Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Disiplin untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. Jakarta : PPM.

Rivai, Veitzhal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Siagian, Sondang P., 2009. *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarman, D. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.

Umar Husein. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali.

Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERANAN SUMBERDAYA MANUSIA DI LEMBAGA INDUSTRI DAN PEMERINTAHAN

Nov Elhan Gea, S.E, M.M[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sumberdaya manusia di lembaga industri dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan (library research). Peranan pengembangan SDM pada sektor industri, secara fungsional saat ini ditangani oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan (Pusdiklat Indag), baik untuk pegawai Depperindag, peserta didik pendidikan formal (sekolah) maupun pihak swasta. Dalam prakteknya, ada beberapa unit teknis di lingkungan Depperindag yang juga melakukan kegiatan yang sama, dan ini bersifat melengkapi kegiatan pengembangan sdm sektor indag secara umum. Karena mengemban tugas sebagai pelaksana pembinaan, bimbingan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan sdm indag, maka Pusdiklat indag harus pula melakukan suatu rencana strategik pengembangan sdm yang profesional dan memiliki kompetensi yang mantap dan handal. Sementara, mempertimbangkan perkembangan industri dan perdagangan yang mengarah pada globalisasi produk dan jasa, maka Depperindag berusaha secara simultan melakukan transformasi, baik terhadap organisasi maupun sistem pendidikan dan pelatihan SDM.

Kata kunci : *Sumberdaya Manusia*, *industri* dan *pemerintahan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, maka subsidi dana dari pemerintah semakin terbatas sedangkan dipihak lain lonjakan kebutuhan dana sangat tinggi, sesuai dengan tuntutan kualitas SDM yang semakin tinggi. Hal ini menjadi dilema yang harus dialami dan dipecahkan jalan keluarnya sehingga perguruan tinggi harus membutuhkan sumber-sumber dana lain untuk mempertahankan keberlangsungan proses pendidikan.

Sektor ketenagakerjaan (SDM) menjadi sarana untuk menghasilkan harga yang kompetitif dengan produktivitasnya, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan inovatif dengan keterampilan dan pengetahuannya (*hard skills*) dan memberikan pelayanan yang prima secara verbal maupun non verbal (*soft skills*).

Salah satu kritikan oleh para pengguna lulusan lembaga pendidikan atau dunia kerja adalah kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan masih jauh dari standar kompetensi yang ditetapkan oleh dunia industri. SDM sebagai tenaga kerja yang qualified dan certified sangat sulit diperoleh oleh sebagian besar dunia kerja atau industri. Solusi untuk menjembatani ketidaksesuaian atau antara kebutuhan SDM yang profesional di dunia industri dengan output dari lembaga pendidikan, dibutuhkan suatu sinergi kekuatan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Peran membangun SDM ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia industri, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dalam mencetak SDM lembaga pendidikan harus dipacu oleh kalangan industri, demikian pula untuk memenangkan persaingan, industri harus dipacu oleh dunia pendidikan. Karena itu diperlukan kerjasama (partnership) yang baik, saling menguntungkan dan berkelanjutan antara dunia industri dan lembaga pendidikan.

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sumberdaya manusia di lembaga industri dan pemerintahan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan (*library research*).

2. Kajian Teoritis dan Pembahasan

2.1. Sumberdaya Manusis pada Lembaga Industri

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya-sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan.

Dalam rangka operasional, kompetensi tersebut membuat sumber daya manusia mampu menggali potensi sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki perusahaan, mampu mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksi di dalam perusahaan serta mampu menghasilkan produk yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kesemuanya ini pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk keuntungan daya saing.

Jiwa entrepreneur ini penting artinya untuk meningkatkan kreativitas, keahlian, keterampilan, dan keberanian mengembil risiko seluruh sumber daya manusia perusahaan / industri. Penataan dan pengembangan sdm sektor industri dan perdagangan dapat dilakukan melalui lima pendekatan. Lima pendekatan itu adalah,*pertama*, sistem pengangkatan (recruitment) yang berbasiskan asesmen atas kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional; *kedua*, pola pengembangan karir yang berbasis kompetensi dan profesi; *ketiga*, pelaksanaan hasil evaluasi kinerja, sehingga dapat menerapkan asas penghargaan (*reward*) dan hukuman (punishment); *keempat*, penempatan (*placement*) yang sesuai dengan kompetensinya; *kelima*, pengembangan dan pemberdayaan sdm melalui pendidikan nonformal, misalnya peningkatan melalui kursus, pelatihan-pelatihan, penataran, seminar, *workshop*, *job training*, dan lain-lain.

Lima metoda tersebut sangat menentukan dalam mempersiapkan sdm yang siap pakai sesuai dengan persyaratan organisasi. Integrasi dunia pendidikan formal (persekolahan) dan nonformal (pelatihan), akan menjadi kekuatan besar dalam pengembangan sdm sektor industri dan perdagangan. Oleh karena itu, sejak lama peranan pengembangan sdm, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun berbagai metoda pendidikan luar sekolah lainnya, sangatlah dibutuhkan.

2.1.1. Motivasi

Teori motivasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan: 1) Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang, pangan, dan papan, 2) Kebutuhan keamanan, fisik, mental, psikologikal, dan intelektual, 3) Kebutuhan sosial, 4) Kebutuhan prestise, tercermin dalam simbol-simbol status, dan 5) Aktualisasi diri, mengembangkan potensi diri.
b. Teori Clayton Alderfer "ERG"

1) Human existence needs (kebutuhan akan kelangsungan hidup manusia) yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan. Teori ini sama dengan teori Maslow pada kebutuhan tingkat pertama dan kedua.
2) Relatedness (kebutuhan untuk hubungan dengan orang lain) yaitu kebutuhan sosial/ bermasyarakat. Kebutuhan mengadakan hubungan antar pribadi (prestise dan pengakuan). Penerapan teori ini mirip dengan Maslow pada tingkat ketiga.
3) Growth needs (kebutuhan akan pertumbuhan). Kebutuhan kepercayaan diri, yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan program organisasi yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan kemampuan, serta peluang untuk memenuhi kebutuhan bekerja secara produktif, dengan cara memberikan penilaian positif atas peningkatan produktivitas yang dicapai

c. Teori Herzberg "model dua faktor"

Adapun teori ini memiliki asumsi sebagai berikut: terdapat dua rangkaian kondisi yang mempengaruhi seseorang dalam kerjanya yaitu faktor yang membuat orang puas dan membuat orang tidak puas. Adapun faktor tersebut dibagi dalam kelompok besar intrinsik meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan berkembang. Sedangkan ekstrinsik meliputi upah, keamanan kerja, kondisi kerja status, prosedur kerja, kualitas supervisi, dan kualitas hubungan (Hasibuan, 1996).

Selain teori di atas masih ada beberapa teori lain yaitu teori keadlian, harapan, penguatan, dan modifikasi perilaku, teori kaitan imbalan dengan prestasi yang tidak bisa dijelaskan satu persatu.

2.1.2. Kepuasan Kerja

a. Dikaitkan dengan prestasi. Seorang karyawan yang "puas" tidak dengan sendirinya merupakan karyawan yang berprestasi tinggi, melainkan sering hanya berprestasi "biasa-biasa saja". Kepuasan kerja tidak selalu menjadi faktor motivasional kuat untuk berprestasi akan tetapi dapat terletak pada faktor lain yaitu imbalan yang diperolehnya. Menjadikan kepuasan untuk memacu prestasi kerja yang lebih baik meskipun disadari bahwa hal itu tidak mudah.
b. Dikaitkan dengan kemangkiran. Seorang karyawan yang puas akan hadir di tempat tugas kecuali ada alasan yang benar-benar kuat sehingga ia mangkir. Sebaliknya karyawan yang tidak puas akan menggunakan berbagai alasan untuk tidak masuk kerja. Oleh karenanya cara efektif untuk mengurangi tingkat kemangkiran karyawan adalah meningkatkan kepuasan kerjanya.
c. Dikaitkan dengan keinginan pindah. Penyebab timbulnya keinginan misal penghasilan rendah atau kurang memadai, kondisi kerja kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi baik atasan atau rekan kerja, atau pekerjaan yang tidak sesuai. Keadaan ini perlu diwaspadai karena jika terjadi dalam skala besar, industri/perusahaan pula yang dirugikan.
d. Dikaitkan dengan usia. Semakin lanjut usia tingkat kepuasannya semakin tinggi dengan alasan bahwa makin sulit memulai karir baru ditempat lain, sikap dewasa dan matang mengenai tujuan hidup, harapan, keinginan dan cita-cita, gaya hidup yang sudah mapan, sumber penghasilan yang relatif terjamin, dan adanya ikatan batin dan tali persahabatan antara yang bersangkutan dengan rekan kerjanya.
e. Dikaitkan dengan tingkat jabatan. Semakin tinggi kedudukan pada umumnya tingkat kepuasannya pun cenderung lebih tinggi pula, alasannya adalah penghasilan menjamin hidup yang layak, pekerjaan menunjukkan

kemampuan kerjanya, dan status sosial yang relatif tinggi di dalam dan di luar organisasi. Hal seperti ini akan mendorong untuk merencanakan karir dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga tingkat jabatan yang lebih tinggi benar-benar tercapai.

f. Dikaitkan dengan besar-kecilnya organisasi. Besarnya organisasi karyawan yang jumlahnya besar maka jati diri dan identitas manjadi kabur misalnya hanya dikenal dengan "nomor pegawai" hal tersebut dapat mempunyai dampak negatif pada kepuasan kerja. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang tidak terwujud, solidaritas antara sesama karyawabn menurun, menjalin tali persahabatan menjadi lebih sulit, perhatian pimpinan terhadap personel tidak terjadi, kesemuanya dapat menjadi faktor rendahnya kepuasan kerja. Oleh karenanya industri yang besar perlu dicari cara pengelompokannya para karyawan sedemikian rupa sehingga masing-masing karyawan tetap merasa mendapat perlakuan dan perhatian individual sesuai jati diri masing-masing dan tidak sekedar alat produksi yang diberi "nomor" pegawai sebagai petunjuk identitas (Siagian, 2009).

2.1.3. Sistem Komunikasi Kepegawaian

Pemeliharaan hubungan dengan para karyawan memerlukan komunikasi yang efektif. Terdapat empat arus komunikasi dalam perusahaan yaitu:

a. Komunikasi vertikal ke bawah, merupakan wahana manajemen untuk menyempaikan berbagai hal kepada para bawahannya.
b. Komunikasi vertikal ke atas, pegawai selalu ingin didengar oleh para atasannya untuk menyampaikan berbagai hal seperti laporan hasil pekerjaan, dan lain-lain.
c. Komunikasi horizontal, berlangsung antara orang-orang yang berada pada tingkat yang sama dalam herarki industri Akan tetapi malaksanakan kegiatan yang berbeda-beda.
d. Komunikasi diagonal, berlangsung antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang herarki industri yang berbeda tetapi penyelenggaraan kegiatan yang sejenis.

Proses komunikasi menyangkut hal sebagai berikut:

a. Dua pihak terlibat yaitu subyek (sumber) dan obyek (sasaran) komunikasi
b. Pesan yang hendak disampaikan oleh subyek kepada obyek
c. Pemilihan cara atau metode penyampaian pesan ooleh oleh subyek untuk menyampaikan pesan, lisan atau tertulis, dengan alat penyampaiannya
d. Pemahaman metode penyampaian pesan oleh obyek sehingga pesan diterima dalam bentuk yang diinginkan oleh subyek
e. Penerimaan oleh obyek
f. Umpan balik dari obyek ke subyek (Makmuir, 2008)

2.1.4. Perubahan dan Pengembangan Organisasi

Perubahan dapat terjadi karena dua hal yaitu pertama, yang diprakarsai oleh industri misal produltivitas menurun, daya saing perlu ditingkatkan, perubahan pada pangsa pagar dan berbagai faktor internal lainnya. Kedua, terjadi sebagai tanggapan organisasi terhadap faktor eksternal tetapi dengan dampak kuat terhadap industri yang bersangkutan. Selain itu ketidak pastian menjadi salah satu sebab utama mengapa orang sering menerima

perubahan dengan sikap ragu-ragu. Tipe penolakan terhadap perubahan bersifat rasional, emosional dan sosiologikal.

Berbagai kecenderungan dan faktor-faktor penyebab perlu dipahami dan dikenali oleh pihak-pihak yang memprakarsai perubahan. Pemahaman dan pengenalan harus tercermin dalam paling sedikit empat kegiatan yaitu perencanaan, partisipasi, komunikasi dan pemberian imbalan tambahan. Dengan empat hal tersebut karyawan diharapkan tidak hanya tidak menentang perubahan akan tetapi memberikan dukungan terhadapnya.

Teori perubahan bahwa tiga langkah diperlukan agar suatu perubahan mendatangkan hasil yang diharapkan. Pertama pencairan adalah usaha untuk meninggalkan kebiasaan dan pandangan lama agar yang baru dapat dipelajari. Kedua, gerakan artinya melakukan perubahan, dengan ini berarti menguasai cara, metode dan suasana baru dan menerimanya sebagai hal yang memang diperlukan. Ketiga, pembekuan kembali dalam arti bahwa cara, metode, pandangan dan kondisi baru itu karena telah diterima sebagai hal yang wajar dan memang diperlukan, terlaksana secara efektif dalam praktek. Tiga hal tersebut diambil melalui pengembangan organisasi. Dapat diartikan pengembangan organisasi sebagai suatu proses perubahan yang mempunyai potensi untuk membawa berbagai bentuk peningkatan dalam kerja sama, kemampuan bekerja sebagai tim dan produktivitas kerja.

Proses pengembangannya adalah (a) melakukan diagnosa pendahuluan, (b) pengumpulan data, (c) umpan balik dan tindak lanjut, sasarannya mencapai kesepakatan tentang sifat dan jenis masalah yang dihadapi oleh kelompok, dan menentukan bentuk, jenis, prioritas perubahan yang akan diberlakukan, (d) penyusunan rencana pemecahan masalah, (e) pembinaan tim, (f) kerja sama antar kelompok, dan (g) penilaian hasil yang dicapai (Sutrisno, 2010).

2.1.5. Mutu Kehidupan Berkarya

Konsep mutu kehidupan berkarya dapat dikatakan sebagai upaya yang sistematik dalam kehidupan organisasional melalui mana kepada para karyawan diberikan kesempatan untuk turut berperan menentukan cara mereka bekerja dan sumbangan yang mereka berikan kepada industri dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.

Sesungguhnya peningkatan tuntutan terhadap perwujudan mutu kehidupan berkarya bukanlah hal yang timbuln dengan tiba-tiba melainkan merupakan suatu refleksi dari perubahan yang terjadi di masyarakat luas.

Terlihat jelas bahwa pemeliharaan hubungan yang serasi antara industri dengan karyawannya merupakan praktek manajemen sumber daya manusia yang penting mendapat perhatian. Karena itu merupakan keharusan mutlak untuk penguasaan teknik, bukan hanya bagi spesialis MSDM akan tetapi bagi yang menduduki berbagai jenjang jabatan manajerial.

2.2. Sumberdaya Manusis pada Lembaga Pemerintahan

Organisasi pemerintahan desa diselenggarakan seiring dengan perubahan masyarakat di sekitarnya dan juga perubahan-perubahan lingkungan, baik lokal, regional maupun perubahan-perubahan global. Konsep pemberdayaan SDM yang dikemukakan Stewart yang dijadikan rujukan teori dalam pembahasan ini menjelaskan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya keseluruhan sub variabel (dimensi) dari variabel

pemberdayaan SDM berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kecuali sub vaiabel consulting tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan desa.

2.2.1. Konsep Pemberdayaan SDM

Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.

a. Kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi pula dengan upaya mengembangkan aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka malalui organisasi.
b. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu individu agar mempunyai pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses komunikasi.

Dalam konteks SDM, menurut Ndraha SDM merupakan penduduk yang siap, mau, dan mampu memberikan kontribusi terhadap organisasional. Ada dua dimensi yang melekat pada sumber daya manusia yaitu dimensi sumber daya (D) berupa keterampilan, skill, pengalaman, dan pendidikan yang siap untuk disumbangkan kepada organisasi dan dimensi kedua adalah manusianya sendiri (M) yaitu bagaimana organisasi menempatkan manusia itu dengan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Menurut Soewandi proses pemberdayaan adalah pengalihan (transfer sikap dan perilaku teladan, berpandangan jauh ke depan, memiliki ketahanan mental, tidak mudah diajak bengkok, dan tidak mudah menyerah dalam kehidupan berpemerintahan yang baik, transfer nilai-nilai spiritual melalui contoh-contoh kehidupan nyata seperti nasihat menasehati dalam kesabaran dan kebenaran yang diajarkan agama. Hal ini kurang sekali bahkan sangat kurang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan saat ini. Kelemahan-kelemahan inilah yang membuat posisi dan peran aparat desa tidak mungkin mencapai kesejahteraan dan kemandirian karena tidak mungkin mencapai kesejahteraan dan kemandirian karena tidak bersinerginya adab dan karsa.

Ada kesamaan pandangan Soewandi dan Goleman dalam "Kecerdasan Emosional". Menurut Goleman (1996) manusia mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua jenis kecerdasan yang berlainan, yaitu kecerdasan rasional atau intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ).

IQ dan EQ harus seimbang, dan dalam aplikasinya, emosionallah yang mengendalikan intelektual sebagaimana dikatakannya bahwa intelektualitas tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa kecerdasan emosional. Demikian pula pandangan Soewandi bahwa antara rasa (kalbu) dan rasio harus berjalan seimbang, namun dalam aplikasinya kalbulah yang memandu rasio dan bukan sebaliknya.

Konsep dan pemikiran di atas mendorong penulis untuk menawarkan konsep baru tentang pemberdayaan SDM yang sesuai dengan kondisi manusia Indonesia seharusnya memiliki unsur-unsur antara lain: kemampuan, kemauan (dorongan, motivasi), kesiapan, kerja sama, komunikasi, membimbing, mendukung, mengarahkan,

prestasi, kematangan moralitas, dan kematangan spiritual,. Semua dimensi (unsur) tersebut saling terkait, melengkapi, memengaruhi dan merupakan satu kesatuan dalam sistem pemberdayaan SDM.

Konsep baru tersebut memadukan beberapa disiplin ilmu yang terkait dan mendukung, yaitu manajemen dan organisasi, demografi, sosiologi, psikologi, etika (filsafat moral), dan agama. Keseluruhan disiplin ilmu tersebut akan menjadi bahan kajian kybernologi (ilmu pemerintahan baru), yaitu organisasi pemerintahan,sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, dan etika pemerintahan. Dimensi penting dari konsep baru SDM yaitu motivasi (kemauan), komunikasi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan prestasi kerja atau kinerja.

2.2.2. Motivasi (Kemauan)

Secara teoritis motivasi dikemukakan oleh Soewandi yang menyatakan *human motivation* (kemauan manusia) adalah kekuatan psikis dalam diri manusia, dengan motivasi tersebut manusia meraih apa yang diinginkannya. Bila kemauan itu hilang, manusia akan melesak ke bawah, yang disebut tergelincir (dari alur yang ditetapkan Tuhan). Sebaliknya, bila kemauan itu timbul, manusia akan melejit ke atas atau menyongsong.

Maslow telah mengembangkan hierarki kebutuhan yang mengaitkan motivasi dengan prioritas kebutuhan seseorang. Sebaliknya, Herzberg mengembangkan model dua faktor motivasi. Faktor motivasi yang penting adalah pekerjaan itu sendiri, pencapaian tujuan, pertumbuhan, tanggung jawab, kemajuan, dan pengakuan. Baik model Herzberg maupun model Maslow berfokus pada kebutuhan masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda. Kedua model itu memiliki batasan masing-masing (Davis dan Newstroom, 1996).

Menurut Davis dan Newstroom setiap orang cenderung mengembangkan pada motivasi tertentu sebagai hasil dari lingkungan budaya tempat orang itu hidup. Pola ini merupakan sikap yang mempengaruhi cara orang-orang memandang pekerjaan dan menjalani kehidupan mereka. Empat pola motivasi yang sangat adalah prestasi, afiliasi, kompetensi dan kekuasaan.

Banyak minat terhadap pola motivasi tersebut dihasilkan dari hasil penelitian David Mc Celland dari Universitas Harvard. Dari hasil penelitian bahwa pola motivasi orang-orang mencerminkan lingkungan budaya dimana mereka hidup, keluarga, sekolah, agama, dan buku yang mereka baca. David dan Newstroom selanjutnya mengemukakan bahwa motivasi prestasi (*achivement motivation*) adalah dorongan dalam diri orang-orang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang atas dasar sosial. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk memengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. Apabila kekuasaan telah diperoleh hal itu mungkin digunakan secara konstruktif atau mungkin destruktif.

Penjelasan tersebut bahwa sejumlah karakteristik menunjukkan pegawai yang berorientasi prestasi akan bekerja keras apabila mereka memandang akan mendapat kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Demikian halnya motivasi afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu memengaruhi perilaku. Motivasi kompetensi lebih cenderung dilakukan dengan baik karena kepuasan batin yang mereka rasakan dari melakukan pekerjaan itu

dan penghargaan yang diperoleh dari orang lain. Sementara itu, orang-orang yang bermotivasi kekuasaan ingin menimbulkan dampak pada organisasi dan mau memikul risiko untuk melakukan hal itu.

Motivasi seseorang merupakan fungsi sinergi dari motif, pengharapan, dan insentif. Motif menunjukkan kecenderungan yang umum dari individu untuk mendorong pemuasan kebutuhan, mewakili pemenuhan kebutuhan. Pengharapan adalah kalkulasi subjektif tentang kemungkinan tindakan tertentu yang akan berhasil dalam memuaskan kebutuhan (mencapai tujuan). Insentif adalah kalkulasi subjektif tentang nilai pengharapan bagi pencapaian tujuan.

2.2.3. Komunikasi

Rohnya administrasi adalah organisasi. Rohnya organisasi adalah manajemen. Rohnya manajemen adalah kepemimpinan, dan rohnya kepemimpinan adalah komunikasi. Setiap tindakan komunikasi memengaruhi organisasi dengan cara tertentu, dan apabila komunikasi efektif, dapat mendorong timbulnya prestasi kerja lebih baik dan kepuasan kerja. Pentingnya komunikasi dikemukakan oleh Gitusudarmo dan Mulyono yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dan komunikatif itu merupakan hal yang penting karena hal-hal berikut:

a. Komunikasi merupakan alat bagi manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengendalian
b. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer di setiap harinya dan memakan waktu yang paling banyak dari waktu yang tersedia

Komunikasi merupakan darah kehidupan dan bila terjadi miskomunikasi, maka akan terjadi kehancuran organisasi. Peran dalam komunikasi tidak selalu terkait dengan status seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat prinsip dalam komunikasi yaitu: *pertama*, komunikasi merupakan proses, *kedua*komunikasi merupakan pertukaran pesan, *ketiga* komunikasi merupakan interaksi, dan *keempat* komunikasi mempunyai tujuan. Dengan demikian, dalam proses komunikasi apabila berlangsung terus menerus akan terjadi interaksi, yaitu proses saling memengaruhi antara individu yang satu dengan yang lain.

Miskomunikasi sering terjadi dalam organisasi termasuk di lembaga pemerintahan. Miskomunikasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh adanya saling kepercayaan dan pengertian antara komunikator dan komunikan terhadap pesan atau lambang yang sudah disepakati.

Ada tujuh strategi komunikasi yaitu (1) *credibility* menyangkut kepercayaan yang diciptakan oleh komunikator, (2) *context* menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial, (3) *content* menyangkut kepentingan orang banyak, (4) *clarity* menyangkut pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan, (5) *continuity and consistency* adalah komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir, (6) *channel* merupakan saluran media informasi yang tepat dan dapat dipercaya, dan (7) *capability of the audience* adalah kemampuan yang dimiliki khalayak dalam menerima informasi.

2.2.4. Prestasi Kerja (Kinerja)

Performance atau kinerja sebagai proses mengubah energi menjadi nilai, kinerja tidak hanya produk, melainkan keseluruhan proses siklus manajemen. Kinerja mencerminkan sebuah proses manajemen yang

berlangsung terus-menerus antara manajer dengan anggota staf agar dapat dihindari hasil kerja yang buruk sehingga diperlukan komunikasi dua arah (Mangkunegara, 2009).

Sebagai hasil kerja, kinerja sebagaimana dikemukakan Umar (2008) menyangkut mutu pekerjaan, kejujuran karyawan, inisiatif, sikap, kerja sama, keandalan, pengetahuan tentang kerja, tanggung jawab dan pemanfaatan waktu. Oleh karena itu, kinerja berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi.

Kinerja lebih menekankan pada kegiatan penilaiannya, yaitu tahap akhir dari proses manajemen. Kinerja pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa (Winardi, 2008).

Selama ini penilaian secara sistematik terhadap kinerja pemerintah belum menjadi tradisi. Akibatnya sering kali muncul perdebatan yang tidak terselesaikan ketika tejadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

2.3. Peran Sumberdaya Manusia di Lembaga Industri dan Pemerintahan

Pendidikan bertujuan menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional maka perlu adanya dukungan baik dari industri maupun pemerintahaan. Perkembangan pasar kerja dan kemajuan teknologi yang sangat cepat menempatkan profesionalisme sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan.

Dalam kondisi serkarang ini, pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan selaras menjalankan kemintraan dengan perubahan tersebut menjadi kunci utama untuk meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan daya saing pasar kerja. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan kunci dalam memenangkan persaingan usaha yang semakin ketat seiring dengan liberalisasi ekonomi. Dari hasil survai ini menuntut suatu program pembinaan SDM yang komprehensif dan holistik agar dapat berkembang di pasar kerja dan dunia industri.

Pada era globalisasi akan menuntut pengelolaan sumber daya yang tepat, terutama sumber daya yang renewable yaitu keterampilan dan keahlian tenaga kerja agar tetap selaras dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan perubahan pasar. Hal ini tentunya menuntut sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat dipergunakan di perusahaan untuk mampu mengelola SDM di perusahaan dengan baik.

Output lembaga pendidikan yang sesuai kebutuhan industri hanya akan terwujud jika pelaksanaan pendidikan dipacu oleh dunia industri, dan industri hanya akan eksis jika didukung ketersediaan SDM yang berkualitas dari lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan dan kebutuhan industri yang saling terkait ini perlu diikat lebih erat dengan membangun pola kemitraan (partnership) antara lembaga pendidikan dan industri.

Selebihnya sebagai kesatuan dari anggota tim untuk mencapai misi, tujuan yang dimiliki untuk keuntungan bersama dengan mekanisme kerja yang terkordinasi dan partisipasi. Melalui kerjasama tersebut sangat mungkin untuk menghasilkan berbagai produk diantaranya adalah (a) SDM yang qualified dan certified yang sesuai standar kompetensi dibutuhkan oleh industri. SDM yang kreatif, inovatif, produktif dan adapatif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar, SDM yang memiliki sikap kerja, budaya kerja, sadar mutu dan

adaptif terhadap budaya organisasi di perusahaan, (b) Hasil penelitian yang bermanfaat bagi industri berupa pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi industri dalam bidang mutu, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan inovasi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar global, (c) Produk inovatif dan teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan dimasyarakat untuk pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat, (d) Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan guna pengembangan SDM di Industri, (e) Tenaga ahli dalam bidang research and development produk industri untuk industri guna memperluas pasar.

3. Kesimpulan

Peranan pengembangan SDM pada sektor industri, secara fungsional saat ini ditangani oleh Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan (Pusdiklat Indag), baik untuk pegawai Depperindag, peserta didik pendidikan formal (sekolah) maupun pihak swasta. Dalam prakteknya, ada beberapa unit teknis di lingkungan Depperindag yang juga melakukan kegiatan yang sama, dan ini bersifat melengkapi kegiatan pengembangan sdm sektor indag secara umum. Karena mengemban tugas sebagai pelaksana pembinaan, bimbingan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan sdm indag, maka Pusdiklat indag harus pula melakukan suatu rencana strategik pengembangan sdm yang profesional dan memiliki kompetensi yang mantap dan handal. Sementara, mempertimbangkan perkembangan industri dan perdagangan yang mengarah pada globalisasi produk dan jasa, maka Depperindag berusaha secara simultan melakukan transformasi, baik terhadap organisasi maupun sistem pendidikan dan pelatihan SDM.

Daftar Pustaka

Davis, Keith,dan Newstorm. 1996. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.

Goleman, Daniel, 1996. *Kecerdasan Emosional*, terj. Hermaya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan, Malayu. 1996. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Makmuir, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi: Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

Umar Husein, 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Winardi. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

PERANAN STRATEGIS MANAJEMAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PERUSAHAAN

Eliagus Telaumbanua, S.E, M.M[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan strategis manajemen sumberdaya manusia dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan (library research). Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan tiga fungsi lainnya: keuangan, pemasaran, operasi/produksi. Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Optimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Kata kunci : *peran strategis*, *manajemen SDM* dan *perusahaan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Tingginya dinamika atau cepatnya perubahan dapat tergambar dari total perdagangan (impor dan ekspor) Amerika Serikat pada tahun 1991 bernilai US$ 907 milyar, pada tahun 1996 meningkat menjadi US$ 1.4 trilyun. Perubahan ini disebabkan antara lain oleh: (1) berbagai kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat pada 10-20 tahun terakhir, terutama dalam telekomunikasi, penggabungan komputer dengan komunikasi, CAD, CAM dan robotika, (2) pengaruh globalisasi: perusahaan manufaktur Amerika Serikat memanfaatkan buruh murah di negara-negara berkembang, persaingan yang semakin mendunia, produksi manufaktur multinasional (Toyota di AS, IBM di Jepang dan sebagainya), (3) pengaruh deregulasi atau berkurangnya pengaturan harga, entry tariff dsb. oleh pemerintah, proteksi dan monopoli yang semakin berkurang menyebabkan munculnya berbagai perusahaan baru dalam bidang telekomunikasi, penerbangan, bank yang beroperasi dengan biaya yang relatif lebih rendah (sangat kompetitif), (4) demografi tenaga kerja global yang berubah, mengarah kepada workforce diversity, diskriminasi tenaga kerja yang semakin longgar, bertambahnya tenaga usia tua dan tenaga kerja wanita dan (5) perubahan sistem sosio-politik seperti Rusia yang menjadi kapitalis, RRT yang menjadi negara industri, berdirinya asosiasi-asosiasi regional (EU, NAFTA, APEC dan lain-lain) yang bertujuan antara lain untuk kerjasama ekonomi, liberalisasi dan deregulasi perdagangan; reformasi di Indonesia yang meruntuhkan orde baru mestinya membawa paradigma baru di dunia usaha.

Pergeseran-pergeseran yang telah disebutkan di atas berdampak kepada semakin banyaknya pilihan bagi konsumen; terjadinya mergers, joint-venture dan bahkan divestasi dan menutup usaha; siklus hidup produk menjadi lebih pendek dan terjadi fragmentasi pasar. Fenomena-fenomena tersebut menimbulkan ketidak pastian

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

sebagai tantangan terhadap tugas manajer. Menjawab tantangan ini, agar dapat bersaing dan sustainable sesuai tuntutan perubahan, organisasi bisnis harus responsif, cepat bereaksi dan *cost-effective*.

Organisasi yang lebih datar (*flat organization*) kini menjadi norma baru. Organisasi piramidal dengan 7 – 10 lapis kini mulai di"datar"kan menjadi hanya 3 – 4 lapis (AT&T dan GE dari 12 kini menjadi hanya 6 lapis atau kurang). Bentuk piramidal kini bahkan dianggap kuno, tradisional, *out of style*, "rantai komando" semakin tidak diikuti, tetapi tentunya dengan operating procedures yang jelas. Ini juga menjadi pertimbangan bagi organisasi perguruan tinggi. Jika mengacu kepada *cost effectiveness* dan fungsi-fungsi *line and staff management* yang efisien, apakah memang diperlukan adanya para pembantu dekan jika sudah ada pembantu rektor, atau sebaliknya? Bukankah *staff dan line functions* kedua *management lines* tersebut sama? Apakah tidak terdapat *redundancy* yang berakibat pemborosan? Yang jelas kita mengikuti pola ini karena kepatuhan kepada peraturan pemerintah yang memang memerlukan debirokrasi.

Perampingan personalia (*downsizing*), dan kecenderungan bekerja dalam team yang lebih mendasarkan kerjanya kepada process, bukan fungsi spesialisasi, semakin menonjol. Istilah pemberdayaan yang kini digunakan dalam banyak aspek, juga merambah ke manajemen SDM. Pemberdayaan tenaga kerja (*employee empowerment*) dilaksanakan terutama bagi *front line employees* (seperti *front desk clerks*) untuk memberikan kepuasan maksimum kepada pelanggan.

Berkaitan dengan kiprah manajer mengantisipasi perubahan struktur organisasi bisnis, Prof. Rosebeth Moss Kanter mengatakan:"*Position, title and authority are no longer adequate tools for managers to rely on to get their jobs done. Instead, success depends increasingly on tapping into sources of good idea, on figuring out whose collaboration is needed to act on those ideas, and on working with both to produce results*."

Manajemen sekarang telah banyak berubah dari keadaan 20-30 tahun lampau, di mana human capital menggantikan mesin-mesin sebagai basis keberhasilan kebanyakan perusahaan. Drucker (1998), pakar manajemen terkenal bahkan mengemukakan bahwa tantangan bagi para manajer sekarang adalah tenaga kerja kini cenderung tak dapat diatur seperti tenaga kerja generasi yang lalu. Titik berat pekerjaan kini bergerak sangat cepat dari tenaga manual dan clerical ke knowledge-worker yang menolak menerima perintah ("komando") ala militer, cara yang diadopsi oleh dunia bisnis 100 tahun yang lalu.

Kecenderungan yang kini berlangsung adalah, angkatan kerja dituntut memiliki pengetahuan baru (*knowledge-intensive*, *high tech.-knowledgeable*), *high tech.-knowledgeable*) yang sesuai dinamika perubahan yang tengah berlangsung. Tenaga kerja di sektor jasa di negara maju (kini sekitar 70 persen) dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan tenaga paruh waktu (*part-timer*) juga semakin meningkat. Pola yang berubah ini menuntut "pengetahuan" baru dan "cara penanganan" (manajemen) yang baru. Human capital yang mengacu kepada pengetahuan, pendidikan, latihan, keahlian, ekspertis tenaga kerja perusahaan kini menjadi sangat penting, dibandingkan dengan waktu-waktu lampau.

Dalam ketegori workforce diversity, sedang berlangsung peningkatan umur manusia yang berdampak kepada meningkatnya umur lanjut memasuki angkatan kerja. Di AS dalam 20 tahun terakhir (sejak 1979) terjadi peningkatan umur median dari 34.7 tahun ke 37.8 (1995) dan diproyeksikan menjadi 40.5 pada tahun 2005, sedang berlangsung peningkatan umur manusia yang berdampak kepada meningkatnya umur lanjut memasuki

angkatan kerja. Di AS dalam 20 tahun terakhir (sejak 1979) terjadi peningkatan umur median dari 34.7 tahun ke 37.8 (1995) dan diproyeksikan menjadi 40.5 pada tahun 2005. Demikian pula tenaga kerja wanita termasuk wanita berkeluarga dan dual career secara global cenderung meningkat.

Bank teller, operator telepon, juru tik, semua kini menggunakan komputer sehingga penguasaan atas komputer bukan lagi fakultatif atau alternatif tetapi mutlak bagi angkatan kerja white collar sekarang ini. Berlangsungnya progress globalisasi dan teknologi di Indonesia juga tidak ketinggalan. Perhatikan iklan Arthur Anderson/Prasetyo Strategic Consulting, operator telepon, juru tik, semua kini menggunakan komputer sehingga penguasaan atas komputer bukan lagi fakultatif atau alternatif tetapi mutlak bagi angkatan kerja white collar sekarang ini.

Berlangsungnya progress globalisasi dan teknologi di Indonesia juga tidak ketinggalan. Perhatikan iklan Arthur Anderson/Prasetyo Strategic Consulting, yang membuka pelamar kerja untuk Information Technology Systems and Network Security Consultants Systems and Network Security Consultants (yang menguasai IT security products seperti Firewall etc.); Enterprise Solutions Risk Management Consultants (pengalaman dalam implementasi SAP review/audit, Oracle, project management); Banking Systems Specialist, Telecommunications System Consultants (a.l. berpengalaman dalam finance & accounting system, internet service provision, E-Commerce, EDP audit etc.); E-Business consultants, dan Integrated Customer Solutions Consultants.

Dinamika bisnis awal abad 21 sekarang mengandung kata-kata kunci seperti: high tech knowledge-based HR, strategic management, IT, e-business (banking, commerce, procurement etc.). Inilah antara lain tantangan manajer masa kini, dan angkatan kerja abad 21. Lembaga pendidikanpun perlu berubah, perlu menyesuaikan diri, tinggalkan paradigma lama agar tak tertinggal bersama keusangan abad yang lalu.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan strategis manajemen sumberdaya manusia dalam perusahaan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan (*library research*) dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pentingnya Sumberdaya Manusia

Menurut Mangkunegara (2013: 2), Sumber Daya adalah Segala sesuatu yang dpt dimanfaatkan (punya potensi untuk dimanfaatkan) untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia adalah sumber daya karena manusia (tenaga, pikiran, waktu) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia lain (melaksanakan program kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi).

Menurut Hasibuan (2002 : 89) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM

berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari Ilmu Manajemen (*Management Science*) yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan.

2.2. Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut A.F. Stoner (2006) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. MSDM juga dirtikan sebagai Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu dan masyarakat.

Foulkes (1975) memprediksi bahwa peran SDM dari waktu ke waktu akan semakin strategis dengan ucapan berikut: "For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don't think this any longer holds true. I think it's the work force and the company's inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production. … I think this will hold true even more in the future."

MSDM sesuai dengan fungsi MSDM yaitu hal ihwal staffing dan personalia dalam organisasi, yang mencakup analisis tugas/jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian dan pengembangan SDM. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer maka scope MSDM mencakup seluruh tugas tentang SDM yang diemban oleh setiap manajer. Dan aspek manajemen serta SDM demikian strategis dan demikian luasnya, maka MSDM melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Tantangan manajer masa kini adalah merespons perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif.

2.3. MSDM Strategis

Dessler (2000) mendefinisikan Manajemen SDM strategis sebagai berikut: "Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic role and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility". Jelaslah bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.

Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas, adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah (added value) sebagai tolok ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan added value yang maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage. Adanya SDM ekspertis: manajer strategis (strategic managers) dan SDM yang handal yang menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Value added adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan.

Manajemen SDM memiliki peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja /preparation and selection
   a. Persiapan

      Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan / forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya.
   b. Rekrutmen tenaga kerja/recruitment

      Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/*job description* dan juga spesifikasi pekerjaan/*job specification*.
   c. Seleksi tenaga kerja/selection

      Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya.
2. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation

   Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.
3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai/*compensation and protection*.

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu

2.4. Manajemen Sumberdaya Manusia sebagai Salah Satu Fungsi Perusahaan

Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan tiga fungsi lainnya: keuangan, pemasaran, operasi/produksi. Permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari peranan budaya perusahaan, pengaruh perubahan lingkungan luar dan dalam, sampai pada motivasi dan manajemen konflik, akan ikut menentukan kebijakan fungsional perusahaan tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Sebagai Langkah Strategis Perusahaan

Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Optimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat menuntut pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu antara pemahaman sistem dan manusia yang ditunjang oleh saling pengertian antar manajer fungsional.

Dewasa ini aspek pengembangan sumber daya manusia semakin mendapat perhatian khusus dari para pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam menentukan pola penentuan strategi dan kebijakan secara terpadu. Pengelolaan faktor sumber daya manusia sangat penting karena memegang peran utama dalam pelaksanaan kegiatan fungsi-fungsi yang lain dalam perusahaan.

3.2. Peran Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Organisasi

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yan professional semuanya menjadi tidak bermakna (Yuniarsih dan Suwatno, 2008).

Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri.

Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya (Yuniarsih dan Suwatno, 2008).

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut tentu manusia tersebut harus mempunyai nilai kompetensi, karakteristik kompentensi menurut Spencer and Spencer (1993 : 9-11) ada lima karakteristik kompentensi yaitu:

a. Motif (*motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong, perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu.
b. Sifat/ciri bawaan (*trait*), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi.
c. Konsep diri (*self concept*), sikap, nilai dari orang-orang.
d. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk memilih jawaban yang paling benar, tapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu.
e. Keterampilan (*skill*), kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu.

Walaupun demikian agar peran sumber daya manusia tersebut dapat sinkron dengan visi, misi, tujuan dan harapan organisasi maka manusia sebagai selah satu sumber daya harus dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi yang semakin kompetitif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan tersebut, menurut (Yuniarsih dan Suwatno, 2008) ada empat strategi utama untuk melakukan perubahan, yaitu dengan melakukan:

a. Pengendalian diri secara lebih baik dengan disertai kearifan.
b. Beradaftasi dengan perubahan yang terjadi sambil mengubah paradigma berfikir dan bertindak.
c. Komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan networking.
d. Penyelarasan dan/atau menyeimbangkan antara kematangan IQ,EQ dan ESQ.

Dengan stategi tesebut, sekurang-kurangnya sumber daya manusia dalam organisasi akan melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global yang cenderung bersifat tanpa batas.

Menurut Lengnick-Hall (2003:34-35) ada empat peran baru yang mesti dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi sejumlah tantangan global, yaitu:

a. Human Cafital Steward
b. Knowledge Facilitator.
c. Relationship Builder
d. Rapid Deployment Specialist

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudnya hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen.

MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencangkup masalah-masalah sebagai berikut:

a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan *job description, job specification, job requirement, dan job evaluation*.

b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right place* dan *the right man in the right job*.
c. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian.
d. Meramalkan permintaan dan penawaran sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
e. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
f. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
h. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan.
i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horisontal.
j. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangaonnya.

Peran MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit.Tenaga kerja manusia selain mampu, cakap, dan terampil, juga tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan karyawan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun pekerjaan manajemen manajer SDM terdiri dari :

a. Perencanaan

   Menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan.
b. Pengorganisasian

   Memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat devisi-devisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang. dan komunikasi, dan mengoordinasikan pekerjaan bawahan.
c. Penyusunan staf : Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepeda karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan.
d. Kepemimpinan

   Mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan.
e. Pengendalian

   Menetapkan standar seperti kuota penjualan,standar penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi, memerika untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan.

Konsep-konsep dan teknik yang dibutuhkan untuk menentukan aspek ”manusia” atau personil dalam manajemen, yaitu :

a. Melakukan analisis pekerjaan (menetukan pekerjaan setiap karyawan).
b. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan.
c. Memilih calon karyawan.

d. Mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru.
e. Mengatur upah dan gaji (memberikan konseling dan memberikan disiplin).
f. Memberikan insentif dan keuntungan.
g. Menilai prestasi.
h. Berkomunikasi (mewawancarai, memberiakn konseling dan memberikan disiplin).
i. Melatih dan mengembangkan para manajer.
j. Membangun komitmen karyawan.

4. Penutup

Sebagai salah satu pilar fungsi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan tonggak utama dalam pertimbangan pengambilan keputusan tiga fungsi lainnya: keuangan, pemasaran, operasi/produksi. Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Optimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Dessler, G. 2000. *Human Resource Management*. 8th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Foulkes, Fred K. 1975. Harvard Business Review, March-April 1975.

Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara.

Lengnick-Hall M.L. and Lengnick-Hall C.A. 2003. *Human resource management in the knowledge economy*, San Fransisco: Berrett-Kohler Publishers Inc.

Mangkunegara AA. Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Spencer, M. Lyle & Spencer, M. Signe., 1993. Competence at Work., Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Stoner, James A.F. 2006. *Manajemen*. Terjemahan. Jakarta : Erlangga.

Yuniarsih Tjutju dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung : Alfabeta.

PERANAN ILMU MANAJEMEN DALAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Giovani Tania Zebua, S.Pd., M.Si.M.[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ilmu manajemen dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaa (library research). Manajemen Peningkatan Mutu mengintegrasikan teknik-teknik manajemen yang mendasar, menghadirkan upaya-upaya peningkatan, dan peralatan teknis melalui pendekatan yang ketat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan. Karena itu makna kualitas adalah bagaimana pelanggan menerima barang yang bermutu itu dengan perasaan puas dan senang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Total Quality Management atau manajemen peningkatan mutu dalam manajemen sebuah sekolah sangat penting di dalam peningkatan mutu layanan. Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh maka dibutuhkan perencanaan dan kepemimpinan (Kepala Sekolah) yang matang yang dapat mengarahkan organisasi sekolah pada suatu bentuk kualitas ideal yang diharapkan yaitu usaha yang terus menerus untuk menciptakan kompetensi lulusan yang lebih baik serta kerjasama yang kompak (teamwork), baik secara internal organisasi sekolah maupun dengan pihak-pihak di luar sekolah.

Kata kunci : *manajemen* dan *mutu layanan pendidikan*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut diperlukan kesiapan bagi semua komponen pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam memberikan layanan kepada seluruh anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pada saat ini layanan pendidikan yang ada di masyarakat meliputi sekolah negeri dan swasta mengalami banyak kendala. Sekolah-sekolah negeri saat ini tidak punya keleluasaan untuk mengambil sumber pendanaan dari orang tua peserta didik sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi mutu layanan terhadap pelanggan pendidikan. Sedangkan sekolah-sekolah swasta masih lebih leluasa didalam mengambil sumber pendanaan dari orang tua peserta didik namun mereka harus bekerja ekstra keras di dalam meningkatkan mutu layanan karena kepuasan para pelanggan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Di bidang pendidikan, manajemen peningkatan mutu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip dan teknik yang menekankan bahwa peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Di dalam Manajemen Peningkatan Mutu (MPM) terkandung upaya: (1) mengendalikan proses yang berlangsung di lembaga pendidikan/sekolah baik kurikuler maupun administrasi,

[1] *Dosen Tetap STIE Pembangunan Nasional, Nias*

(2) melibatkan proses diagnosis dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosis, dan (3) peningkatan mutu harus didasarkan atas data dan fakta, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (4) peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, (5) peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan, dan (6) peningkatan mutu memiliki tujuan yang menyatakan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat.

Pentingnya layanan pendidikan yang bermutu yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah mutu layanan pendidikan yang rendah. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, yang salah satunya adalah pemberian pelayanan pendidikan yang masih sangat jauh dari harapan. Disatu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat, meningkatkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan karena sebagai pelanggan pendidikan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ilmu manajemen dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di Indonesia.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaa (*library research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan-tinajauan literatur dan pendapat-pendapat ahli.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Manajemen

Menurut Stoner (1992 : 8) manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Howard M. Carlisle menyatakan manajemen adalah proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan elemen-elemen suatu kelompok untuk mencapai tujuan secara efisien.

2.2. Tujuan Manajemen

Setiap aktivitas apapun selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian pula kegiatan manajemen. Manajemen dilaksanakan secara sistematis agar dapat mencapai produktivitas, berkualitas, efektif, dan efisien.

Aktivitas manajemen dikatakan produktif apabila menghasilkan output atau keluaran baik bersifat kuantitas maupun kualitas. Dalam dunia pendidikan kuantitas dapat diamati melalui jumlah tamatan yang dihasilkan. Sedangkan produktivitas dalam kualitas sukar diukur atau diamati dengan kasad mata namun demikian dapat berupa pujian dari orang lain atas kinerjanya.

Aktivitas manajemen dikatakan berkualitas apabila kualitas jasa produk atau jasa pendidikan melebihi harapan pelanggan dan pada gilirannya pelanggan memperoleh kepuasan.

2.3. Prinsip Manajemen

Sutomo dkk (2010; 7) mengemukakan prinsip-prinsip manajemen meliputi : efisiensi, efektivitas, pengelolaan, mengutamakan tugas pengelolaan, kerjasama dan kepemimpinan yang efektif.

2.4. Fungsi Manajemen

Para pakar manajemen seperti Fayol, Taylor, Terry mengemukakan bahwa fungsi manajemen sekurang-kurangnya mencakup empat hal yaitu :

a. Perencanaan (*planning*)

   Perencanaan dalam suatu organisasi apapun mempunyai kedudukan yang strategis karena melalui kegiatan perencanaan ini dapat diketahui kegiatan atau aktifitas apa saja yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

   Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua yang dapat dimaknai sebagai upaya mengatur tugas-tugas perorangan maupun kelompok dalam organisasi dan merancang bagaimana hubungan kerja antar unit organisasi.

c. Pengarahan (*actuating*)

   Pengarahan adalah upaya manajer untuk memotivasi para personil atau anggota organisasi berusaha dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

d. Pengawasan (*controlling*)

   Pengawasan merupakan fungsi keempat dari manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk mengetahui dan mengontrol pelaksanaan/aktivitas organisasi, menentukan keberhasilan organisasi dan menganalisis kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

2.5. Manajemen Peningkatan Mutu

Total Quality Management atau Manajemen Peningkatan Mutu dapat didefinisikan dari tiga kata yang dimilikinya : Total (keseluruhan, terpadu), quality (kualitas, derajat/tingkat keunggulan barang atau jasa), management (tindakan, seni, cara pengendalian, pengarahan). Menurut Tjiptono, Total Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Singkatnya TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap barang dan jasa yang diberikan, serta menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. Dasar pemikirannya TQM sangatlah sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, Total Quality Management (TQM) merupakan teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan

personilnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkesinambungan yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan.

Manajemen peningkatan mutu mempersyaratkan integrasi dari berbagai faktor yang perlu diintegrasikan. Faktor itu adalah klien (pelanggan), kepemimpinan, tim, proses, dan struktur.

Pelanggan atau klien

Dalam organisasi manajemen peningkatan mutu pelanggan atau klien adalah seseorang atau kelompok yang menerima produk atau jasa layanan. Jadi, klien tidak berada secara eksternal terhadap organisasi tetapi berada pada setiap tahapan yang mempersyaratkan penyempurnaan hasil sebuah produk atau pemberian layanan. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat mata rantai dari klien, yang keterkaitannya bersama dengan proses. Hal-hal yang tercakup di dalam Manajemen Peningkatan Mutu terhadap pelanggan adalah nilai-nilai organisasi, visi, dan misi yang perlu dikomunikasikan, yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran.

Kepemimpinan

Jika integritas moral merupakan hal yang fundamental bagi Manajemen Peningkatan Mutu, maka kepemimpinan merupakan cara mengerjakannya. Kepemimpinan dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu adalah menetapkan dan mengendalikan visi. Manajemen Peningkatan Mutu secara tajam menggambarkan perbedaan antara memimpin, memanaj, dan mengadministrasikan. Mutu kepemimpinan mencukupi : visi, kreativitas, sensitivitas, pemberdayaan (empowerment), manajemen perubahan. Pemimpin dalam Manajemen Peningkatan Mutu pada dasarnya peduli dengan nilai-nilai dan orang, menetapkan arah dan mengijinkan orang untuk mencapai target, yang berhubungan dengan hal-hal makro maupun mikro.

Kepemimpinan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan lembaga pendidikan. Ketepatan dalam menerapkan teknik kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tercapainya tujuan organisasi. Dari hasil penelitian De Matthews (2014) pendistribusian kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan kerajinan guru dalam proses belajar mengajar, dukungan guru serta terciptanya budaya sekolah yang positif.

Tim

Sebuah tim merupakan kualitas kelompok. Hampir semua kepustakaan menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan hubungan interpersonal yang efektif sebagai dasar terjadinya kerja kelompok yang efektif. Baik secara teoretik maupun praktek tim dipandang sebagai hal yang fundamental terhadap manajemen mutu di dalam organisasi.

Proses

Kunci penting dalam manajemen mutu adalah menetapkan komponen proses kerja. Pada dasarnya, sekali klien menetapkan persyaratan yang telah disepakati, maka hal penting untuk dilakukan adalah menetapkan proses dan prosedur yang menjamin kesesuaiannya dengan persyaratan.

Struktur

Organisasi yang mencoba memperkenalkan Manajemen Peningkatan Mutu tanpa meninjau strukturnya mungkin akan menghadapi kegagalan. Beberapa organisasi memiliki struktur yang berfokus pada klien cenderung

mendasarkan diri pada hirarki formal sekaligus membatasi kerja praktis yang berfokus. Misalnya: organisasi secara utuh memiliki "kedekatan" dengan klien, pemasok berbicara langsung dengan klien.

3. Pembahasan

3.1. Teknik Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Dikmenum Depdikbud (1998/1999) mengedepankan empat teknik manajemen peningkatan mutu, yaitu : (a) *School Review*, (b) *Benchmarking*, (c) *Quality Assurance*, dan (d) *Quality Control*.

School Review adalah proses mengharuskan seluruh komponen sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan misalnya orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan sekolah, program dan pelaksanaannya, serta mutu lulusan. Dengan school review diharapkan akan dapat dihasilkan laporan yang dapat membeberkan kelemahan-kelemahan, kekuatan, prestasi sekolah, dan memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan strategis pengembangan sekolah di masa mendatang, yang berjangka sekitar tiga atau empat tahun mendatang.

Benchmarking merupakan kegiatan untuk menetapkan standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu.

Quality Assurance sifatnya *process oriented.* Artinya, konsep ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat diharapkan hasil (output) yang memenuhi standar yang ditentukan pula. Agar proses berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan audit atau pengecekan secara berkesinambungan. Sistem audit ini harus dilembagakan, sehingga menjadi subsistem sekolah. Sub sistem inilah yang disebut *quality* assurance. Untuk itu, perlu disusun suatu prosedur dan mekanisme, sehingga checking dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua komponen dalam sekolah. Hasil pengecekan merupakan balikan *(feedback)* bagi sekolah, yang digunakan untuk meningkatkan mutu proses pendidikan. Dengan *quality assurance* ini pihak sekolah meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa sekolah selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para peserta didiknya. Jadi, quality assurance adalah suatu sub sistem dari suatu sekolah yang bertujuan untuk: (a) membantu sekolah dalam menilai dan mengkaji pelaksanaan serta hasil pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar, (b) menilai program-program yang relevan, yang dapat membantu sekolah, dan (c) memperkuat akuntabilitas dan mutu lulusan sekolah.

Quality Control. Merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas out-put yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah mutu out-put sesuai dengan standar. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas.

Murgatroyd dan Morgan (1994) mengungkapkan tiga teknik mendasar dalam menetapkan mutu, yaitu (a) *quality assurance, (b) contract conformance,* dan (c)*customer-driven.*

Quality Assurance mengacu pada penetapan standar, metode yang memadai, dan tuntutan mutu oleh suatu kelompok/lembaga para pakar yang diikuti oleh proses pengawasan dan evaluasi dan yang memeriksa sejauh mana pelaksanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal penting dalam proses *quality assurance* ini adalah publikasi dari standar yang ditetapkan itu.

Contract Conformance. Mutu standar harus ditetapkan secara spesifik melalui negosiasi dalam bentuk sebuah kontrak. Mutu harus dilihat apakah punya kesesuaian dengan komitmen yang spesifik tersebut. Yang membedakan antara quality assurance dengan contract conformance adalah bahwa spesifikasi mutu dibuat oleh orang yang membuat tugas kerja (lokal), bukan oleh panel (jajaran para pakar).

Customer-driven Quality mengacu pada pemikiran mutu dari mereka yang menerima produk atau layanan. Produk atau layanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan dan kualitasnya ditentukan oleh klien. Produk atau layanan harus disesuaikan dengan tuntutan dan harapan para klien.

Manajemen Peningkatan Mutu (MPM) yang efektif perlu juga memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi mutu yang dikemukakan oleh Murgatroyd dan Morgan (1994) sebagai "3 Cs of TQM", yaitu: *culture, commitment,* dan*communication.*

Budaya yang dimaksudkan di sini meliputi aturan-aturan, asumsi-asumsi, dan nilai-nilai yang mengikat kebersamaan dalam organisasi. Keberhasilan Manajemen Peningkatan Mutu dari suatu organisasi ditentukan bagaimana organisasi menciptakan budaya, seperti: (a) inovasi dipandang bernilai tinggi, (b) status dinomorduakan, yang dipentingkan adalah performansi dan kontribusi, (c) kepemimpinan adalah sebuah kunci dari kegiatan/tindakan, bukan posisi, (d) ganjaran dibagi rata melalui kerja tim, (e) pengembangan, belajar Sdan pelatihan dipandang sebagai sarana penunjang, dan (f) pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang menantang didukung oleh pengembangan yang berkelanjutan dan keberhasilan seharusnya merupakan iklim untuk memotivasi diri sendiri.

3.2. Mutu Layanan Pendidikan

Suatu pendidikan dikatakan bermutu tergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan itu berada dalam suatu system organisasi yang saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Apabila mutu dari pendidikan dalam beberapa bagian dari sistem baik, tetapi mutu dari bagian sistem yang lain kurang baik, maka hal tersbut akan menyebabkan berkurangnya mutu pendidikan secara keseluruhan.

Apabila mutu dikaitkan dalam penyelenggaraan pendidikan maka dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib baik internal maupun eksternal. Azwar (1996) berpendapat masalah mutu akan muncul apabila unsur masukan, proses, lingkungan serta keluaran menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Mutu adalah penilaian sejauhmana produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Di pendidikan standar ini dapat dirumuskan sementara ini melalui hasil belajar dari mata pelajaran skolistik yang dapat diukur secara kuantatif dan pengamatan yang bersifak kualitatif khususnya untuk bidang studi pendidikan agama, pendidikan moral dan budi pekerti. Untuk konsep mutu pendidikan ini mengacu kepada kebijakan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana dan tenaga kependidikan. Mutu ini harus mengacu tercapainya kemajuan yang dilandasi dengan perubahan yang terencana. Didalam buku Menuju Pendidikan Dasar yang bermutu, dijelaskan ada dua startegi pendidik mutu yaitu pendidikan yang berorientasi akademi untuk

memberikan dasar minimal dalam perjalanan pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi dengan keterampilan hidup.

Mutu pendidikan ini tidak ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran saja, tapi disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Oleh sebab itu pendidikan disekolah harus ada keselarasan antara program pendidikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa mulia sehat, berilmu, cakap, kreaif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk tercapainya tujuan pendidikan tersebut diatas, tergantung banyak faktor antara lain:

1. Guru yang berkualitas dan berwewenang yang mampu melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang efektif. Mampu memanfaatkan fasilitas dan situasi yang ada secara maksimal.
2. Karier guru yang akan menempati dari daerah satu ke daerah yang lain serta pendayagunaan di daerah secara optimal.
3. Kesejahteraan guru dapat terjamin sehingga dapat merefleksikan kondisi kerja guru secara layak.
4. Manajemen pendidikan yang dijamin undang-undang dan praturan yang kondusif yang diikuti dengan peran serta masyarakat, organisasi profesi guru yang ikut terlibat dalam memberdayakan sumber daya manusia dan alam baik secara daerah, regional maupun nasional.
5. Proses belajar mengajar yang kondusif dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang relevan, sehingga menjamin tercapainya tujuan.
6. Peserta didik yang sehat, siap belajar di sekolah.
7. Sarana, prasarana dan fasilitas yang cukup memadai, buku-buku yang lengkap, buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, alat pelajaran dan sebagainya.

Semua faktor yang diperlukan untuk tercapainya tujuan di atas ini perlu dipenuhi serta diperbaiki dengan menggunakan sistem manajeman peningkatan mutu . Dengan terpenuhinya beberapa faktor diatas, maka apa yang diharapkan agar meningkatnya mutu pendidikan pasti akan tercapai.

Depdiknas (2003:03) mengemukakan bahwa : "mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan, sebagian kecil saja sekolah menunjukan peningkatan mutu pendidikan." Jadi pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar konsumen (pelanggan) memperoleh kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab para siswa dan masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kehidupan di masa yang akan datang, terlebih peningkatan mutu pendidikan yang sudah diperoleh belum menggembirakan. Mutu pendidikan berkait erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu.

3.3. Peranan Manajemen Bagi Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Berdasarkan paparan teoritis diatas maka dapat kita ambil benang penghubung bahwa penerapan manajemen peningkatan mutu atau total quality management dalam suatu lembaga pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap mutu layanan lembaga tersebut terhadap konsumen atau pelanggan. Didukung hasil penelitian dari Umar Faruq Unal (2001) bahwa penerapan Total Quality management dapat meningkatkan komunikasi, mengangkat semangat kerja karyawan, peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi proses, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.

Mutu layanan pendidikan bisa dikatakan baik apabila konsumen sebagai pelanggan merasa puas terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut. Hal itu dapat terwujud jika manajemen peningkatan mutu atau total quality manajemen dapat diterapkan dengan baik di lembaga tersebut. Semua fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Manajemen Peningkatan Mutu mengintegrasikan teknik-teknik manajemen yang mendasar, menghadirkan upaya-upaya peningkatan, dan peralatan teknis melalui pendekatan yang ketat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan. Karena itu makna kualitas adalah bagaimana pelanggan menerima barang yang bermutu itu dengan perasaan puas dan senang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Total Quality Management atau manajemen peningkatan mutu dalam manajemen sebuah sekolah sangat penting di dalam peningkatan mutu layanan. Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh maka dibutuhkan perencanaan dan kepemimpinan (Kepala Sekolah) yang matang yang dapat mengarahkan organisasi sekolah pada suatu bentuk kualitas ideal yang diharapkan yaitu usaha yang terus menerus untuk menciptakan kompetensi lulusan yang lebih baik serta kerjasama yang kompak (*teamwork*), baik secara internal organisasi sekolah maupun dengan pihak-pihak di luar sekolah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan yang ada di Indonesia diharapkan untuk dapat menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu (Total Quality Management) yang disesuaikan dengan budaya organisasi masing-masing lembaga.

Daftar Pustaka

Abd. Karim Masaong. 2004. *Keterkaitan antara Semangat Kerja Guru dengan Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah.* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Juli. Tahun Ke-10, No. 049: hlm.343.

Achmad Supriyanto & Zaini Rohmad. 2002. *Pengembangan dan Implementasi TQM pada Sistem Layanan Akademik. Jurnal Ilmu Pendidikan.* Februari, Jilid 9, Nomor l:hlm.79-80.

David De Matthews. 2014. *Principal and Teacher Collaboration: An Exploration ofDistributed Leadership in Professional Learning Communities. International*. Journal of Educational Leadership and Management Vol. 2 No. 2 July 2014 pp. 176-206

Dikmenum Depdikbud. 1998/1999. Manajemen Peningkatan Mutu dalam *Suplemen 2 Pelatihan Kepala Sekolah Menengah Umum.* Jakarta: Depdikbud.

Murgatoyd, Stephen dan Morgan, Collin. Total *Quality Management and the School.*Buckingham: Open University Press.

Sugiyo. 2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di sekolah.* Semarang : Widya Karya.

Umar Faruq Unal. 2001. *Aplication Of Total Quality Management In Higher Educational Institution.* International Journal of Qafqaz University Spring Number 7

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. No. 20 Tahun 2003. Jakarta :Sekretaris Negara RI. 2003.

ANALISIS INVESTASI ASING DAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nelson Pinem[1]

Abstrak

Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya Jumlah Uang Beredar berpengaruh negative Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar ditentukan oleh hasil interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan, serta bank sentral. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2011-2016. Berdasarkan 3. Hasil analisa regresi berganda secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,179 atau sama dengan 17,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 17,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara. Berdasarkan tabel koefisien, dapat diketahui bahwa besarnya nlai t = -720 sedangkan segnifikanya nlai t = 1,767 sedangkan segnifikanya sebasar = 0,5092> 0,05.. Jika terjadi kenaikan Investasi Asing, maka akan terjadi Pertumbuhan Ekonomi.Jenis data yang digunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara StudiPustaka (LibraryResearch), PenelitianLapangan (FieldResearch), dan pengolahan data dilakukan dengan alat batu program statistic. Pengujian Asumsi Klasik yang digunakan penulis meliputi Uji Normalitas, Uji heteroskedasitas. Sedangkan Pengujian Hipotesis yang digunakan penulis adalah analisis statistic regresi linier Berganda.Penulis telah menganalisis dan mengevaluasi mengenai Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : Jumlah Uang Beredar , Investasi Asing, Pertumbuhan Ekonomi**.**

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang perekonomian. Pembangunan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan di ikuti pembangunan berbagai sektorlain, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, upah, ekspor, dan ketenagakerjaan yang semua ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, karena kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi secarati daklangsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Jumlah uang beredar sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu negara. Saat jumlah uang beredar tidak mencukupi kegiatan transaksi pada satu periode tertentu, maka kegiatan ekonomi akan macet.

Tabel 1.1
Investasi Asing, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Sumatera Utara

Tahun	triwulan	pertubuhan ekonomi	Investasi Asing	Jumlah uang beredar
2011	I	6.32	39,5	1,010.000.000.000
	II	6.80	43,1	1.837.000.000.000
	III	6.76	46,5	1.379.000.000.000
	IV	6.36	46,2	3.463.000.000.000
2012	I	6,25	51,5	896.900.000.000
	II	6,23	56,1	2.730.000.000.000

[1] *Dosen Fakultas Ekonomi UISU*

	III	6,28	56,6	3.403.000.000.000
	IV	6,13	56,8	3.780.000.000.000
2013	I	6,15	65,5	2.200.000.000.000
	II	6,11	66,7	1.686.000.000.000
	III	5,94	67	8.801.000.000.000
	IV	5,83	71,2	4.262.000.000.000
2014	I	5,3	72	2.495.000.000.000
	II	5,5	78	2.455.000.000.000
	III	4,7	78,3	4.476.000.000.000
	IV	4,7	78,7	3.481.000.000.000
2015	I	4,82	82,1	1.936.000.000.000
	II	5,13	92,2	3.329.000.000.000
	III	5,08	92,5	5.465.000.000.000
	IV	5,4	99,2	4.304.000.000.000
2016	I	4,66	96,1	4.056.000.000.000
	II	5.50	99,4	6.062.000.000.000
	III	5.28	99,7	920.960.000.000
	IV	05.06	101,3	3.791.000.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bank Indonesia 2011-2016, Badan Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul**" Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang yang Beredar terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara".**

1.2. IdentifikasiMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah Penyebab Berpengaruh Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.3. RumusanMasalah

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Jumlah Uang yang Beredar terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Pengaruh Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provsu ?

1.4. Batasan Masalah

Berdasarakan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.5. TujuanPenelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Investasi Asing dan Jumlah Uang yang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.6. ManfaatPenelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Bank Indonesia dan Badan Penanaman Modal dalam mengambil sikap pada pembahasan Innvestasi Asing dan Jumlah Uang yang beredar. Investasi Asing dan Jumlah Uang yang beredar guna menghasilkan data yang berkualitas.
2. Untuk menerapkan teori yang telah diambil dibangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti dalam mengevaluasi Investasi Asing dan Jumlah Uang yang beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Landasan Teoritis

2.1. Uraian Teori

2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan output ini tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro:2006). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita.

2.1.3 Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB = C + I + G + (X-M).

1. Teori Investasi

1. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi.
   Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).
2. Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi.

2. Jenis Investasi

Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment.

1. seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri;
2. pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan
3. pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan beberupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

2.2 Penanaman Modal Asing (PMA).

2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing.

Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. . Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

2.2.2 Teori Penanaman Modal Asing

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk penanaman modal asing (PMA), yaitu :

Menurut Muhammad Aulia Zul Thirafi (2012) dalam jurnalnya, penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri.

2.2.3 Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penanaman modal Asing dapat dimanfaatkan oleh Negara berkembang dalam memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi, untuk menjaga dan mempertahakan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan perubahan dan perombakan yang substansi.

2.3 Jumlah Uang Yang Beredar

Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian sangat penting untuk membedakan diantara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan telah diedarkan oleh Bank Sentral,dimana mata uang tersebut terdiri dari dua jenis yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal.

a) Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1)

Uang beredar dalam arti sempit (M1) didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral (currency plus demand deposits).

M1 =C + DD

Dimana :

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = Currency (uang kartal)

DD = Demand Deposits (uang giral)

Uang giral (DD) di sini hanya mencakup pada saldo rekening koran/giro milik masyarakat umum yang disimpian di bank. Sedangkan saldo rekening koran milik bank pada bank lain atau bank sentral (Bank Indonesia) ataupun saldorekening koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukkan dalam definisi DD.

b) Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

Berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.

M2 = M1 + TD +SD

Dimana :

TD = time deposite (deposito berjangka)

SD = savings deposits (saldo tabungan)

c) Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

Definisi jumlah uang beredar dalam arti lebih luas adalah M3, yang mencakup semua deposito berjangka (TD) dan saldo tabungan (SD), besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau quasi money.

M3 = M2 + QM

Dimana :

QM = Quasi Money

Teori - teori jumlah uang beredar oleh beberapa pakar ekonomi :

1. Teori Cambridge (Marshall-Pigou)Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegangan kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang berbeda dengan bentuk kekayaan lain). Sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Uang dipegang atau diminta oleh seseorang karena sangat mempermudah transaksi atau kegiatan – kegiatan ekonomi lain dari orang tersebut.
2. Teori Keynes Teori uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betu – betul berbeda dengan teori moneter tradisi Klasik. Pada hakekatnya perbedaan ini terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value dan bukan hanya sebagai means of exchange. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori Liquidity Preference.

2.3.1 Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhanekonomi. Apabila JUB meningkat akan mengakibatkan inflasi sehinggapermintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi menurun.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melambat dari 5,2%. pada triwulan lalu menjadi 4,5%, di bawahpertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,0%.Ditengah tren perbaikan pertumbuhan ekonomi yang

terlihatsejak awal tahun 2016, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017tersebut justru tercatat yang terendah dalam 5 tahun terakhir.Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumut terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor,khususnya antar daerah sementara ekspor luar negeri membaik. Perlambatan ekspor tersebutdibarengi oleh meningkatnya impor terutama impor luar negeri.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahuluakan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Walaupun ruang linkupnya hampir sama namun karena objek dan periode waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, bahwa dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh dari variabel-variabel investasi asing, perkembangan ekonomi yang diproxy dengan produk domestik regional bruto Provinsi Sumatera Utara, jumlah Uang yang beredar dan Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Sumatera Utara sebagai variabel bebas terhadap variabel Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebagai variabel terikat. Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

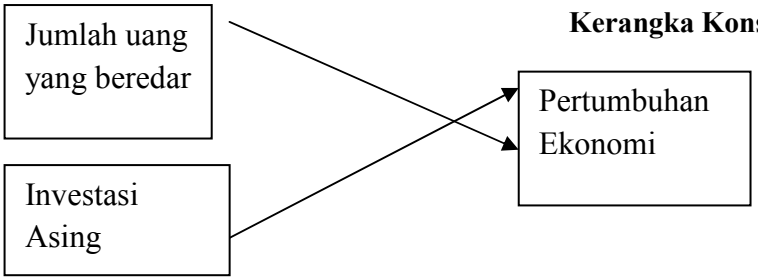

Bahwa dari kerangka konseptual ini, kita dapat melihat dan mengetahui bahwa variabel independen (Investasi Asing, dan Jumlah Uang yang beredar,) mempengaruhi faktor dependen (Pertumbuhan Ekonomi).

Metode Penelitian

3.1. Tempat, Objek dan Waktu Penilitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JL. Balai Kota No. 4 Kesawan Medan (20111), No.Tlp (061-4150500), No.Fax (061- 4152777) Indonesia.

3.1.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengaruh Investasi Asing dan Jumlah uang yang beredar dalam Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

3.1.3. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini di laksanakan pada bulan Desember 2017 s/d Maret 2018 . Berikut ini tabel waktu penelitian yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember2017				Januari2017				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PengajuanJudul																				
2	Pencarian Data																				
3	PenyusunanData																				
4	BimbinganProposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	PenyusunanSkripsi																				
7	BimbinganSkripsi																				
8	SidangMejaHijau																				

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek bagi penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Dipilih nya provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan Provinsi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk di kembangkan..Populasi dalam penelitian ini adalah Investasi yang di teliti yaitu dalam bentuk penanaman modal, investasi asing (PMA) sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2016. Laporan Uang Beredar per Tahun dari Bank Indonesia pada tahun 2011 hingga 2016 di Sumatera Utara.

3.2.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data investasi asing (PMA) Dimana data yang tersedia atas pencatatan setiap triwulan nya dan Jumlah Uang Beredar per Triwulan dari Bank Indonesia di Sumatera Utara.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Pustaka *(Library Research)*

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dengan cara membaca buku-buku dan literature lainnya baik yang di wajibkan maupun yang di anjurkan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Pada metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil dari semua data yang di dapatkan dari

kantor Bank Indonesia (BI), dan data publikasi dari website Badan Pusat statistik Sumatera Utara, dan website Penanaman Modal.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dan Regresi Linier Berganda.

3.4.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif Kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Analisis deskriptif merupakan teknikan alisis untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu daerah berdasarkan data yang sudah di kumpulkan, diolah, maupun yang sudah ada dalam penyajian informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis ini dapat berupa gambaran perekonomian suatu daerah, potensi daerah, kondisi pemerintahan, strategi kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.4.2. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variable terikatnya (dependen) merupakan fungsi linier dari beberapa variable bebas (independen). Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti ,pengaruh beberapa variable yang berkorelasi dengan variable yang diuji. Persamaan Regresi linear berganda:

$Y= a+ b1X1 + b2X2$

Keterangan:

Y= Pertumbuhan Ekonomi

X1= Investasi Asing

X2= Jumlah Uang Beredar

b1danb2=Koefisien

a=Konstanta

3.5. Pengujian Kualitas Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Investasi Asing dan Jumlah Uang yang Beredar (Variabelbebas) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Variabelterikat) Di Sumatera Utara. Sebelum analisa regresi linear berganda dilakukan maka harus diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk memastikan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan apakah model regresi digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan auto kolerasi. Jika terpenuhi maka model analisislayak untuk digunakan.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu,uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi, Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasar nya,Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (Ujiparametrik) adalah data haru smemiliki distribusi normal (atau berdistribusi normal).

Cara untuk mendeteksi nya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standar dized Residual sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka *residual* pada model regresiter sebutter distribusi secara normal.

2. Uji Multikolenearitas

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejalamultikolinearitas) atau tidak. Multikolerasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjad ipada hubungan di antara variable bebas. Ujimultikorelasi perlu dilakukan jika jumlah variable independen (variabel bebas) lebih dari satu. Ada beberapa cara mendeteksi ada tidak nya multikolinearitas, sebagai berikut:

a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variable bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
b. Menganalisis korelasi di antara variabel bebas. Jika di antara variabel bebasa dakorelasi yang cukup tinggi (lebih besar dari pada 0,90), hal ini merupakan indikasia dan yamultikolinearitas.
c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dainilai VIF (*variance- inflatingfactor*). JikaVIF<10,tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.
d. Nilai *Eigenvalue* sejumlah satu atau lebih variable bebas yang mendekati nol memberikan petunjuka dan yamultikolieritas.

3. Uji Heterokedatisitas

Uji heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan / observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut homokedatisitas. Model regresiyang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedasititas. Ada bebera pacara untuk mendeteksi ada tidak nya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat *scatterplot* serta melalui /menggunakan ujigletjer, ujipark, dan uji White. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (dependen) ZPRED dengan residual nyaSRESID.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasia dalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baikadalah yang bebas dari autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW) pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. du <dw<4 – du, maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi

b. dw<dl atau dw>4 – dl, maka H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

c. dl<dw<du atau 4–du<dw<4–dl,artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3.5.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uji F)

1. Uji t (UjiKoefisien Regresi Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap melakukan Uji T sebagaiberikut:

1. Menentukan hipotesis

a. Ho: X1 (InvestasiAsing) tidak berpengaruh terhadap Y (Pertumbuhan EKonomi).
X2 (Jumlah Uang Beredar) berpengaruh terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi)

b. Ha: X1 (InvestasiAsing) berpengaruh terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi)
X2 (Jumlah Uang Beredar) tidak berpengaruh terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi)

2.Menentukan tingkat signifikansi:
Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi α =5%

3.Nilai signifikansi Dari output dapat dilihat dari nilai signifikansi

4. KriteriaPengujian
Ho diterima, Jikanilai Sig.>0,05
Ho ditolak, jikanilai Sig. ≤0.05

5. Membandingkan signifikansi

6. Kesimpulan

2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Uji F di gunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut17:

1. Menentukan Hipotesis.
a.Ho:X1 (Investasi Asing),X2(Jumlah Uang Beredar), tidak berpengaruh terhadap Y(Pertumbuhan Ekonomi).
b.Ha:X1 (Investasi Asing), X2 (Jumlah Uang Beredar), ber pengaruh terhadap Y (Pertumbuhan Ekonomi).

2. Menentukan tingkat signifikan
Tingkat signifikan menggunakan α=5%(signifikansi 5% atau 0,05% adalah ukuran standart yang sering di gunakan dalam Penelitian.

3. Kriteria pengujian
a. **Ho diterima**, jikasignifikansi> 0,05

b. **Ho ditolak**, jikasignifikansi≤ 0,05

4. Membandingkan signifikansi
5. Kesimpulan

3. Koefisiensi Determinasi(R^2)

Koefisien determinasi(R^2) pada inti nya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variable dependen.Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

3.6 Variabel Penelitian

Definisi variable dari variabel independendan dependen yang dijadikan indicator pengamatan dan penelitian ini adalah:

Tabel 3.2
Definisi Variabel Penelitian

	Variabel	DefinisiVariabel
Investasi Asing	Independen(X1)	Investasi Asing diperoleh dari website Penanaman Modal Asing Mulai tahun2011sampai2016berupapersentase(%).
Jumlah Uang Beredar	Independen(X2)	Uang beredar diperoleh dari Bank Indonesia (BI) mulaitahun2011sampai 2015 berupapersentase(%)
Pertumbuhan Ekonomi	Dependen(Y)	Pertumbuhan Ekonomi.

Variabel penelitian adalah suatu hal yang ber bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang halter sebut kemudian ditarik kesimpulan.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah Tiga variabel yang terdiri dari:Jumlah Uang Beredar (M1), Investasi Asing (PMA), dan Pertumbuhan Ekonomi.Adapun variabel tersebut adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi dilambangkan sebagai variabel tidak bebas (dependent variable).
2. Jumlah Uang Beredar (M1) dilambang kan sebagai variabel bebas (independent variable).

Investasi Asing (PMA) dilambangkan sebagai variabel bebas (independent variable).

Gambaran Umum

4.1. Sejarah SingkatProvinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara ber ibukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utaraprovinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara

tahun 1990 adalah 143 jiwa per km2 dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km2, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Nilai Budaya :

Susunan masyarakat Sumatera Utara adalah berdasarkan geneologis teritorial seperti Batak Toba, Mandailing dan Nias. Sedangkan suku Melayu berdasarkan teritorial. Bila ditinjau dari garis keturunan maka suku Batak dan Nias adalah patrilinial, sedang suku Melayu adalah parental (keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu).

Falsafah Masyarakat Melayu :

Etnik Melayu adalah salah satu kelompok etnik yang terdapat di Propinxi Sumatera Utara. Mereka merasa satu kebudayaan dengan etnik Melayu di berbagai kawasan, seperti di Riau, Jambi,Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan, dan lainnya. Begitu juga orang Melayu diSemenanjung Malaysia, Sabah, Serawak, Pattani, Kamboka, Srilanka, Madagaskar, dan lain-lainnya.

Provinsi Sumatera Utara. Kita harapkan agar budaya Melayu berkekalan di tengah situasi globalisasi, terutama di kalangan geenrasi muda. Termasuk terapannya dalam melanjutkan nilai-nilai dan filsafat Melayu bagi para jaka dan dara di Kota Medan. Namun sebelumnya dikaji terlebih dahulu menegnai Dunia Melayu/

Falsafah Masyarakat Batak :

Dalihan Natolu sebagai hukum adat Batak yang mempunyai arti tumpuan yang tiga yang dimaknai sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak.

Dalihan Natolu meliputi :

1. Dongan Sabutuha (saudara semarga).
2. Hula-hula (ipar, baik adik atau kakak laki-laki dari istri).
3. Boru (keluarga dari pihak laki-laki).

4.2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

Visi : Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

Misi :

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

4.3. Arti dan Makna Logo Provinsi Sumatera Utara

Gambar 4.1
Logo Provinsi Sumatera Utara

a. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, adalah lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
b. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
c. Pabrik. pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, dauntembakau, ikan. daun padi dan tulisan "SUMATERAUTARA", melambangkan daerah yang indah permai, mashur dengan kekakayaan alamnya yang berlimpah-limpah.
d. Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI.
e. Tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta dan pembela keadilan.
f. Bukit barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan, kegotong-royongan yang dinamis.
g. Motto Daerah , adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

Analisis Dan Evaluasi

5.1 Perkembangan Jumlah Uang Berdear di Provinsi Sumatera Utara

Jumlah uang beredar (money supply) adalah jumlah uang yang beredar dalam sebuah perekonomian. Pengertian jumlah uang beredar dapat dilihat secara sempit dan luas. Secara sempit uang beredarter diri dari uang kartal dan deposito yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Jumlah uang beredar dalam artian sempit ini disebut dengan M. Pengertian uang beredar secara luas dinamakan M2 dan M3 adalah M1 ditambah tabungan dan simpanan berjangka lain yang jangka nya lebih pendek.

5.2 Perkembangan Investasi Asing di Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan perekonomian yang baik merupakan sebuah tujuan negara berkembang seperti Indonesia yang ingin dicapai agar dapat bersaing dengan negara maju. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki maka diperlukan sejumlah biaya investasi yang berasal dari tabungan nasional.

Menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terjadi kenaikan setiap triwulan Pada tahun 2011 triwulan I hingga triwulan IV yakni sebesar 6.32%. Kemudian pada triwulan IV Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi 6.36%. Pada tahun 2012 triwulan I hingga triwulan IV yakni sebesar 6,25% di Provinsi Sumatera Utara cenderung turun dari tahun sebelumnya dan dimana triwulan IV sebesar6,13 menurun dari triwulan sebelumnya. Pada tahun 2013 triwulan I cenderung naik hingga triwulan IV yakni sebesar 6.15 %. Kemudian pada triwulan IV Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menurun drastis menjadi 5.83 % . Pada tahun 2014 triwulan I hingga triwulan IV yakni sebesar5.53%. Kemudian pada triwulan IV Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menurun dari triwulan sebelumnya menjadi 4.47 %.Pada tahun 2015 triwulan I hingga triwulan IV yakni sebesar 4.82 % naik dari triwulan sebelumn. Kemudian pada triwulan IV Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi 5.40 %. Pada tahun 2016 triwulan I hingga triwulan IV yakni sebesar 4.66 %. Kemudian pada triwulan IV Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi 5.06 %

5.4 Teknik Analisis Data

5.4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 5.4
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PertumbuhanEkonomi	24	4,66	680,00	179,2588	278,96823
InvestasiAsing	24	39,50	101,30	72,3417	19,98897
JumlahUangBeredar	24	1,01	920,96	41,9249	187,24448
Valid N (listwise)	24				

Sumber : data diolah

Jumlah Sampel (n) Penelitian Pertumbuhan Ekonomi sebesar24, dan (Mean) Rata-rata data penelitian sebesar 179,2588, dengan nilai Std.Deviation sebesar 278,96823. Jumlah Sampel (n) Penelitian Jumlah Uang Beredar sebesar 24, dan (mean) Rata-rata data penelitian sebesar 41,9249, dengan nilai Std. Deviation sebesar 187,24448. Jumlah Sampel (n) Penelitian Investasi Asing sebesar 24, dan (mean) Rata-rata data penelitian sebesar 72,3417, dengan nilai Std. Deviation sebesar 19,98897.

5.4.2 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5.5
Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	JumlahUangBeredar, InvestasiAsing[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi
b. All requested variables entered.

Dari output dapat dilihat diatas, bahwa variable independen yang dimasukkankedalam model adalah Investasi asing dan variable dependennya adalah pertumbuhan ekonomi dan tidak ada variable yang dikeluarkan. Sedangkan model regres imenggunakan Enter.

5.5. Pengujian Kualitas Data

5.5.1. Uji Asumsi Klasik

1.Uji Normalitas

Uji normalitas data dengan menggunakan *bell shaped* . berdasarkan hasil pengujian diperoleh dengan tamapilan grafik histogram menunjukkan bahwa variable lterlihat normal dan bergaris seimbang. Hasil pengujian tersebut :

Gambar 5.1
Grafik Kurva Normal

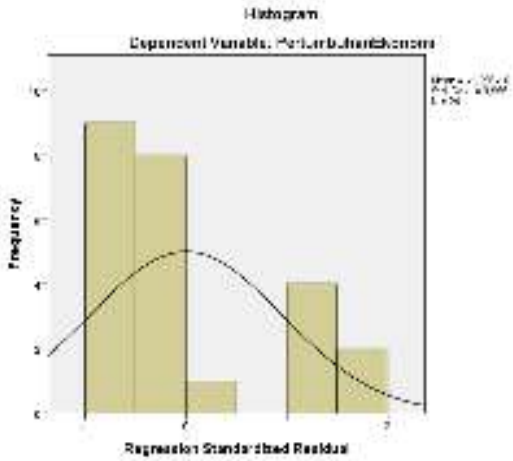

Gambar 5.2
Grafik Normal P-P Plot

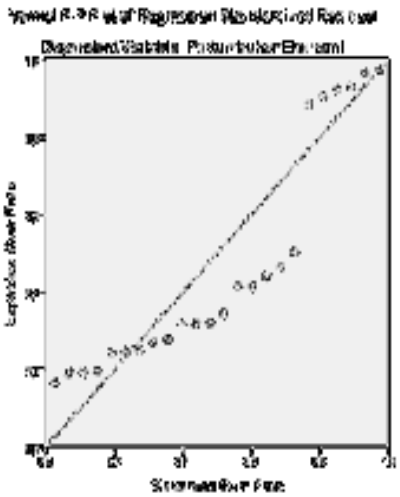

Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot menunjukan polagrafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar dari sekitar garis normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolenearitas

Uji Multikolenearitas
Tabel 5.6
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	506,569	212,366		2,385	,027					
InvestasiAsing	-4,840	2,887	-,347	-1,677	,108	-,239	-,344	-,331	,914	1,095
JumlahUangBeredar	,544	,308	,365	1,767	,092	,263	,360	,349	,914	1,095

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi
Sumber : Data Primer yang diolah, 2016.

Melihat hasil besaran korelasiantara variable independent tampak bahwahanya variable Independent terlihat bahwa tidak terjadi multikolonieritas atau korelasiantara variable yang tinggi diatas 90%. Hal ini juga ditegaskan dari hasil nilai VIF tida kada yang nilainya lebih dari 10 dan nilai tolerance yang dibawah 0,10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 5.7
Condition Index

CollinearityDiagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	InvestasiAsing	JumlahUangBeredar
1	1	2,087	1,000	,01	,01	,04
	2	,881	1,539	,01	,00	,88
	3	,032	8,051	,98	,98	,07

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : data yang diolah, 2011-2016

$$\text{Nilai CI} = \sqrt{\frac{maximum\,eigenvalue}{minimum\,eigenvalue}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,881}{0,032}} = 27,53125$$

Jikanilai CI< 30 tidak terdapat multikoloneritas.

3. Uji Heterokedatisitas

Gambar 5.3
Grafik Heteroskedasitas

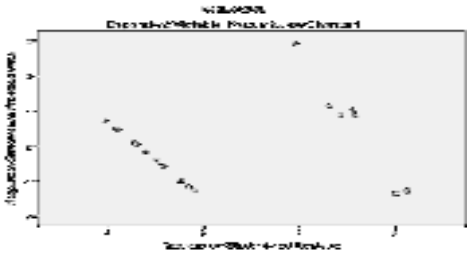

Hasil pengujian Heteroskedististas menunjukan titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau tidak ada pola yang sejajar, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedististas.

Dengan demikian, asumsi-asumsi normalitas multikearitas dan Heteroskedististas dalam model regresi dapat dilihat model ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji Auto korelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelum nya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari auto korelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin- Watson (UjiDW) pengambilan keputusan sebagai berikut:

$d_u < d < 4 - d_u$

Dimana :

d = nilaidurbin Watson hitung

d_u = nilai batas / upper Durbin Watson table

Tabel 5.8
Uji Autokorelasi
Model Summary[b]
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,423[a]	,179	,101	264,48492	,179	2,294	2	21	,126	,817

a. Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar, Investasi Asing
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Nilai DW hitung sebesar 0,817 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 24 dan jumlah variable independen 2, maka di table Durbin-watson akan di peroleh nilai :

T = 24 K= 2

DL= 1,27276

Du= 1,44575

Nilai DW = 0,817 dengan nilai tabel signifikansi 5%.

Karena DW terletak antara DU dan (4-DU) = 1,44575 < 0,817 < 3,817 maka dapat disimpulkan bahwa Tidak bisa menolak Ho (gagal tolak Ho) yang artinya tidak ada autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada data yang diuji.

5.6 UjiHipotesis

Setelah dilakukan uji asumsiklasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi sederhana, maka langkah selanjut nya adalah melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah Jumlah Uang Beredar dan Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

5.6.1 Uji Signifikan Parsial (Uji – t)

Perhitungan regresi sederhana ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.0. hasil dari perhitungan regresi sederhana diperoleh sebagai berikut :

Tabel5.9
Hasil UjiSignifikan Parsial (Uji-t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	496132230,554	94009672,619		5,277	,013					
	Jumlahuangberedar	-358914,171	254252,346	-,742	-1,412	,253	-,544	-,632	-,632	,724	1,381
	Investasiasing	-18204,710	25288,639	-,379	-,720	,524	,011	-,384	-,322	,724	1,381

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber : Data Primer yang diolah,2011-2016

Berdasarkan hasil analisis regresi di peroleh nilai t hitung sebesar -1,677< t table 2,07387dan niali signifikansi (sig.) 0,108 >0,05.

Maka dapat di simpulkan bahwa Ho di terima dan H1 ditolak, yang artinya“ Jumlah Uang beredar (X1) adanya berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).”

Berdasarkan tabel koefisien, dapat diketahui bahwa besar nya nlai t = 1,767 sedangkan segnifikanya sebasar = 0,092 < 0,05. Dengan demikian Ho diterima yang berarti terdapat hubungan antara variabel Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sehingga persamaan regresinya adalah :

Y= a+ b1X1 + b2X2

Keterangan:

Y= PertumbuhanEkonomi

X1= InvestasiAsing

X2= JumlahUangBeredar

b1 dan b2= Koefisien

a = Konstanta

Y = 506,569+ b1 -4,840 + b2 0,544.

5.6.2. Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Uji F di gunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel5.10
Uji F
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320937,563	2	160468,782	2,294	,126[b]
	Residual	1468997,719	21	69952,272		
	Total	1789935,282	23			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar, Investasi Asing

Sumber : data yang diolah, 2011-2016

Dari output diatas, di peroleh nilai F hitung sebesar 2.294. dan nilai F table sebesar 3,40. Karena nilai F hitung 2.294>5,14 maka dapat ditarik kesimpilan bahwa variable bebas X1 dan X2 (secara simultan) ber pengaruh terhadap variable terikat (Y).

5.6.3.Koefisiensi Determinasi(^{2})

Hasil analisis determinan dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 5.11
Regresi Linier Bergandaa
Model Summary[b]
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,423[a]	,179	,101	264,48492	,179	2,294	2	21	,126	,817

a. Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar, Investasi Asing

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari output model summary, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,179 atau sama dengan 17,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa jumlah uang beredar dan investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 17,9%. Sedangkan sisanya (100% - 39,9% = 82,1%) dipengaruhi oleh variable lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variable lain ini sering disebut sebagai eror (e), untuk

menghitung nilai eror dapat digunakan rumus e = 1-R2. Sebagai catatan, besarnya nilai koefisien determinasi atau R square hanya antara 0-1.

5.7. Pembahasan

Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat bahwa Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Variabel ini dikatakan berpengaruh karena nilai sig. variabel adalah 0.524 nilai sig. lebih besar dari 0.05.

Kesimpulan Dan Saran

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Analisis Investasi Asing dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini member kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisa data dengan menggunakan metode analisis regresi Berganda menunjukan bahwa factor Analisi Jumlah Uang Beredar dan Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Data sempel berhasil membuktikan hubungan tersebut. data yang dikumpulkan berhasil membuktikan hipotesis.
3. Hasil analisa regresi berganda secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,179 atau sama dengan 17,9%. Angka tersebut mengandungarti bahwa jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar17,9%.
4. Berdasarkan tabel koefisien, dapat diketahui bahwa besarnya nlai t = 1,767 sedangkan segnifikanya sebasar = 0,5092> 0,05. Dengan demikian Ho diterima yang berarti terdapat hubungan antara variabel Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jika terjadi kenaikan Investasi Asing, maka akan terjadi Pertumbuhan Ekonomi.

6.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

a. Peningkatan jumlah uang beredar seharusnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan disesuaikan dengan sasaran dari Bank Indonesia.
b. Pemerintah membuka peluang investasi asing lebih besar, sehingga Negara-negara lain dapat lebih besar menanamkan modalnya. Hal tersebu takan meningkatkan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan maju..

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari dalam penulisan karyai lmiah ini masih banyak kekurangan-kekurangan maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya :

a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga dapat mempertimbangkan variabel lain yang lebih mempengaruhi Jumlah Uang Beredar.
b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat ditambahkan variable-variabel lain dan dengan sampel yang lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

Ardito Bhinadi. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa. [Jurnal].Ekonomi Pembangunan Volume 8 No.1. Hal: 39-48.

Aulia Zul Thirafi, Muhammad. 2012. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur dan kepadatan penduduk terhadap penanaman modal asing di kabupaten Kendal. Semarang :Universitas Negeri Semarang.

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Badan Pusat Statistik. 2011. Sumatera Utara Dalam Angka. BPS. Sumatera Utara. BI, Jumlah Uang Beredar dan Jumlah Inflasi. Sumatera Utara.

Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara. Bank Indonesia

Banjarnahor, NovaRiatna. 2008. Mekanisme Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan Moneter. BEMP. Jakarta

Eni Setyowati dan Siti Fatimah. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Heru Perlambang. 2012.Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, dan

Nopirin. 2007. Ekonomi Moneter. BPFE. Yogyakarta.Majid, M. Khairin. 2013. Analisis pengaruh utang luar negeri (ULN)dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1986-2011. Malang :Universitas Brawijaya.

Rosyidi, Suherman. 2009. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan factor-faktor yang Mempengaruhi nya. (http:www.jurnalakuntansi keuangan.com volume 5 Mei 2005)

Supranto, J. 2004. Statistik. EdisiKeenam. Erlangga. Jakarta.

Widiastuti, Irene Linda .2012. Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi Di Indonesia Bulan Januari 2001- Desember 2011 : Pendekatan Error Correction Model (ECM). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta . Yogyakarta.

Wiranata, S. 2004. "Pengembangan Investasi di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XII (1) 2004.

Sadono Sukirno. 2006. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Zaenuddin, Muhammad. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMS di Batam, Volume 2 nomor 2 hal. 156-166. Batam :PoliteknikBatam